



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 65);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017.
- b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman masa transisi sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten 2016-2021 ditetapkan, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.

Pasal 4

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Narasi RKPD Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
 - BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2017
 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
- b. Rencana Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Mei 2016
BUPATI KLATEN,

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

ttd

JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 13

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 5
1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencana.....	I - 5
1.3.2. Kerangka Penyusunan RKPD	I - 6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I - 6
1.5. Maksud dan Tujuan	I - 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1.1. Aspek Geografis.....	II - 1
2.1.2. Aspek Demografi	II - 10
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 11
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II - 22
2.1.5. Aspek Potensi Daerah.....	II - 48
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015.....	II - 56
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015	II - 56
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015	II - 58
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 74
2.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah	II - 76
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi	III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi	III - 1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III - 9
3.1.3. Sasaran Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 16
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III - 17
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 20
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 22
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017...	IV
4.1. Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ...	IV - 1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV - 7
4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	IV - 10

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V
	5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V - 1
	5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	V - 4
	5.3. Urusan Pilihan.....	V - 7
	5.4. Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V - 9
BAB VI	PENUTUP.....	VI
	6.1. Kaidah Pelaksanaan	VI - 1
	6.2. Kesimpulan.....	VI - 2

LAMPIRAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 10
Tabel 2. 2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014 (dalam Rp.Juta)	II - 12
Tabel 2. 3	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000, di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014 (dlm Rp.Juta)	II - 12
Tabel 2. 4	Perkara dan Keputusan Pengadilan Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2015.....	II - 15
Tabel 2. 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 16
Tabel 2. 6	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015	II - 19
Tabel 2. 7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011- 2015.....	II - 19
Tabel 2. 8	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Ketenagakerjaan Lainnya.....	II - 21
Tabel 2. 9	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 22
Tabel 2. 10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015.....	II - 22
Tabel 2. 11	Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015.....	II - 24
Tabel 2. 12	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015.....	II - 24
Tabel 2. 13	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2011-2015	II - 24
Tabel 2. 14	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 26
Tabel 2. 15	Data Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014.....	II - 27
Tabel 2. 16	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Di Kabupaten Klaten Tahun 2015.....	II - 29
Tabel 2. 17	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2010-2015.....	II - 30
Tabel 2. 18	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 31
Tabel 2. 19	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Klaten 2011-2015.....	II - 32
Tabel 2. 20	Peserta KB dan KB Aktif Di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 32
Tabel 2. 21	Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Di Kabupaten Klaten Tahun 2015.....	II - 33
Tabel 2. 22	Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015	II - 35
Tabel 2. 23	Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 35
Tabel 2. 24	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015.....	II - 36
Tabel 2. 25	Pengembangan Usaha Nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015.....	II - 36
Tabel 2. 26	Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 37
Tabel 2. 27	Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 37
Tabel 2. 28	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 37
Tabel 2. 29	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 38
Tabel 2. 30	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015.....	II - 38
Tabel 2. 31	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD 2010-2015	II - 39
Tabel 2. 32	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015	II - 40

Tabel 2. 33	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015	II - 42
Tabel 2. 34	Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 42
Tabel 2. 35	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten.....	II - 43
Tabel 2. 36	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2015.....	II - 44
Tabel 2. 37	Jumlah obyek Wisata dan Pengunjung di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015.....	II - 45
Tabel 2. 38	Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (ton).....	II - 46
Tabel 2. 39	Pasar Menurut Jenisnya Di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015	II - 46
Tabel 2. 40	Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2010-2015 (dalam persen).....	II - 48
Tabel 2. 41	Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2010- 2015.....	II - 49
Tabel 2. 42	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2014 (dalam satuan Ha).....	II - 49
Tabel 2. 43	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014.....	II - 50
Tabel 2. 44	KWH Terjual PLN Menurut Bulan Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 51
Tabel 2. 45	Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2015.....	II - 51
Tabel 2. 46	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (Km)*.....	II - 52
Tabel 2. 47	Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam km)	II - 53
Tabel 2. 48	Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Di Kabupaten Klaten Tahun 2015	II - 54
Tabel 2. 49	Perbandingan Komponen Penyusun IPM Se Solo Raya Tahun 2013	II - 55
Tabel 2. 50	Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010-2015.....	II -56
Tabel 2. 51	Realisasi Jumlah Gaji & Tunjangan, dan Pelaksanaan Program-Kegiatan Dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015.....	II - 56
Tabel 2. 52	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pendidikan	II - 58
Tabel 2. 53	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kesehatan	II - 59
Tabel 2. 54	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pekerjaan Umum	II - 60
Tabel 2. 55	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	II - 62
Tabel 2. 56	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perhubungan	II - 63
Tabel 2. 57	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Lingkungan Hidup	II - 64
Tabel 2. 58	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II - 64
Tabel 2. 59	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II - 65
Tabel 2. 60	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian.....	II - 65
Tabel 2. 61	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.....	II - 66
Tabel 2. 62	Target Capaian Kinerja RPJMD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II - 67
Tabel 2. 63	Target Capaian Kinerja RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja	II - 68
Tabel 2. 64	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanahan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman modal , ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika.....	II - 69
Tabel 2. 65	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanahan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman modal , ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika mengacu RPJMD.	II - 71
Tabel 2. 66	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II - 72

Tabel 2. 67	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kearsipan dan Perpustakaan.....	II - 73
Tabel 2. 68	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Ketahanan Pangan.....	II - 73
Tabel 2. 69	Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	II - 74
Tabel 2. 70	Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017.....	II - 77
Tabel 3.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014 (dalam Rp.Juta)	III - 6
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015.....	III - 9
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III - 19
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016.....	III - 21
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III - 23
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III - 24
Tabel 3.7	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017	III - 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017	I - 2
Gambar 2. 1	Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 12
Gambar 2. 2	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 14
Gambar 2. 3	Perkembangan Kemiskinan Klaten terhadap Provinsi Tahun 2011-2015	II - 14
Gambar 2. 4	Analisi Kondisi Kemiskinan menurut Kecamatan, SKPD Kab. Klaten Tahun 2015-2018.....	II - 15
Gambar 2. 5	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	II - 17
Gambar 2. 6	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015	II - 17
Gambar 2. 7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014.....	II - 18
Gambar 2. 8	Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 18
Gambar 2. 9	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 20
Gambar 2. 10	Perkembangan Prosentase Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 20
Gambar 2. 11	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 21
Gambar 2. 12	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 23
Gambar 2. 13	Perkembangan Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015.....	II - 23
Gambar 2. 14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II - 31
Gambar 2. 15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II - 31
Gambar 2. 16	Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 (dalam satuan Kepala Keluarga)	II - 32
Gambar 2. 17	Pembagian Penduduk berdasarkan Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	II - 34
Gambar 2. 18	Trend Jumlah Tenaga Kerja Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2011-2015	II - 36
Gambar 2. 19	Profil Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan Tahun 2011-2015.....	II - 39
Gambar 2. 20	Profil Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015.....	II - 40
Gambar 2. 21	Alur Proses Identifikasi Isu Strategis Daerah.....	II - 75
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	III - 6
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2016 (dalam juta rupiah)	III - 8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan *berpedoman* pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 serta *mengacu* pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta *memperhatikan* Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 *sebagai pedoman masa transisi* sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 ditetapkan.

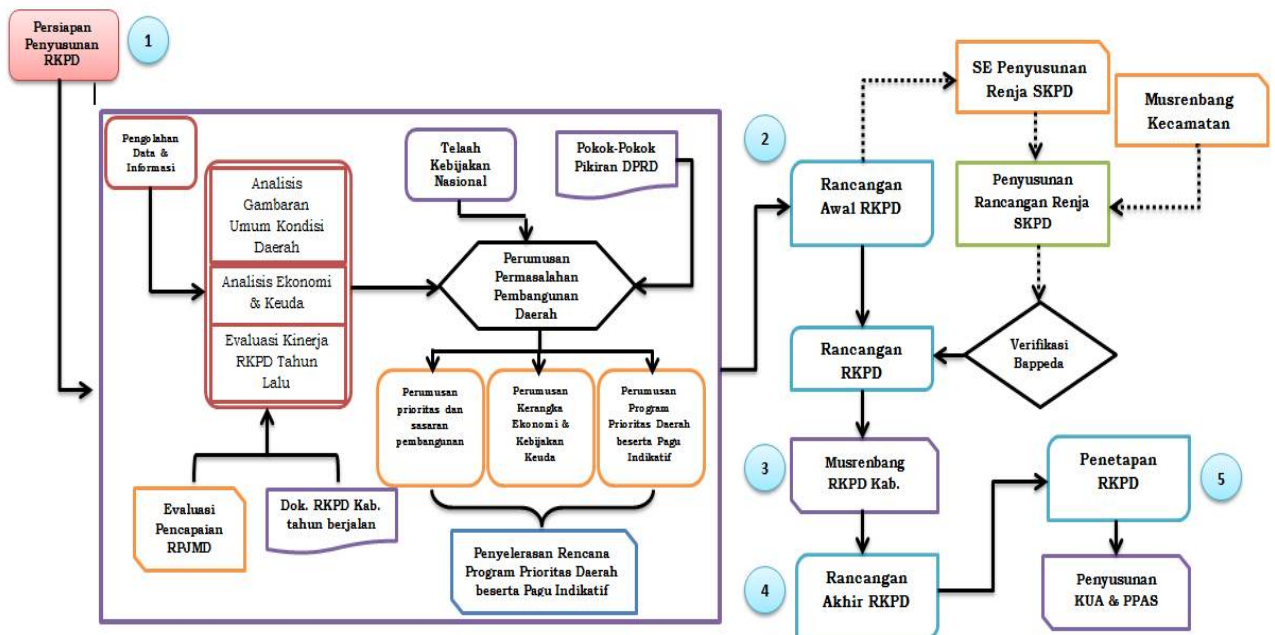
Dasar penyusunan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD disusun sebagai pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan kewajiban daerah, rencana kerja beserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu : teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunan RKPD bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjangkaran aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Alur penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBD. RKPD Tahun 2017 merupakan integrasi antara program-program pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) maupun swasta/masyarakat sebagai hasil penjaringan aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 didasarkan pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Peraturan tersebut mengarahkan pada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, tahapan, dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya diatur lebih teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa telah jelas diatur ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja SKPD). Semua dokumen perencanaan tersebut harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergitas, keterkaitan, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan juga harus dapat terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu diupayakan terwujudnya hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

Dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah. Namun mengingat RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 belum ditetapkan, RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahun ketiga 2015-2020 dalam RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 dan selaras dengan visi misi Kepala Daerah periode 2016-2021.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja SKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

3. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen RKPD Kabupaten Klaten mempedomani dan telah disinkronkan serta diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Sinkronisasi dilakukan terkait dengan kesinambungan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

1.3.2. Kerangka Penyusunan RKPD Tahun 2017

Tahun 2016 merupakan tahun transisi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten, termasuk dalam proses perencanaan

pembangunan daerah khususnya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2010-2015 sudah berakhir pada tahun 2015, sementara RPJMD 2016-2021 belum ditetapkan yang berakibat untuk perencanaan pembangunan Tahun 2017 yang merupakan tahun kedua RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 belum memiliki acuan sasaran dan indikasi program pembangunan prioritas. Untuk itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2017, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun Ketiga 2015-2020 dalam RPJPD masih bersifat umum sehingga perlu dijabarkan dalam sasaran pembangunan yang lebih spesifik dengan indikator dan target kinerja yang terukur baik ditingkat daerah maupun di SKPD. Dengan demikian diharapkan rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat lebih terarah dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang ditetapkan dan juga dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah periode 2016-2021.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD, serta isu strategis dan masalah mendesak.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, mencakup Kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Bagian ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi issue dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan dan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2016, dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bagian ini menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Menyediakan kerangka formal bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang didahului dengan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.
- b. Menyediakan kerangka logis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2017.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten ;
- c. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis khatulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

A. Letak Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY);
dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dan dengan ketinggian antara 76–1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah Kecamatan - Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.
3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl meliputi sebagian dari Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Cawas.



2. Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 m dpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 m dpl meliputi Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 m dpl meliputi Kecamatan Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

C. Kondisi Klimotologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20-25 km/jam. Pada tahun 2015 curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Kecamatan Ngawen yaitu 374 mm, sedangkan jumlah intensitas hujannya 13.308 mm/tahun. Sedangkan curah hujan terendah tercatat di Stasiun Bayat.

D. Kondisi Geologi

Adapun jenis tanah di Kabupaten Klaten ada 5 (lima) macam, adalah sebagai berikut :

1. Litosol
Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.
2. Regosol Kelabu
Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
3. Grumusol Kelabu Tua
Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua
Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
5. Regosol Coklat Kekelabuan



Bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

E. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Di mana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

F. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2011-2015 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.376 Ha pada tahun 2011, menjadi 33.314 Ha pada tahun 2012, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2013, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 33.111 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2014 seluas 54,1504 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,4893 Ha, industri 13,6611 Ha. Sedangkan pada tahun 2015 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana diatur pada Pasal 21 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan lindung terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Lindung;

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud mencakup luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Bayat.

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan



Bawahannya;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud adalah berupa kawasan resapan air, meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.

c. Kawasan Perlindungan Setempat;

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

(1). Sempadan sungai, kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud adalah mencakup luasan kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

(a). Dataran sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

(b). Dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

(c). Dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

d. Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk; dan

Kawasan sekitar dan atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air dan atau waduk tertinggi, dengan luas kurang (tiga puluh empat) hektar berada di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat.

e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan luas kurang lebih 8.557 (delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar atau 42 (empat puluh dua) persen dari luas kawasan perkotaan kurang lebih 20.018 (dua puluh ribu delapan belas) hektar.

f. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan suaka alam, pelestarian, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud terdiri atas :

(1). Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemalang; dan

(2). Kawasan Cagar Budaya meliputi:

(a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Buhrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar;



- (b). Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko kurang lebih 1(satu) hektar; dan
 - (c). Kawasan Pandanaran berada di Kecamatan Bayat dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
2. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas:
 - (1). Hutan produksi terbatas mencakup luasan kurang lebih 185 (seratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 - (2). Hutan produksi tetap mencakup luasan kurang lebih 429 (empat ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Bayat dan Kalikotes.
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
Kawasan peruntukan hutan rakyat mencakup luasan kurang lebih 1.514 (seribu lima ratus empat belas) hektar, meliputi Kecamatan Bayat, Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Tulung dan Wedi.
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:
 - (1). Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karangnongko, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.
 - (2). Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas:
 - (a). Kelapa deres meliputi Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.
 - (b). Kapuk meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
 - (c). Kopi meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung, dan Manisrenggo.
 - (d). Tembakau rajangan dan asepan meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, dan Kemalang,
 - (e). Tembakau Virginia meliputi Kecamatan Pedan, dan Trucuk.



- (f). Tembakau Vorsternland meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.
 - (g). Cengkeh meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
 - (h). Tebu meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan, dan Prambanan.
- (3). Pengembangan kawasan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Wedi, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
- (4). Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
- (1). Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap.
Kawasan peruntukan perikanan tangkap mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
 - (2). Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya.
Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:
 - (a). Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat.
 - (b). Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan dan Tulung.
 - (c). Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan nila meliputi Kecamatan Karanganom, Polanharjo dan Tulung.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas mineral serta minyak dan gas bumi, dengan penjelasan sebagai berikut :
- (1). Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
 - (a). Pertambanganan desit berada di Kecamatan Karangdowo;
 - (b). Pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Kalikotes;
 - (c). Pertambangan lempung alluvial meliputi Kecamatan Ceper, Gantiwarno, Jogonalan, Karanganom,



Karangnongko, dan Ngawen.

- (d). Pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Kemalang.
 - (2). Kawasan peruntukan pertambangan mineral merupakan wilayah pertambangan rakyat.
 - (3). Pertambangan batuan ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan.
 - (4). Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah di Kabupaten.
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- Kawasan peruntukan industri meliputi
- (1). Kawasan peruntukan industri besar meliputi:
 - (a). Kecamatan Ceper dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
 - (b). Kecamatan Pedan dengan luas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar; dan
 - (c). Kecamatan Prambanan dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar.
 - (2). Kawasan peruntukan industri menengah meliputi:
 - (a). Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) hektar;
 - (b). Kecamatan Karangnongko dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
 - (c). Kecamatan Delanggu dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar; dan
 - (d). Kecamatan Jogonalan dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar.
 - (3). Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi:
 - (a). Industri pengecoran logam berada di Kecamatan Ceper.
 - (b). Industri pandai besi meliputi Kecamatan Delanggu, Jatinom, Karangnongko, Manisrenggo, dan Polanharjo.
 - (c). Industri tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Juwiring, Karangdowo, dan Pedan.
 - (d). Industri konveksi meliputi Kecamatan Ceper, Kalikotes, Klaten Selatan, Ngawen, Pedan, dan Wedi.
 - (e). Industri genteng meliputi Kecamatan Ceper, Kalikotes, Karangnongko, Selatan, Ngawen, dan Wonosari.
 - (f). Industri meubel/furniture meliputi Kecamatan Cawas, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Ngawen, Trucuk, dan Wonosari.
 - (g). Industri gerabah/keramik meliputi Kecamatan Bayat, Wedi, dan Wonosari.
 - (h). Industri pengolahan tembakau meliputi Kecamatan



Gantiwarno, Wedi, Kebonarum, Manisrenggo, Trucuk dan Wedi.

- (i). Industri soon meliputi Kecamatan Ngawen dan Tulung.
- (j). Industri makanan kecil meliputi Kecamatan Jogonalan dan Polanharjo.

g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

(1). Kawasan peruntukan pariwisata budaya, mencakup;

- (a). Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan;
- (b). Candi Merak dan Candi Karangnongko berada di Kecamatan Karangnongko;
- (c). Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan;
- (d). Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom;
- (e). Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat;
- (f). Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk;
- (g). Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari; dan

(2). Keunikan lokal desa wisata meliputi desa :

- (a). Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
- (b). Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
- (c). Desa Wisata Duwet Kecamatan Ngawen;
- (d). Desa Wisata Soran Kecamatan Ngawen;
- (e). Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
- (f). Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
- (g). Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
- (h). Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
- (i). Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
- (j). Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

(3). Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- (a). Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
- (b). Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat; dan
- (c). Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.

(4). Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

- (a). Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat;
- (b). Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian Lumban Tirta, dan Pemancingan Janti berada di



Kecamatan Tulung;

(c). Pemandian Umbul Ponggok berada di Kecamatan Polanharjo;

(d). Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karangnom; dan

(e). Pemandian Tirtomulyono dan Pemandian Tirtomulyani berada di Kecamatan Kebonarum.

h. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi;

(1). Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mencakup luasan kurang lebih 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh) hektar meliputi desa dan kelurahan pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten.

(2). Kawasan peruntukan permukiman perdesaan mencakup luasan kurang lebih 19.935 (sembilan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten.

(3). Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.

i. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Kawasan kawasan peruntukan lainnya di antara kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi:

(1). Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) berada di Kecamatan Klaten Selatan dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar;

(2). Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten berada di Kecamatan Klaten Tengah dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;

(3). Kepolisian Resor (Polres) Klaten berada di Kecamatan Klaten Utara dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;

(4). Lapangan tembak berada di Kecamatan Trucuk dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar;

(5). Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah Kabupaten; dan

(6). Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di wilayah Kabupaten.

H. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam, berdasarkan pasal 26 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, beberapa kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:

(1). Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

a. Kawasan rawan tanah longsor;

b. Kawasan rawan banjir; dan

c. Kawasan rawan bencana angin topan.



- (2). Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi:
- Kecamatan Bayat;
 - Kecamatan Cawas;
 - Kecamatan Gantiwarno;
 - Kecamatan Kemalang;
 - Kecamatan Manisrenggo;
 - Kecamatan Prambanan; dan
 - Kecamatan Wedi.
- (3). Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi:
- Kecamatan Bayat;
 - Kecamatan Cawas;
 - Kecamatan Ceper;
 - Kecamatan Gantiwarno;
 - Kecamatan Juwiring;
 - Kecamatan Karangdowo;
 - Kecamatan Pedan;
 - Kecamatan Prambanan;
 - Kecamatan Trucuk;
 - Kecamatan Wedi; dan
 - Kecamatan Wonosari.
- (4). Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana mencakup seluruh wilayah di Kabupaten.

2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 1.480.271 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 735.702 jiwa, dan perempuan sebanyak 744.569 jiwa. Penambahan penduduk sebanyak 11.018 jiwa, dengan laju pertumbuhan 0,75% dan Kepadatan penduduk 2.258 jiwa/km². Gambaran laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	2014	2015	Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Prambanan	58.712	59.460	748	1,26	2.434
02. Gantiwarno	49.631	50.161	530	1,06	1.956
03. Wedi	64.290	64.525	235	0,36	2.647
04. Bayat	74.836	75.623	787	1,04	1.918
05. Cawas	70.071	70.118	47	0,07	2.034
06. Trucuk	87.526	87.121	-405	-0,46	2.577
07. Kalikotes	23.861	23.913	52	0,22	1.842
08. Kebonarum	68.260	69.157	897	1,30	7.152
09. Jogonalan	48.084	48.689	605	1,24	1.824
10. Manisrenggo	42.082	42.466	384	0,90	1.575
11. Karangnongko	73.735	74.681	946	1,27	2.793
12. Ngawen	54.507	55.013	506	0,92	3.242

Kecamatan	2014	2015	Penambahan Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Ceper	53.060	53.201	141	0,27	2.176
14. Pedan	68.271	68.651	380	0,55	3.581
15. Karangdowo	70.626	71.171	545	0,77	2.435
16. Juwiring	49.739	49.868	129	0,26	1.674
17. Wonosari	48.610	48.641	31	0,06	1.562
18. Delanggu	52.034	52.404	370	0,71	2.790
19. Polanharjo	62.049	62.614	565	0,90	2.626
20. Karanganom	66.804	67.867	1063	1,57	2.821
21. Tulung	41.905	42.428	523	1,23	1.326
22. Jatinom	51.388	51.517	129	0,25	1.450
23. Kemalang	41.052	41.502	450	1,08	803
24. Klaten Selatan	50.804	51.372	568	1,11	3.560
25. Klaten Tengah	47.245	47.700	455	0,95	5.348
26. Klaten Utara	50.070	50.408	338	0,67	4.856
Jumlah	1.469.253	1.480.271	11.018	0,75	2.258

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan data tersebut di atas, apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 87.676 jiwa, Kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 97.796 jiwa, Kelompok umur 10-12 tahun sebanyak 102.592 jiwa, Kelompok umur 13-15 tahun sebanyak 61.970 jiwa, Kelompok umur 16-18 tahun sebanyak 100.749 jiwa, Kelompok umur 19-24 tahun sebanyak 101.729 jiwa, Kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 104372 jiwa, Kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 129.517 jiwa, Kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 127.487 jiwa, Kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 115.918 jiwa, Kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 108.940 jiwa, Kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 95.322 jiwa, Kelompok umur 55-59 tahun sebanyak 82.738 jiwa, Kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 61.815 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 163.620 jiwa.

Di samping itu, adanya pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2014 jumlah KK sebesar 454.842 KK, atau terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga sebesar 4,29% bila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 475.229 KK.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten dapat dilihat pada aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga serta agama sebagaimana tersebut di bawah ini:

2.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2013 dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2000 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Nilai PDRB atas



dasar Harga Konstan Tahun 2000, di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014 (dalam Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.471.010,67	11,1	2.583.620,33	4,56	2.562.146,59	-0,83
2	Pertambangan dan Penggalian	523.680,55	3,87	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19
3	Industri Pengolahan	5.991.221,12	6,51	6.506.551,46	8,6	7.094.088,57	9,03
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.545,06	8,7	37.301,57	7,98	39.710,03	6,46
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.692,21	1,14	11.878,14	11,09	13.083,66	10,15
6	Konstruksi	1.199.173,63	2,55	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.912.955,36	1,15	4.028.912,46	2,96	4.124.651,58	2,38
8	Transportasi dan Pergudangan	424.248,41	4,17	468.996,42	10,55	512.975,80	9,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	733.824,99	2,26	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89
10	Informasi dan Komunikasi	722.286,22	2,11	749.129,31	3,72	778.393,63	3,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	637.716,58	6,26	701.765,45	10,04	717.168,09	2,19
12	Real Estate	272.023,36	3,62	290.530,05	6,8	316.062,61	8,79
13	Jasa Perusahaan	50.940,86	9,49	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	530.808,20	-0,10	543.501,77	2,39	540.694,79	-0,52
15	Jasa Pendidikan	1.085.188,87	23,09	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	182.777,69	13,45	200.873,15	9,9	224.544,38	11,52
17	Jasa Lainnya	319.311,93	-1,18	354.825,20	11,12	385.231,09	8,57
Produk Domestik Regional Bruto		19.102.405,71	5,71	20.299.990,96	6,27	21.392.250,75	5,38

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2015

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,71 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.21.392.250,75 pada tahun 2014.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000, pada tahun 2012-2014 sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3
Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2000
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014 (dlm Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.820.039,55	13,2	3.092.353,37	13,24	3.210.623,71	12,3
2	Pertambangan dan Penggalian	601.493,80	2,81	662.226,32	2,84	779.207,55	2,98
3	Industri Pengolahan	6.963.659,60	32,59	7.656.350,45	32,79	9.062.902,26	34,71
4	Pengadaan Listrik dan gas	33.763,34	0,16	34.573,28	0,15	37.059,00	0,14
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.828,33	0,05	12.475,50	0,05	14.555,27	0,06



No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Konstruksi	1.307.396,81	6,12	1.417.692,47	6,07	1.604.897,56	6,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.138.649,13	19,37	4.398.186,49	18,84	4.624.131,37	17,17
8	Transportasi dan Pergudangan	431.466,84	2,02	482.687,50	2,07	553.015,86	2,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	776.966,48	3,64	802.421,78	3,44	878.387,98	3,36
10	Informasi dan Komunikasi	752.212,33	3,52	795.566,86	3,41	836.098,10	3,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	723.974,35	3,39	809.724,85	3,47	872.413,56	3,34
12	Real Estate	275.615,93	1,29	298.881,50	1,28	343.172,57	1,31
13	Jasa Perusahaan	56.290,58	0,26	71.050,05	0,30	79.657,41	0,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	592.451,52	2,77	622.229,09	2,66	664.379,58	2,54
15	Jasa Pendidikan	1.331.706,32	6,23	1.548.658,63	6,63	1.805.978,48	6,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	220.042,92	1,03	262.302,13	1,12	303.146,41	1,16
17	Jasa Lainnya	331.734,12	1,55	381.500,21	1,63	441.155,71	1,69
Produk Domestik Regional Bruto		21.368.291,95	100	23.348.880,48	100	26.110.782,38	100

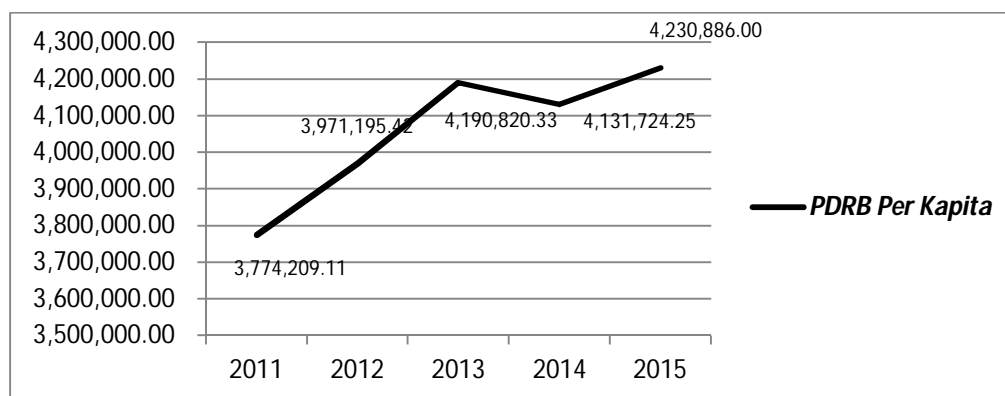
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.368.291,95 juta pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.26.110.782,38 pada tahun 2014.

2.1.3.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah. Adapun perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang bersifat fluktuatif.

Pada tahun 2011 sebesar Rp.3.774.209,11 pada tahun 2012 naik menjadi sebesar Rp.4.211.507,35 pada tahun 2013 turun menjadi sebesar Rp.4.028.840,00 pada tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp.4.131.724,25, dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.230.886,00. Gambaran selengkapnya perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.1.



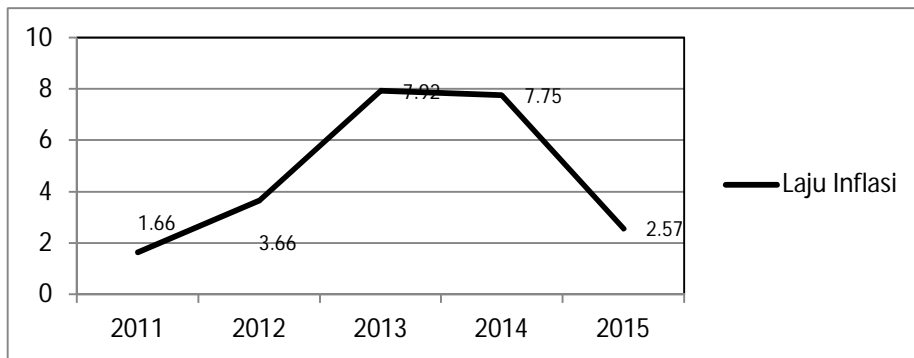
Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten

Gambar 2.1 Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015



2.1.3.3. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun dari tahun 2011-2015 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2011 sebesar 1,66%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 2,57% disebabkan oleh peningkatan harga komoditas karena kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Perbandingan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.2.



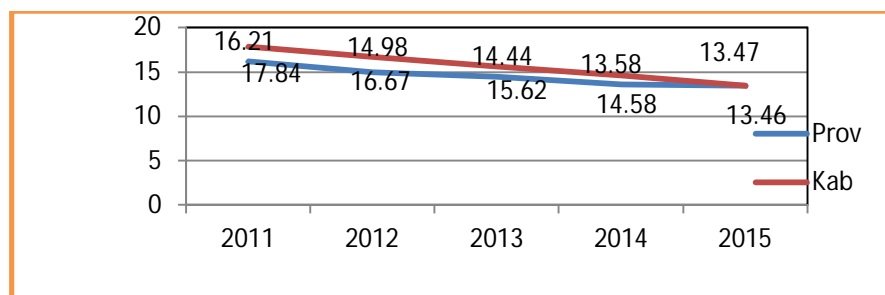
Sumber : Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2015

Gambar 2.2
Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Jika dilihat dari komponen pembentuknya, inflansi pada tahun 2012 terjadi kinerja positif disebabkan adanya ketercukupan bahan pangan strategis seperti beras, jagung dan bawang, terutama harga cabe. Hal ini mengkondisikan bahwa kesejahteraan masyarakat membaik. Namun pada tahun 2013 terjadi pelambatan inflasi, karena daya beli masyarakat menurun sebagai akibat pengaruh kenaikan BBM, serta ketersediaan bahan pangan lokal. Kondisi tahun 2015 mengalami kenaikan sebagai akibat perubahan musim yang mengakibatkan stok bahan pangan terutama beras, dan palawija naik.

2.1.3.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif lambat. Jumlah penduduk miskin tahun 2011 sebanyak 203.052 Jiwa (16,21 %) sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi sebanyak 175.480 jiwa (13,47%). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, dan sebagai gambaran dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.3

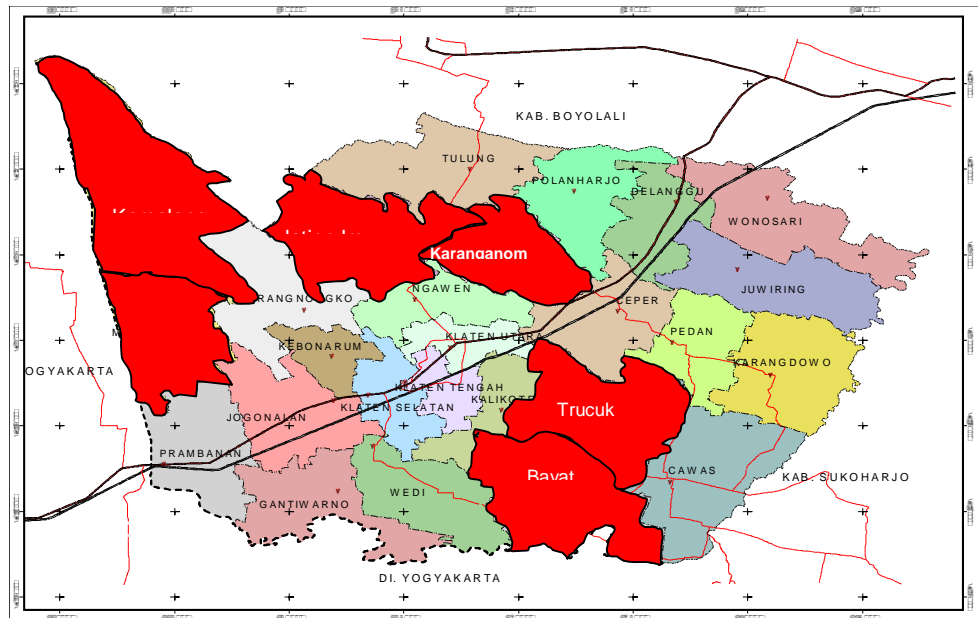


Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten

Gambar 2.3 Perkembangan Kemiskinan Klaten Terhadap Provinsi Tahun 2011 - 2015



Sebaran penduduk miskin di Kabupaten Klaten sebagian besar di wilayah pedesaan. Gambaran kondisi kemiskinan berdasarkan kecamatan, sebagaimana Gambar 2.4



Gambar 2.4
Analisis Kondisi Kemiskinan Menurut Kecamatan, SPKD Kab. Klaten Tahun 2015-2018

2.1.3.5. Jumlah Tindak Pidana

Kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (kamtramtibum) di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif, hal ini ditunjukkan dengan jumlah tindak pidana dari 299 perkara pada tahun 2011 menjadi 262 perkara pada tahun 2015. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan dalam jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk yang mencapai kisaran 1,33%. Disamping itu, adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat juga ikut berkontribusi terhadap tingginya jumlah tindak pidana. Jumlah tindak pidana di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.4

Tabel 2.4
Perkara dan Keputusan Pengadilan Menurut Bulan di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Bulan	Mendapat Keputusan Pengadilan				Dikembalikan ke Kejaksaan / Dikirim ke Pengadilan		Belum Mendapat Keputusan	
	Dijatuhi Hukuman		Dibebaskan		Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa
	Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Januari	22	29	-	-	-	-	31	52
2. Pebruari	24	52	-	-	-	-	28	45
3. Maret	24	36	-	-	-	-	31	50
4. April	22	29	-	-	-	-	34	49
5. Mei	29	44	-	-	-	-	24	48
6. Juni	20	27	-	-	-	-	19	40
7. Juli	13	18	-	-	-	-	26	49
8. Agustus	20	26	-	-	-	-	32	55
9. September	25	48	-	-	-	-	34	46
10. Oktober	25	32	-	-	-	-	27	42
11. November	21	33	-	-	-	-	21	29
12. Desember	15	21	-	-	-	-	17	19

Bulan	Mendapat Keputusan Pengadilan				Dikembalikan ke Kejaksaan / Dikirim ke Pengadilan		Belum Mendapat Keputusan	
	Dijatuhi Hukuman		Dibebaskan		Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa
	Perkara	Terdakwa	Perkara	Terdakwa				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah 2015	260	395	-	-	-	-	324	524
2014	224	318	-	-	-	-	274	389
2013	323	408	-	-	-	-	356	436
2012	260	347	-	-	-	-	-	-
2011	299	299	-	-	-	-	322	322

Sumber : Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten

2.1.3.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat (diukur dengan Angka/Usia Harapan Hidup ketika lahir), (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Angka Melek Huruf (*literacy rate*) dan Rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (*mean years of schooling*), dan (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan konsumsi perkapita riil yang disesuaikan (PPP – *Purchasing Power Parity*—dalam rupiah). Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Indikator IPM	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka harapan Hidup	71,67	71,84	72,16	72,35	71,81
Angka melek huruf	89,92	89,93	90,01	90,17	99,78
Rata-rata lama sekolah	8,28	8,31	8,33	8,52	8,96
Pengeluaran Per kapita	646.390	649.490	652.610	654.760	711.023
IPM	74,10	74,46	74,91	75,25	75,68

Sumber : IPM Kabupaten Klaten 2015

*) angka sementara

Dari Tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan, yaitu dari 74,10 pada tahun 2011, menjadi 74,46 pada tahun 2012, dan meningkat lagi menjadi sebesar 74,91 pada tahun 2013, pada tahun 2014 mencapai 75,25, dan pada tahun 2015 menjadi 75,68. Besaran IPM yang meningkat (walaupun masih relatif kecil) mencerminkan terjadinya peningkatan mutu/kualitas SDM di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015.

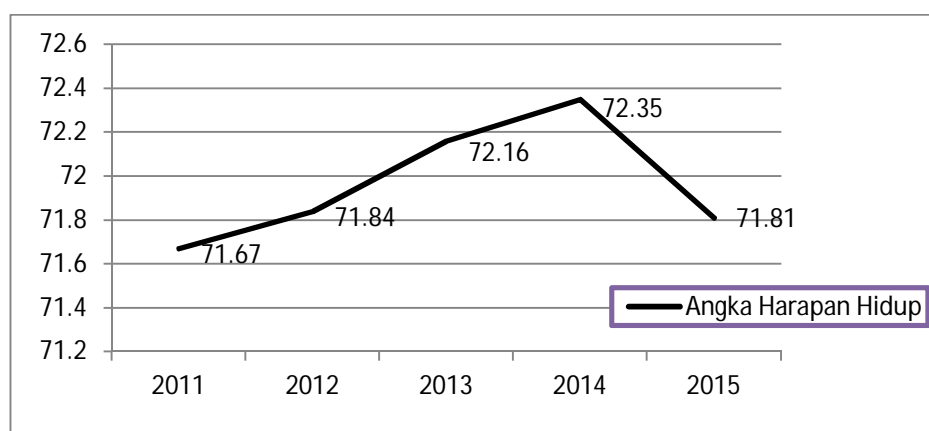
Indikator pembentuk IPM secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH), di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator



meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2011-2015 UHH masyarakat Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Gambar 2.5

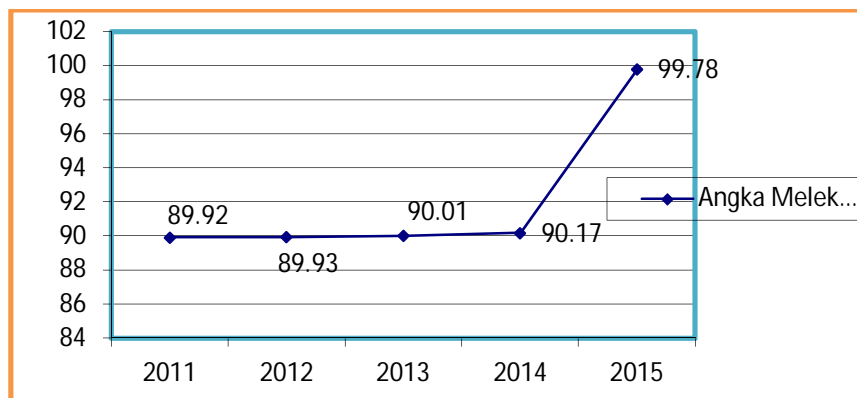


Sumber : KKDA Kab. Klaten 2015, diolah

Gambar 2.5
Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2). Angka Melek Huruf

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah angka melek huruf. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klaten usia 15 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari 89,90% pada tahun 2011, menjadi 99,78% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat buta aksara semakin rendah, namun demikian pembangunan ke depan tetap harus memperhatikan peningkatan kualitas/mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.6.



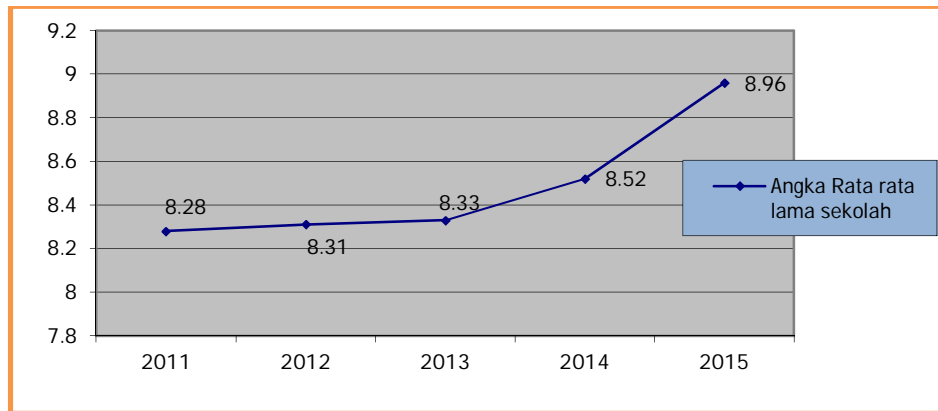
Sumber: Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2015

Gambar 2.6
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015



3). Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015, yaitu dari sebesar 8,28 pada tahun 2011 sebesar 8,96 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.7

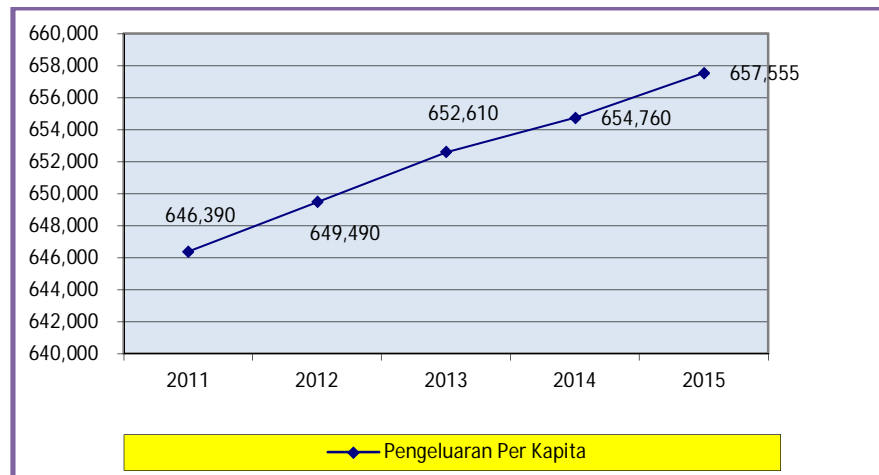


Sumber : Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2014

Gambar 2.7
Perkembangan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014

3). Pengeluaran Per Kapita

Angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2011-2015, yaitu dari sebesar Rp.646.390,- pada tahun 2011, menjadi sebesar Rp. 649.490,- pada tahun 2012, menjadi sebesar Rp. 652.610,- pada tahun 2013, menjadi sebesar Rp. 654.760,- pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 657.555,- Hal ini menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat juga semakin naik. Perkembangan angka pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar 2.8.



Sumber : Tinjauan KKDA Kab. Klaten 2014

Gambar 2.8
Perkembangan pengeluaran per kapita di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.7. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2011-2015 telah mengalami perubahan secara signifikan. Untuk jenjang SD/MI turun dari sebesar 123,01% menjadi sekitar 94,51% dan jenjang SMP/MTs dari 95,37% menjadi 87,62%, serta jenjang SMA/SMK/MA/SMALB mengalami penurunan dari 78,46% menjadi sekitar 93,12%. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten
Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011-2015

No	Tahun	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C
1	2011	123,01	95,37	78,46
2	2012	123,37	94,24	77,94
3	2013	91,44	127,44	68,29
4	2014	92,27	87,26	82,74
5	2015	94,51	87,62	93,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

2.1.3.8. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2011-2015 juga mengalami perubahan secara signifikan. Untuk jenjang SD/MI menurun dari 105,79% menjadi sekitar 81,59% dan jenjang SMP/MTs dari 68,75% menjadi sekitar 63,96%, serta untuk jenjang SMA/SMK/MA/SMALB mengalami penurunan dari sebesar 52,85% menjadi sekitar 60,50%. Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011- 2015

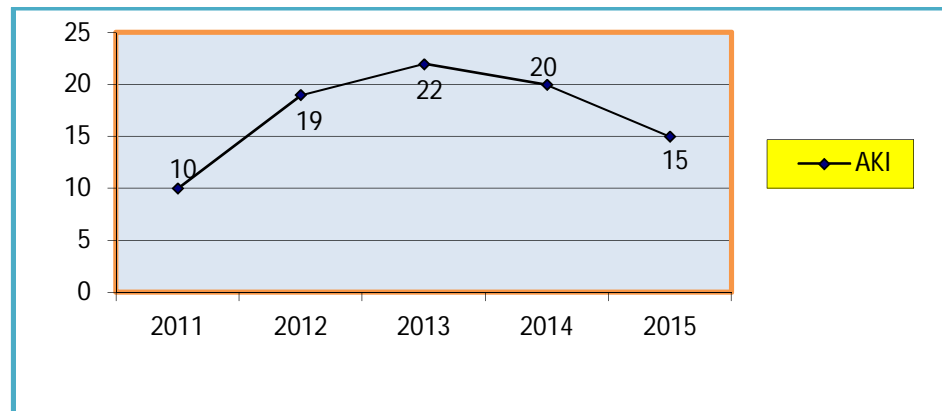
No	Tahun	SD /MI /SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
1	2011	105,79	68,75	52,85
2	2012	106,39	67,87	52,79
3	2013	78,46	91,13	44,87
4	2014	79,13	62,48	44,08
5	2015	81,58	63,96	60,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

2.1.3.9. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kondisi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah Kecamatan dengan kasus

kematian ibu yang tinggi, yang diantaranya adalah Kecamatan Prambanan dan Jogonalan. Perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

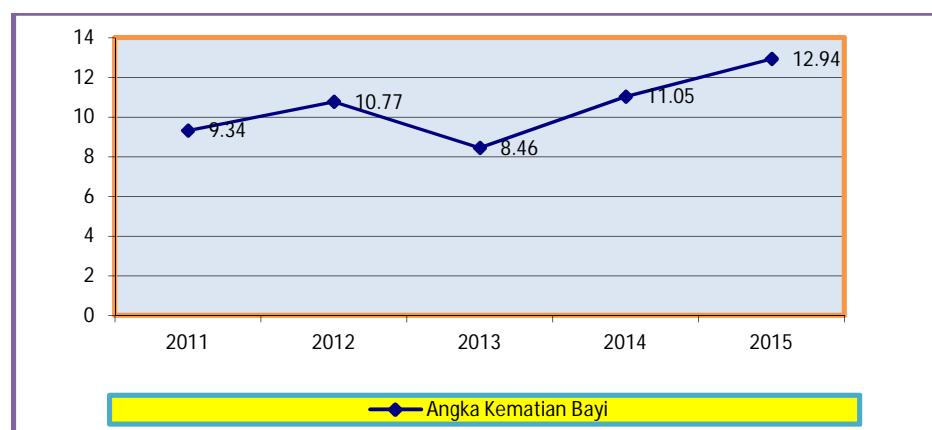


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2015

Gambar 2.9
Perkembangan Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.10. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung mengalami penurunan. Penyebab kematian bayidi samping karena pengaruh ibu dalam kondisi hipertensi dan pendarahan, juga diakibatkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi, seperti Kecamatan Trucuk, Ngawen dan Jogonalan. Perkembangan angka kematian bayi melahirkan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 dapat disajikan pada Gambar 2.10.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2015

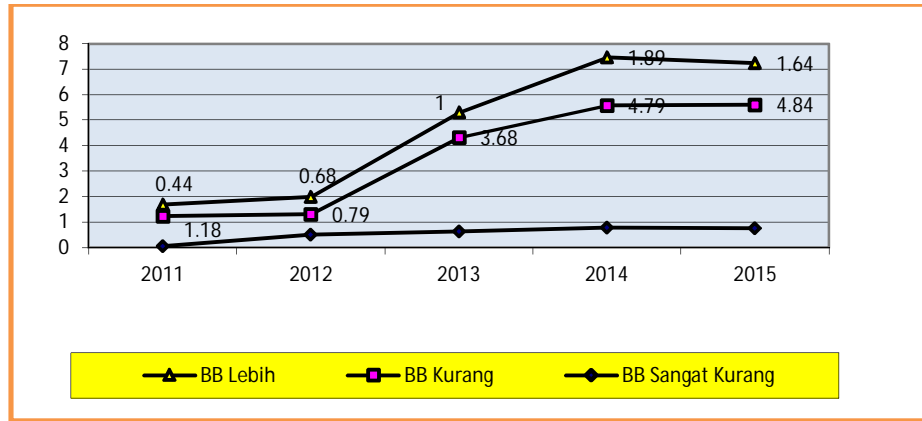
Gambar 2.10
Perkembangan Prosentase Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.11. Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab balita gizi buruk karena kondisi sosial ekonomi keluarga, juga faktor medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah Kecamatan dengan kasus balita gizi buruk



yang tinggi, seperti Kecamatan Karanganyar, Prambanan dan Klaten Tengah. Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.11



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2015

Gambar 2.11
Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2.1.3.12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten menunjukkan kecenderungan yang bersifat fluktuatif. Angka TPAK yang pada tahun 2010 sebesar 92,51%, pada tahun 2014 telah menjadi sebesar 83,78%. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk per 100 angkatan kerja yang bekerja ada sekitar 92 orang. Di lain pihak, tingkat pengangguran terbuka relatif tetap pada kisaran 0,05-0,29%. Gambaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Ketenagakerjaan Lainnya

No	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,03	72,22	73,1	70,46	71,91
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,35	3,66	5,38	4,75	4,23
3	Bekerja (%)	65,68	69,57	69,17	67,11	69,29
4	Penduduk usia Kerja	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
5	Angkatan kerja	696.071	704.715	704.715	630.300	630.291
6	Jumlah yang menganggur (jiwa)	30.279	25.793	37.914	29.953	29.951

Sumber : Kajian KKDA 2015

2.1.3.13. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni dan budaya di kabupaten Klaten ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan museum. Bidang olahraga perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga dan gedung olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 2.9.



Tabel 2.9
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kelompok Kesenian	117	117	177	122	122
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	20	20	25	25
3	Jumlah Klub Olahraga	16	16	16	16	16
4	Jumlah Gedung Olahraga (Tk. Kab)	1	1	1	1	1

Sumber : Disbudparpora Kabupaten Klaten 2015

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kabupaten Klaten pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus layanan wajib dan layanan pilihan, dan gambaran selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

2.1.4.1. Fokus Layanan Wajib

1). Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten dilihat pada tahun 2010-2014 mempunyai kecenderungan peningkatan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B, menjadi 126,37 sedangkan SD/MI/SDLB/Paket A dan SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C mengalami penurunan menjadi 48,37 dan 88,81. Gambaran Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	SD /MI /SDLB /Paket A	SMP/MTs/SM PLB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
1	2011	81,56	65,60	36,29
2	2012	119,63	93,65	57,28
3	2013	88,81	72,67	48,37
4	2014	82,24	86,52	77,79
5	2015	93,83	86,83	51,51

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

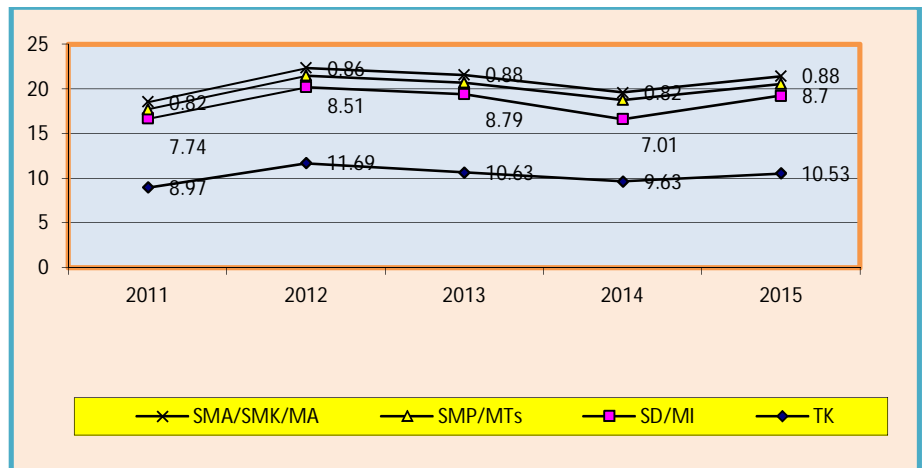
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Klaten untuk jenjang SD /MI /SDLB /Paket A mencapai 119,63, sedangkan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk provinsi pada tahun yang sama mencapai 98,62 jadi Klaten lebih tinggi dibanding provinsi. Begitu pula untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B Klaten lebih tinggi dibanding provinsi, dimana pada tahun 2013 capaiannya hanya 88,39.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio tersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif. Gambaran rasio ketersediaan



sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12

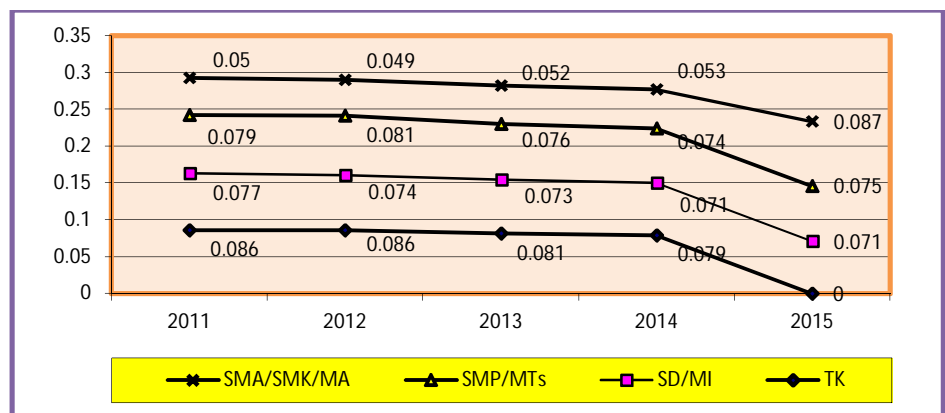


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.12
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid menunjukkan perbandingan antara guru dan murid per 10.000 yang mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar. Kondisi di Kabupaten Klaten dari semua jenjang pada tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif, dan Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.13



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.13
Perkembangan Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

2). Kesehatan

a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Proporsi puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 cenderung tetap, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi Puskesmas sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling,
Pustu per Satuan Penduduk

Tahun	Puskesmas		Puskesmas Keliling		Pustu	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2011	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2012	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2013	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2014	34	0,003	34	0,003	86	0,007
2015	34	0,003	34	0,003	86	0,007

Sumber : KKDA Kabupaten Klaten 2015 (diolah)

Sedangkan rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk pada tahun 2015 tercatat 0,147.

b. Rasio Dokter

Proporsi dokter umum di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 lebih besar dibanding dokter spesialis dan dokter gigi, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat didominasi dokter umum sebagai ujung pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Tahun	Dokter umum		Dokter spesialis		Dokter gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2011	136	0,010	51	0,004	30	0,002
2012	218	0,015	48	0,003	33	0,002
2013	138	0,030	38	0,002	34	0,002
2014	146	0,020	29	0,002	27	0,002
2015	146	0,020	29	0,002	27	0,002

Sumber : KKDA Kabupaten Klaten 2015 (diolah)

Sedangkan dokter per satuan penduduk pada tahun 2015 tercatat 0,313.

c. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunisation* di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 cenderung lebih cenderung meningkat hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada cakupan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat lebih baik, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Tahun	Jumlah desa/kel	Jumlah ds/kel UCI	Cakupan
2011	401	401	100 %
2012	401	401	100 %
2013	401	401	100 %
2014	401	401	100 %
2015	401	401	100 %

Sumber : Capaian RPJMD Kabupaten Klaten 2015



3). Pekerjaan Umum dan ESDM

a. Prasarana jalan

Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk kedalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 777 km. Pelayanan prasarana jalan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai pengukuran kinerja SKPD DPU dan ESDM tetap mengacu dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengingat adanya ketersediaan data base dan target capaian yang telah ditetapkan. Adapun kondisi prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2015 sebagai berikut:

(1). Jaringan Jalan

- (a). Aksesibilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- (b). Mobilitas, dengan indikator tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan. Tingkat mobilitas jaringan jalan dilihat dari rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua PK terhadap jumlah total penduduk Kabupaten Klaten dalam satuan km/10.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebanyak 1.480.271 jiwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk minimal untuk suatu wilayah yang kepadatannya 1000 s/d 5000 jiwa/km² adalah 3 km per 10.000 jiwa. Pencapaian SPM indeks mobilitas pada tahun 2015 sudah mencapai 174,33 termasuk kategori 1 dengan tingkat kerapatan penduduk < 100 jiwa/km²
- (c). Keselamatan, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 baru mencapai 58,16% dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%

(2). Ruas jalan

- (a). *kondisi jalan*, dengan indikator tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan



nyaman. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 baru mencapai 67,65 % dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, artinya kondisi jalan sudah melampaui target yang ditetapkan.

(b). *kecepatan*, dengan *indikator* tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Berdasarkan pencapaian dan penerapan SPM pada tahun 2015 sudah mencapai 76,65 % dan sesuai penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2014 minimal harus mencapai 60%, dengan kondisi ini Klaten sudah melampaui.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Sesuai dengan penetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010, bahwa cakup irigasi ditentukan dengan indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, dan pada tahun 2015 ketersediaan air irigasi sudah mencapai 120%. Artinya sudah melampaui target nasional.

c. Pelayanan Air Bersih Dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 68,94%. Sudah barang tentu pelayanan dasar air bersih harus ditingkatkan sebagai upaya untuk mencapai target Millenium Development Goal's tahun 2015 yaitu sebesar 75%. Adapun Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 dapat lihat pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Tahun	Air Bersih yang Didistribusikan	Cakupan Pelayanan air bersih dan sanitasi
2011	9.687.483	73,85
2012	9.914.382	69,30
2013	10.216.812	69,76
2014	11.257.296	68,94
2015	10.983.558	68,43

Sumber : PDAM dan Pencapaian SPM 2015

4). Perumahan

Dalam aspek penyediaan sarana permukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Klaten. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya



Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Rumah tidak permanen masih relatif besar dan menjadi permasalahan tersendiri. Jumlah rumah dengan status dimiliki sendiri sebanyak 530.072 unit, sedangkan kebutuhan kekurangan bangunan permanen sebanyak 294.864 unit, dan bangunan non permanen sebanyak 20.377 unit. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Data Perumahan dan Permukiman
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2014

No.	Jenis Data	Satuan	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Perumahan				
	a. Status Kepemilikan Rumah: - Milik Sendiri	Unit	530.077	530.077	583.773
	b. Kekurangan Rumah: - Bangunan Permanen - Bangunan non permanen	Unit Unit	294.864 20.377	294.864 20.377	114.421 19.012
02	Tingkat kekumuhan dan keterisolasian, serta lahan kritis				
	a. Tingkat kekumuhan : - luas areal kekumuhan - jml penduduk yang tinggal di lokasi kumuh - jml KK yang tinggal di lokasi kumuh	Ha Jiwa KK	7 250 101	6 178	5 153 76
	b. Tingkat Keterisolasian: - Rataan luas lantai (m2/KK) - Luas area permukiman kumuh	M2/KK Ha	130 20.429	130 20.429	130 18.249
	c. Pemukiman lahan kritis: - Jml KK yang tinggal di lahan kritis	KK	97	89	76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten 2014

5). Penataan Ruang

Tujuan pembangunan yang hendak dicapai di Kabupaten Klaten adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif



dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya. Produktif mengandung pengertian bahwa proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Sedangkan berkelanjutan mengandung pengertian dimana kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pemanfaatan ruang terutama pemanfaatan lahan menjadi semakin berat karena akan semakin terbatasnya lahan Kabupaten Klaten.

6). Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui musyawarah pembangunan.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, masyarakat dipandang sebagai faktor strategis dan penentu, karena disadari posisinya bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Atas dasar pemikiran ini, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM diperlukan karena masyarakat akan dapat menjadi modal atau aset pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai peran besar untuk meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang, melalui rancangan dokumen perencanaan pembangunan yang baik dan implementatif.

7). Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota.

Upaya peningkatan prasarana perhubungan darat pada kawasan perbatasan telah lama dirintis yang dirasakan pada tercapainya keseimbangan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perbatasan.

Kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik sebagaimana pada Tabel 2.16



Tabel 2.16
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mobil Barang	9.091	9.644	10.241	10.794	10765
02. Mobil Bus					
* Umum	344	328	347	395	407
Bus Besar	281	255	113	49	49
Bus Sedang	49	56	105	90	93
Bus Kecil	14	17	129	256	265
* Bukan Umum	239	213	214	557	155
03. Kendaraan Khusus/Alat Berat	3	3	3	9	10
Jumlah	9.677	10.188	10.811	11.755	11.337

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

8). Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Lingkungan merupakan tempat bagi kelangsungan makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara, harus bersih atau berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Klaten di masa datang adalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah, sampah padat, limbah cair, dan polusi udara.

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Klaten mencapai 350 m³ per hari. Besarnya jumlah sampah yang dihasilkan, maka menjadikan pemikiran bersama untuk mengantisipasi sejak dini, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten di masa datang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun, karena itu pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari sumber dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu digalakkan. Pola pengelolaan sampah seperti ini akan berdampak positif, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi persampahan perlu untuk terus dilakukan dan dikembangkan, mengingat jumlah Industri Kecil/UKM di Kabupaten Klaten pada tahun 2014 sudah mencapai 34.155 UMKM, 131 unit usaha industri menengah/besar dan 207 pusat perdagangan/pasar dan jumlah sentra

Industri sebanyak 45 buah. Efek dari kegiatan industri di samping menghasilkan limbah cair juga menghasilkan limbah padat dan polusi udara. Limbah cair yang dihasilkan dari limbah industri perlu dipantau sebagai langkah pengendalian pencemaran, karena dengan bertambahnya kegiatan industri maka jumlah limbah yang dihasilkan berpotensi terhadap pencemaran lingkungan, terlebih sebagian besar industri yang berada di Kabupaten Klaten belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL).

Pencemaran udara di Kabupaten Klaten di sebabkan oleh aktifitas kegiatan industri dan transportasi. Pencemaran berupa emisi gas ke udara berupa CO, CO₂, SO₂, NO₂, debu dan partikel, serta kebisingan. Untuk membuat lingkungan yang nyaman melalui penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) perlu adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Proporsi ruang terbuka hijau tersebut mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi RTH Kabupaten Klaten saat ini masih jauh dari harapan karena hanya sekitar 6,7%. Melihat kondisi RTH tersebut, masih ada kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu untuk mencapai angka 30%. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan proporsi Ruang Terbuka Hijau Privat karena menyangkut kepentingan kepemilikan lahan.

9). Pertanian

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Penerbitan pada kurun waktu 2010-2014 bersifat fluaktif, dan sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2011-2015

No	Jenis Sertifikat Hak Atas tanah	2011	2012*	2013*	2014*	2015
1	Hak milik	11.084	510,826	620.378	631.768	580.537
2	Hak guna usaha	-	3	4	4	3
3	Hak guna bangunan	303	5.886	6.375	6.712	8.582
4	Hak pakai	58	3.632	3.932	3.956	3.736
5	Hak pengelolaan	-	2	6	6	5
6	Satuan Rusun	-	1.363	1.384	1.384	1.384
7	Hak Wakaf	70	888	1.003	1.079	1.554
Jumlah		11.515	522.600	633.082	644.909	594.801

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, 2015

*) akumulasi data sampai dengan tahun berkenaan



10). Kependudukan dan Catatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) pentahapan, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara khusus jumlah pelayanan akte dapat dilihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No	Jenis Akte	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kelahiran	8.985	8.168	17.741	16.127	10.540
2	Kematian	124	120	137		393
3	Perkawinan	535	488	462	474	469
4	Perceraian	25	68	55	54	63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten 2015

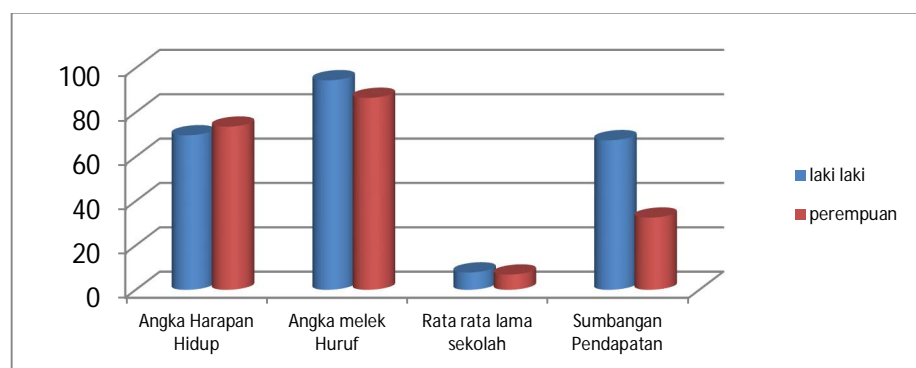
Selain itu untuk mewujudkan penerapan *single identity number* program e-KTP sejumlah penduduk wajib KTP sebanyak 1.091.458 jiwa, dan yang ber-KTP 865.451 orang.

11). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan capaian IPG dan IDG yang semakin baik.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) :

Kesenjangan pembangunan antara laki laki dan perempuan diukur dengan indikator pembentuk UHH, Rata rata lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan dalam pendapatan kerja



Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Gender





Gambar 2.16
Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain itu upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebagaimana Tabel 2.19

Tabel 2.19
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2014

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Trafiking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2014	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	36
2013	-	39	1	2	-	8	1	16	-	-	66
2012	0	47	0	2	0	1	0	17	0	0	67
2011	28	31	2	2	8	8	14	20	0	0	113

Sumber : P2TP2A Kabupaten Klaten

12). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, gambaran peserta KB dan KB Aktif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20 Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2011	203.914	28.661	164.544
2012	203.806	31.207	166.160
2013	204.998	25.905	168.751
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422

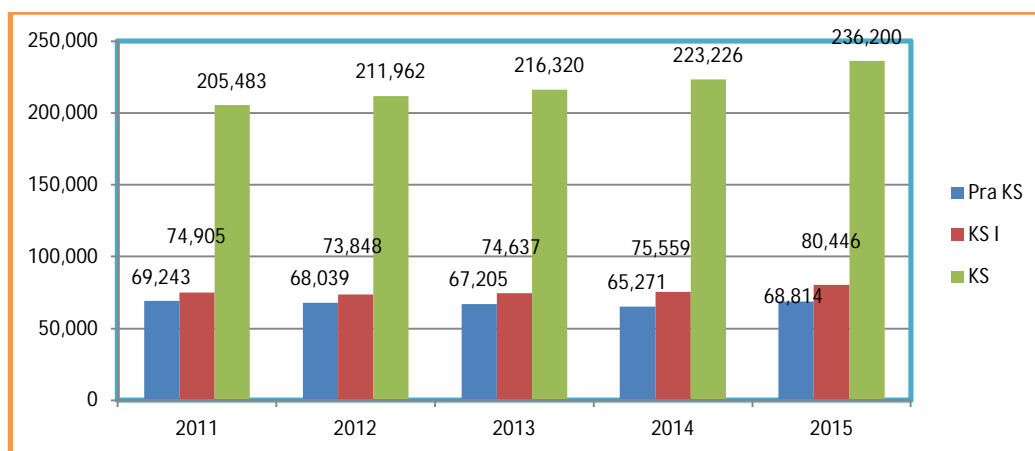
Sumber : Kantor PP dan KB Kab. Klaten 2015

b. Jumlah Keluarga Sejahtera

Sedangkan berdasarkan pentahapan Keluarga Sejahtera (KS), selama tahun 2011-2015 terjadi penurunan keluarga Pra Sejahtera dan peningkatan



dalam Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III dan KS Plus). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. 17.



Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Gambar 2.17
Perkembangan Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015 (dalam satuan Kepala Keluarga / KK)

13). Sosial

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal tersebut dilihat dari penurunan jumlah penyandang PMKS dari tahun ke tahun. Gambaran jumlah penderita cacat menurut Kecamatan dan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 2. 21.

Tabel 2.21
Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Cacat Mental eks psikotik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Prambanan	1	3	281	-	1	9
02. Gantiwarno	-	-	355	-	-	-
03. Wedi	20	107	322	76	268	35
04. Bayat	22	58	154	39	134	6
05. Cawas	24	24	62	42	59	21
06. Trucuk	14	14	241	12	12	15
07. Kalikotes	17	43	86	25	68	20
08. Kebonarum	1	9	35	2	22	39
09. Jogonalan	7	13	33	4	16	27
10. Manisrenggo	25	21	63	21	46	62
11. Karangnongko	39	4	37	5	-	10
12. Ngawen	-	24	74	28	7	35
13. Ceper	10	39	132	33	69	97
14. Pedan	10	37	58	11	34	35
15. Karangdowo	3	54	80	31	28	42
16. Juwiring	14	18	30	17	11	25
17. Wonosari	257	-	-	-	-	1
18. Delanggu	9	12	98	14	9	52
19. Polanharjo	5	35	109	26	35	17
20. Karanganom	16	46	74	22	35	57
21. Tulung	-	32	67	26	17	27
22. Jatinom	16	50	212	37	62	96
23. Kemalang	24	37	172	14	60	4
24. Klaten Selatan	-	15	16	12	2	24
25. Klaten Tengah	14	21	36	20	17	32
26. Klaten Utara	13	6	43	6	11	9
Jumlah 2015	561	722	2.870	523	1023	797



Kecamatan	Cacat Tubuh	Cacat Netra	Cacat Mental	Cacat Rungu dan Wicara	Cacat Ganda	Cacat Mental eks psikotik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	2.810	1.020	1.697	995	481	984
2013	2.436	850	1.049	714	383	811
2012	2.917	1.323	1.280	1.078	390	1.032
2011	2.308	1.097	1.032	664	220	836

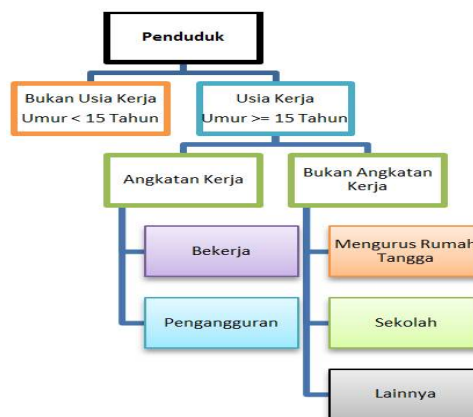
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Klaten

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal.

14). Ketenagakerjaan

Kualitas dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai korelasi positif yang cukup erat dengan suksesnya program-program pembangunan. Dalam hal ini gambaran profil SDM merupakan suatu informasi untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi pada tahap sebelumnya, dan merencanakan tahapan pembangunan berikutnya. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara teori, penduduk dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) penduduk usia kerja, dan (ii) penduduk bukan usia kerja, seperti pada Gambar 2. 17.



Gambar 2.17
Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Kerja,
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Gambaran indikator kependudukan dan ketenagakerjaan selama tahun 2011 - 2015, dapat dilihat seperti pada Tabel 2. 22.

Tabel 2.22
Beberapa Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2015

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	993.961	975.789	963.189	894.546	894.536
Kegiatan utama penduduk usia kerja (%)					
Bekerja	38,87	60,15	52,44	42,84	54,56
Mencari pekerjaan	33,8	12,98	15,11	26,03	18,77
Sekolah	11,44	12,79	14,19	14,25	16,34
Mengurus rumah tangga	24,64	22,48	26,91	26,42	9,08
Lainnya	1,25	1,6	1,35	1,46	1,25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,03	72,22	73,1	70,46	70,46
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,35	3,66	5,38	4,75	4,75
Lapangan Pekerjaan Penduduk Yang Bekerja					
Pertanian	16,89	17,26	16,79	16,68	7,43
Penggalian	1,32	1,3	1,31	1,38	-
Industri	21,16	20,72	20,35	20,75	0,15
Listrik, gas & Air Bersih	0,81	0,84	0,83	0,91	0,01
Konstruksi	7,37	7,29	8,09	7,37	0,05
Perdagangan	29,77	29,9	30,11	30,4	10,15
Angkutan	3,1	3,15	3,12	3,16	0,52
Lembaga Keuangan	4,08	4,1	4,08	4,27	0,00
Jasa dan Lainnya	15,5	15,44	15,32	15,08	81,69
Status pekerjaan penduduk yang bekerja					
Berusaha sendiri	24,97	22,39	21,29	23,29	55,57
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	13,15	17,03	19,2	19,2	13,73
Berusaha dibantu buruh tetap	3,42	4,25	2,5	2,5	24,54
Buruh/karyawan & pekerjaan bebas	48,08	44,14	45,82	42,82	6,05
Pekerja keluarga	10,38	12,19	11,19	12,19	0,10

*) data diolah berdasarkan Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2011-2015 selalu meningkat dengan ditunjukkan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Persentase UMK terhadap KHL dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Persentase UMK terhadap KHL di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Tahun	Rata-Rata UMK (Rupiah)	KHL (Rupiah)	Persentase UMK Terhadap KHL
2011	766.000	812.000	94,34
2012	812.000	862.623	94,13
2013	871.500	1.015.262	85,84
2014	1.170.000	1.169.976	100,00
2015	1.400.000	1.365.550	102,52

Sumber : Dinsoskertrans Kabupaten Klaten 2015

Tenaga kerja di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 sebagian besar bekerja di sektor primer (pertanian), namun mulai terjadi pergeseran ke sektor sekunder (perdagangan dan industri) serta sektor tersier (bidang jasa). Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dilihat pada Tabel 2.24



Tabel 2.24
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Klaten Tahun 2011- 2014

Tahun	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya
2011	3.097	16.796	5.186	7.661	4.470
2012	3.097	19.010	5.195	7.223	4.589
2013	3.097	26.800	9.721	1.085	6.794
2014	1.418	19.507	9.221	3.387	7.321

Sumber : Dinsoskertrans Kabupaten Klaten 2015

15). Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

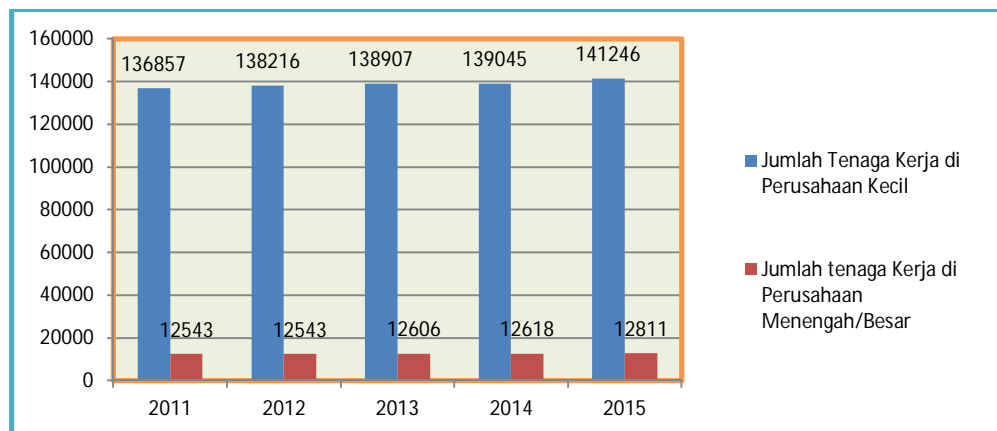
Usaha pengembangan Ekonomi Nasional di Kabupaten Klaten meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Data pengembangan usaha nasional di Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.25

Tabel 2.25
Pengembangan Usaha Nasional di Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2015

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Buah)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Koperasi	799	871	890	890	905
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Jumlah Pengusaha	Jumlah (Orang)				
	a).Pengusaha Kecil	34.063	34.077	34.251	34.155	34.666
	b).Pengusaha Menengah/Besar	126	126	130	131	134
4	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)				
	a).Usaha Kecil	136.857	138.216	138.907	139.045	141.246
	b).Usaha Menengah/Besar	12.543	12.543	12.606	12.618	12.811

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Penyerapan kerja yang terserap bersifat fluktuatif, terutama usaha kecil dari 136.857 orang pada tahun 2011 menjadi 141.246 pada tahun 2015. Gambaran trend jumlah tenaga kerja kecil dan menengah/besar dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Gambar 2.18
Trend Jumlah Kerja Kerja Kecil dan Menengah/Besar Tahun 2011 - 2015



16). Penanaman Modal

a. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi, Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan realisasi PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.26

Tabel 2.26
Perkembangan Realisasi PMDN
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	PMDN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Unit Usaha	33.937	33.951	34.121	34.155	34.666
2	Jumlah Tenaga Kerja	136.857	138.216	138.907	139.045	141.126
3	Nilai Investasi	963.015.000	980.329.361	985.231.008	986.211.337	991.211.017
4	Nilai Produksi	4.002.287.700	4.080.691.341	4.101.094.798	4.105.175.489	4.135.983.708

Sumber : Diperindagkop dan UMKM Kab. Klaten, 2015

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah dan target realisasi investor PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Perkembangan realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2. 27

Tabel 2.27
Perkembangan Realisasi PMA
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	PMA				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Unit Usaha	126	126	130	131	134
2	Jumlah Tenaga Kerja	12.543	12.543	12.606	12.618	12.811
3	Nilai Investasi	607.730.280	619.884.886	622.984.311	623.604.195	627.276.505
4	Nilai Produksi	2.766.140.844	2.849.125.069	2.863.370.694	2.866.219.819	2.891.861.945

Sumber : Diperindagkop dan UMKM Kab. Klaten, 2015

17). Kebudayaan

a. Penyelenggaraan seni dan budaya

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	52	52	52	52	52
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	12	12	12	12	12

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten 2015



b. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Dalam kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.29

Tabel 2.29

Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Candi Purbakala	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	4	4	4	4	4
3	Pemandang Alam	2	2	2	2	2
4	Museum	1	1	1	1	1
5	Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten 2015

18). Kepemudaan dan Olahraga

Pada kurun waktu tahun 2011-2015 perkembangan jumlah organisasi kepemudaan, maupun kegiatan keolahragaan relatif stabil, dan perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jml klub/cabang olahraga	21	21	21	34	34
2	Jml gedung Olahraga Tk. Kabupaten	2	2	26	26	26
3	Jml Organisasi Pemuda	26	26	26	26	26
4	Jml organisasi olahraga	8	8	8	8	8

Sumber : Disbudparpora Kab. Klaten 2015

Lembaga kepemudaan dan olah raga yang berkembang di Kabupaten Klaten antara lain: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Mahasiswa; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol)

Urusan Kesbangpol dilaksanakan untuk mendukung peningkatan stabilitas sosial politik melalui penciptaan kondusivitas daerah, peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara, peningkatan kesadaran politik dan demokratisasi, serta peningkatan kesadaran bela negara. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran KOMINDA, FKPD, FKUB, LSM, Tomas/Toga dan lembaga lainnya.



20). Penunjang Urusan Pemerintahan

Penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD pelaksanaannya telah memberi warna tentang Reformasi birokrasi secara signifikan dalam kehidupan berpolitik di Kabupaten Klaten. Begitu pula komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2014. Sebanyak 17 orang dari Fraksi PDIP, 8 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PAN, 7 orang dari Fraksi Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Fraksi PHN (Pembangunan Hati Nurani), 4 orang dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional).

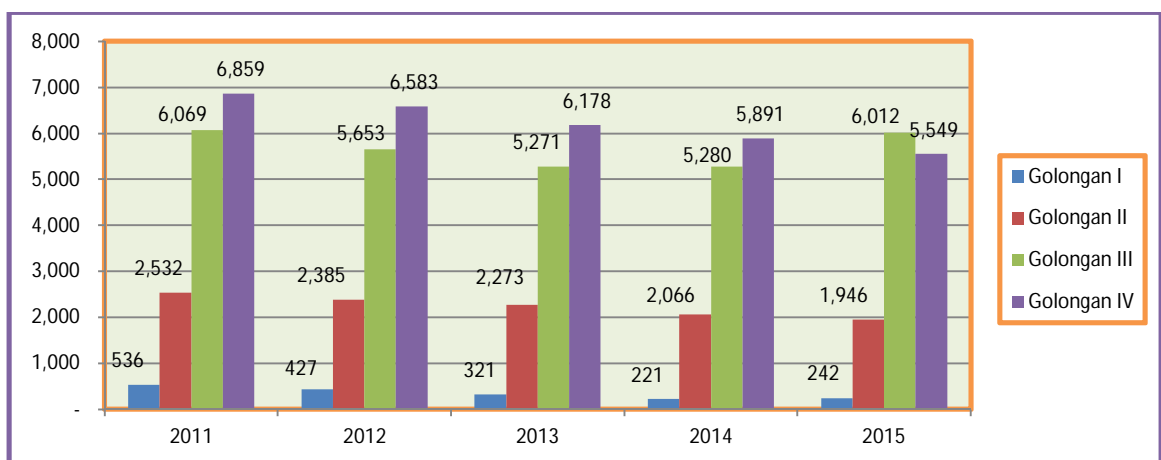
Dari sejumlah 50 orang anggota DPRD, terbagi ke dalam 4 komisi, yaitu: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 10 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 13 orang. Selama kurun waktu 2014, DPRD periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa produk hukum. Gambaran selengkapnya sebagaimana Tabel 2.31

Tabel 2.31
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Komisi	Fraksi				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Perda	17	12	22	12	13
02. Keputusan DPRD	40	32	47	38	32
03. Keputusan Pimpinan DPRD	26	22	18	23	22
04. Keputusan Panitia Anggaran	12	17	7	6	9
05. Keputusan Panitia Musyawarah	20	12	12	13	16
Jumlah	115	95	106	92	92

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2015

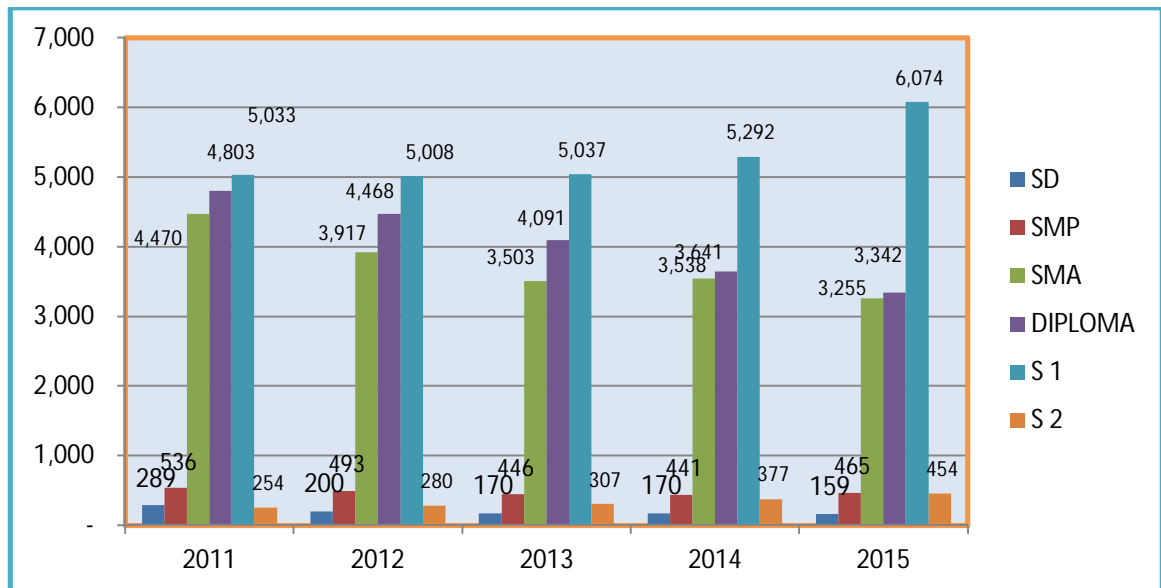
Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, pada tahun 2015 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 13.749 orang. Disamping itu untuk memberikan gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Gambar 2.19.



Sumber: BKD Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.19
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
Tahun 2011-2015





Sumber: BKD Kabupaten Klaten 2015

Gambar 2.20
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2011-2015

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah mengamanatkan bahwa pembentukan perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia harus dengan pertimbangan rasional, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun berikutnya telah mengesahkan dan sekaligus mengimplementasikan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui peraturan yang ditetapkan, terjadi pembengkakan jumlah jabatan struktural, yang berakibat juga pada struktur organisasinya. Jumlah Dinas bertambah dari 7 (2007) menjadi 10 (2010), kemudian Kantor berkurang dari 13 (2007) menjadi 6 (2010), jumlah Badan dari 4 (2007) menjadi 5 (2011) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas bertambah dari 75 (2007) menjadi sebanyak 87 (2010).

21). Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 dengan produksi padi sawah 359,735t ton per tahun, produksi jagung 87,422 ton, dan produksi kedelai sebanyak 3,485 ton. Selengkapnya dilihat dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015

No	Komoditas	Produksi	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Minus	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
		(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)		
1	Padi sawah	437,206	245,655	123,314	122,341	83.93	*)
2	Jagung	94,416	84,03	4,819	79,211	3.28	89,00%
3	Kedelai	5,658. 61	5,355	33,808	-28,453	23.01	94,66%
4	Kacang tanah	2,509.32	2,17	0,808	1,362	0.55	86,49%
5	Kacang Hijau	134,634	0,125	0,309	-0,184	0.21	93,00%
6	Ubi Kayu	20,404.08	19,561	12,562	6,999	8.55	95,87%
7	Ubi Jalar	369.15	0,325	2,821	-2,496	1.92	88,00%
8	Daging	1,099	1,088342	16,162	-15,073658	1.97	99,02%



No	Komoditas	Produksi	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Minus	Konsumsi per kapita (kg/kap/th)	Faktor Konversi (100-angka susut)
		(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Ton)		
9	Gula	5,0415450	4,789468	15,692	-10,902532	10.68	95,00%
10	telur	9,1671790	8,979252	5,877	3,102252	4.0	97,95%
11	Susu	3,1987650	2,696599	5,231	-2,534401	3.56	84,31%
12	Ikan	22,5508020	21,874278	13,664	8,210278	10.96	97,00%

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbesar adalah Kecamatan Cawas dengan 20 desa, 4 (empat) Kecamatan memiliki 19 desa yaitu : Kecamatan Wedi, Karangdowo, Juwiring dan Karanganom. Sementara Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan 3 desa. Jumlah Dukuh di seluruh Kabupaten Klaten sebanyak 3.703 dukuh. Untuk mendorong kemandirian desa, maka upaya yang dilakukan adalah dengan program pemberdayaan masyarakat sampai basis desa/kelurahan.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, disamping untuk mendorong kemandirian desa juga untuk menanggulangi kemiskinan secara absolut. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat disamping dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, juga dilakukan oleh Konsultan Mandiri Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Perdesaan tersebar di 11 Kecamatan untuk kegiatan infrastruktur, sedang untuk ekonomi produktif mencakup 25 Kecamatan. PNPM Mandiri perkotaan tersebar di 212 lokasi desa/kelurahan. Ke depan program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri sudah berakhir diganti dengan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (Program 100-0-100).

23). Statistik

Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan menjadi pilihan strategis. Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu : akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi (*interpretability*). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM.

Capaian kinerja yang telah dapat dihasilkan dalam bidang penelitian, pengembangan dan statistik selama ini antara lain berupa pembinaan terhadap



kegiatan penelitian di daerah melalui: Penjaringan Krenova, Sosialisasi Budaya Iptek dan Forum Komunikasi. Sedangkan di bidang statistik produk rutin tahunan yang telah dihasilkan antara lain Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Profil Kabupaten Klaten dan lain sebagainya.

24). Kearsipan

Arsip merupakan sumber data yang penting dan sangat dibutuhkan, juga merupakan salah satu aset pemerintah. Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan yang setiap kali digunakan dapat dengan cepat ditemukan kembali. Dengan demikian diperlukan penataan arsip yang sesuai dengan sistem penyimpanan arsip nasional. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.33

Tabel 2.33
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Arsip	24.215	25.671	65.526	71.161	68.700

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten 2015

Pelayanan arsip untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip.

25). Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Klaten telah memiliki website yaitu www.klatenkab.go.id, sementara untuk warung internet (warnet) sudah menyebar di 26 Kecamatan dan telah menjadi konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi. Penyiaran radio lokal terdapat 7 stasiun penyiaran dan terdapat 7 buah surat kabar lokal.

26). Perpustakaan

Pada tahun 2015 jumlah perpustakaan desa sebanyak 29 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 3 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.34

Tabel 2.34
Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koleksi perpustakaan	6.842	9.128	11.231	40.976	43.661
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	11.231	9.128	6.842	7.648	7.673

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten 2015



2.1.4.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah (ada 8 urusan pilihan), yaitu bidang urusan: (i) Pertanian, (ii) Kehutanan, (iii) Energi dan Sumber Daya Mineral, (iv) Pariwisata, (v) Kelautan dan Perikanan, (vi) Perdagangan, (vii) Perindustrian, dan (viii) Ketransmigrasian. Gambaran dari masing-masing penjelasan urusan pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertanian

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km², berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 33,398 Ha (51%) dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6,384 Ha (10%). Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 25,760 Ha (39%). Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19,897 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 9,771 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2,267 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,463 Ha.

2. Kehutanan

Hutan di Kabupaten Klaten terdapat 2 (dua) jenis hutan yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu Hutan Lindung seluas 810,6 Ha dan Hutan Produksi seluas 639,8 Ha. Hutan negara ini dikelola oleh Perum Perhutani, sedangkan hutan lainnya adalah Hutan Rakyat seluas 1.202 Ha.

Hutan di Kabupaten Klaten di antaranya:

- *Hutan Lindung*, terletak di bagian barat dan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Kemalang yang mencakup Desa Tegalmulyo dan Desa Sidoharjo, serta berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 700 – 1.200 m dpl.
- *Hutan Produksi*, terletak di 3 (tiga) wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Bayat, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Kalikotes. Hutan produksi ini terletak pada perbukitan Sekis – filit dan perbukitan kapur/batu gamping dengan ketinggian antara 300 – 500 m dpl.
- *Hutan Rakyat*, hutan rakyat ini merupakan program pemerintah melalui program penghijauan dan *rehabilitasi* lahan serta konservasi tanah. Hutan Rakyat ini tersebar di beberapa wilayah Kecamatan yang mempunyai lahan kering, diantaranya Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Prambanan, Bayat dan Wedi.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m ³)	Keterangan
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Puiti, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.424.933	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai konstruksi



No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m3)	Keterangan
				ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	100.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	280.803	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	277.060	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Jerukan, Desa Gampingan, Kecamatan Bayat	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunbakan kontruksi dan bahan uruk
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	6.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Semenden, Kecamatan Karangnongko	6.300	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Kwaran, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,	309.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	1.895.100	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan	103.500	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Desa Gunung Gajah, Kecamatan Bayat	85.950	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmer	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkaniki	Desa Balerante, Desa Sidorejo, Desa Taluh, Desa Panggang	3.133.849	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

4. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat dari produk wisata dan pasar wisata. Aspek produk wisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata, fasilitas pelayanan wisata serta aksesibilitas. Sedangkan pasar wisata adalah wisatawan lokal, regional maupun manca negara.

Produk pariwisata di Kabupaten Klaten antara lain mencakup:

a. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan, nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten sebagaimana pada Tabel 2. 36

Tabel 2.36
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2015

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kalikotes



No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
04.	Perayaan Yaqowiyyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas	Wisata Alam	Kec. Tulung
07.	Makam Pandanaran	Wisata Religius	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam RNg. Ronggowarsito	Wisata Religius	Kec. Trucuk
10.	Makam Perwita	Wisata Religius	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karangnom
12.	Candi Plaosan	Wisata Budaya	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Ageng Gribig	Wisata Religius	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah masih perlunya peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan.

b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel , Makam Ki Ageng Gribig, Makam RNg. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, Situs Wonoboyo.

c. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen **Juang** 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, dan Pesanggrahan Pakubuwu di Deles.

d. Jumlah Obyek Wisata Dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.37

Tabel 2.37
Jumlah obyek Wisata dan Pengunjung di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Obyek Wisata	Pengunjung (orang)
2011	82	347.565
2012	82	325.007
2013	82	256.200
2014	82	320.872
2015	123	332.239

Sumber: Kajian KKDA 2015

5. Kelautan dan Perikanan

Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan



kolam. Gambaran Produksi Ikan dan Jenisnya menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.38

Tabel 2.38
Produksi Ikan dan Jenisnya Menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (ton)

Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Prambanan	7.894,28	-	-	-	0,00	94,95	7.989,23
02 Gantiwarno	4.687,85	-	-	-	92,10	0,00	4.779,95
03 Wedi	5.120,40	-	-	-	42,56	0,00	5.162,96
04 Bayat	16.969,67	-	1.811,10	1.753,00	76,73	0,00	20.610,50
05 Cawas	613,86	-	-	-	138,75	0,00	752,61
06 Trucuk	1.292,30	-	-	-	117,94	0,00	1.410,24
07 Kalikotes	1.017,55	-	-	-	0,00	46,02	1.063,57
08 Kebonarum	11.816,21	-	-	-	0,00	47,51	11.863,72
09 Jogonalan	6.101,96	-	-	-	115,62	0,00	6.217,58
10 Manisrenggo	11.167,04	-	-	-	10,85	9,24	11.187,13
11 Karangnongko	5.131,13	8,40	-	-	75,12	132,29	5.346,94
12 Ngawen	1.570,79	-	-	-	0,00	106,36	1.677,15
13 Ceper	808,57	-	-	-	36,07	0,00	844,64
14 Pedan	620,65	-	-	-	13,52	0,00	634,17
15 Karangdowo	623,39	-	1,65	-	0,00	63,30	688,34
16 Juwiring	2.939,02	-	-	-	0,00	38,26	2.977,28
17 Wonosari	13.303,75	-	63,80	-	0,00	304,41	13.671,96
18 Delanggu	4.985,81	-	-	-	84,52	17,45	5.087,78
19 Polanharjo	65.984,39	35,00	-	-	0,00	35,10	66.054,49
20 Karanganom	3.687,97	4,25	-	-	0,00	18,42	3.710,64
21 Tulung	86.181,47	3,92	-	-	75,81	0,00	86.261,20
22 Jatinom	3.589,44	-	-	-	35,16	0,00	3.624,60
23 Kemalang	1.485,83	-	-	-	0,00	55,61	1.541,44
24 Klaten Selatan	8.735,13	-	-	-	0,00	559,72	9.294,85
25 Klaten Tengah	1.637,29	-	-	-	288,95	48,36	1.974,60
26 Klaten Utara	3.566,77	-	-	-	331,30	0,00	3.898,07
Jumlah 2015	271.532,52	51,57	1.876,55	1.753,00	1.535,00	1.577,00	278.325,64
2014	254.559,82	0	1.685,56	1.775	1.030,00	247,00	259.297,38
2013	191.942,18	20	631,81	863	1.654,00	481,00	195.573,99
2012	136.317	-	2.921,00	1.039	1.422,00	477,00	142,18

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya yang peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasar merupakan sektor utama untuk menggerakkan perekonomian, dan selama 3 (tiga) tahun jumlah pasar tidak ada perubahan. Gambaran pasar menurut jenisnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.39

Tabel 2.39
Pasar Menurut Jenisnya Di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Departemen Store	1	1	1	1	1
02. Pasar Swalayan	78	108	108	118	118
03. Pasar Umum	81	81	81	81	81
04. Pasar Hewan	12	12	12	9	9
05. Pasar Buah	1	1	1	1	1
06. Pasar Sepeda	2	2	2	2	2
07. Pasar Ikan	0	0	0	0	0

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
08. Lain-Lain / Pasar Burung	4	4	4	4	4
09. Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	180	210	210	217	217

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

7. Perindustrian

Sektor industri merupakan penopang perekonomian suatu daerah yang mampu menyerap tenaga kerja. Sektor industri perlu didorong agar berkembang pesat baik dari sisi produksi maupun daya serap tenaga kerja, sehingga berdampak positif (*multiplier effect*) tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dalam komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten, yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB ADHK sebesar 6,72% (atau Rp.1.044.664,44 ribu) pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,76% (Rp.1.387.660,63 ribu).

Basis ekonomi untuk *sektor industri manufaktur* berdasarkan sebaran di tingkat Kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan.

Perusahaan industri besar dan sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2015 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan *furniture*, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2011-2015 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, industri lainnya cenderung mengalami penurunan. *Industri logam dan besi* banyak terdapat di Kecamatan Ceper dan Kecamatan Wonosari. *Industri kertas dan percetakan* terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. *Industri kayu dan furniture* terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring dan Klaten Utara.

Kawasan potensial sentra industri logam terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karangnom, Delanggu, dan Wonosari. *Sentra industri tembakau* terdapat di Kecamatan Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, dan Ceper. *Sentra industri gerabah* terdapat di Kecamatan Wedi, dan Bayat. *Sentra industri mebel* terdapat di Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, dan Ceper. Adapun *sentra industri konveksi* terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen dan Pedan.



8. Ketransmigrasian

Kepadatan penduduk yang semakin besar serta daya dukung dari sektor ekonomi tidak memungkinkan untuk tetap meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang merantau, pilihan lain bertransmigrasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 4 (empat) pulau yang menjadi tujuan transmigrasi yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Provinsi Maluku.

Jumlah transmigrasi tahun 2011 di Pulau Kalimantan sebanyak 10 KK (34 jiwa), tahun 2012 sebanyak 15 KK (41 jiwa), tahun 2013 telah diberangkatkan sebanyak 10 KK (39 jiwa), tahun 2014 sebanyak 4 KK (15 jiwa), dan pada tahun 2015 sebanyak 30 KK (60 jiwa).

2.1.5. Aspek Potensi Daerah

2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.40

Tabel 2.40
Persentase Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2011–2015 (dalam persen)

<i>Golongan Pengeluaran</i>	2011	2012	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
< 40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000 – 59.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000 – 79.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.000 – 99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000 – 149.999	0,64	1,31	1,09	1,02	0,71
150.000 – 199.999	5,01	5,19	5,25	5,11	3,17
200.000 – 299.999	24,56	26,41	25,66	23,07	12,07
> 300.000	69,79	67,09	68,00	70,80	84,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk menurut golongan pengeluaran, pada tahun 2015 terdapat peningkatan untuk golongan > Rp.300.000,- sedangkan untuk golongan lainnya mengalami penurunan. Meskipun uang yang dibelanjakan tidak dapat untuk mengkonsumsi banyak pilihan, sedangkan pendapatan tidak ada perubahan/penambahan, maka ada kecenderungan untuk tidak membeli barang yang sifatnya tidak mendesak karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Pergeseran ke kelompok pengeluaran yang lebih tinggi karena adanya peningkatan harga-harga kebutuhan yang harus dicukupi.

Tabel di bawah ini menunjukkan sebagian besar pengeluaran penduduk adalah untuk makanan dibanding untuk non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan makan sebagai kebutuhan primer



merupakan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan non makan yang sifatnya sekunder. Pemenuhan kebutuhan makanan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 55,14% , dan pada tahun 2015 menjadi 48,07%, sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2011 sebesar 44,86%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 51,93%. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Rata - rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2011- 2015

Rata - rata Pengeluaran Penduduk	2011	2012	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan	55,14	51,30	51,23	51,21	48,07
2. Non Makanan	44,86	48,70	48,77	48,79	51,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten 2015

2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Klaten direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi daerah. Sarana prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen keberlangsungan penyangga wilayah, karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kabupaten Klaten, sebagai-berikut:

1. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam satuan Ha)

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.243	13	1.187	2.443
02 Gantiwarno	1.625	155	784	2.564
03 Wedi	1.554	18	866	2.438
04 Bayat	815	785	2.343	3.943
05 Cawas	2.317	46	1.084	3.447
06 Trucuk	1.909	2	1.470	3.381
07 Kalikotes	750	8	540	1.298
08 Kebonarum	720	2	245	967
09 Jogonalan	1.574	1	1.095	2.670
10 Manisrenggo	1.509	139	1.048	2.696
11 Karangnongko	764	851	1.059	2.674
12 Ngawen	1.042	8	647	1.697
13 Ceper	1.538	7	900	2.445
14 Pedan	872	445	600	1.917
15 Karangdowo	2.048	69	806	2.923
16 Juwiring	2.001	12	966	2.979
17 Wonosari	2.219	14	881	3.114
18 Delanggu	1.303	1	574	1.878
19 Polanharjo	1.822	92	470	2.384
20 Karanganom	1.682	11	713	2.406



Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Luas Wilayah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21 Tulung	1.738	467	995	3.200
22 Jatinom	604	1.543	1.406	3.553
23 Kemalang	54	1.848	3.264	5.166
24 Klaten Selatan	809	3	631	1.443
25 Klaten Tengah	294	1	597	892
26 Klaten Utara	308	40	673	1.041
Jumlah 2015	33.111	6.581	25.684	65.556
2014	33.220	6.581	25.755	65.556
2013	33.220	6.581	25.755	65.556
2012	33.314	6.386	25.856	65.556
2011	33.374	6.383	25.798	65.556

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten

2. Pasar

Pasar merupakan pendukung keberhasilan daerah dalam memasarkan produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya, dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan. Gambaran Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang sebagaimana Tabel 2.43

Tabel 2.43
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Prambanan	3	1	-	589	92	1312
02 Gantiwarno	2	1	-	69	12	230
03 Wedi	3	2	-	36	3	-
04 Bayat	3	2	-	285	17	1172
05 Cawas	2	6	-	117	14	153
06 Trucuk	2	3	-	24	10	73
07 Kalikotes	1	2	-	95	15	503
08 Kebonarum	1	-	1	60	11	244
09 Jogonalan	2	2	-	74	5	263
10 Manisrenggo	2	-	-	8	8	36
11 Karangnongko	1	-	-	27	83	1097
12 Ngawen	1	2	-	42	9	212
13 Ceper	-	2	1	71	28	476
14 Pedan	1	2	-	153	19	897
15 Karangdowo	1	2	-	68	2	372
16 Juwiring	3	1	-	169	84	617
17 Wonosari	1	1	-	193	39	769
18 Delanggu	1	-	-	74	37	269
19 Polanharjo	-	1	-	81	66	634
20 Karanganom	3	1	-	234	49	1340
21 Tulung	1	5	-	287	80	1168
22 Jatinom	2	3	-	89	16	250
23 Kemalang	2	1	-	49	30	320
24 Klaten Selatan	1	-	-	64	52	501
25 Klaten Tengah	7	-	-	18	4	4
26 Klaten Utara	4	1	-	17	6	41
Jumlah 2015	50	41	2	2.993	791	12.953
2014	49	48	2	3.655	1.823	11.189
2013	48	39	-	2.884	790	13.749
2012	48	54	1	2.595	862	13.415
2011	47	39	1	3.553	867	12.889

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015



3. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jaringan listrik di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2015 KWH terjual sudah mencapai 600.177.101 Kwh, dan 2.209.751 Kvah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.44

Tabel 2.44
KWH Terjual PLN Menurut Bulan Kabupaten Klaten Tahun 2015

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2015	159.682.405	710.528	132.982.842	195.264	234.886.147	1.160.923	72.625.707	143.036
2014	154.481.066	479.800	130.131.858	135.712	222.424.785	1.420.765	68.882.418	214.629
2013	145.477.079	592.698	120.070.726	49.141	205.095.237	631.249	62.244.093	82.001
2012	135.474.329	483.506	118.246.829	54.937	185.073.854	120.729	58.323.388	11.982
2011	124.677.127	448.968	110.498.196	55.651	169.563.614	144.562	53.866.330	1.179

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

4. Jaringan Air Bersih

Produksi air bersih di Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Jumlah produksi air bersih tahun 2011 sebesar 9.872.088 m³, dan pada tahun 2015 sudah mencapai 11.678.870 m³. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.45

Tabel 2.45
Kapasitas dan Produksi Air Minum Yang Terjual dari PDAM di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Tahun	Jumlah Sumber	Jumlah Pelanggan	Kapasitas Produksi	Air yang Didistribusikan	Air yang Terjual	Air yang Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	16	37.941	11.678.870	10.983.558	8.473.591	2.509.967
2014	16	37.071	11.711.094	11.257.296	7.909.837	3.347.154
2013	16	34.933	10.366.903	10.216.812	7.486.919	2.729.893
2012	16	32.449	10.066.160	9.914.382	7.214.415	2.699.967
2011	16	30.814	9.872.088	9.687.483	6.969.519	2.717.964

Sumber: PDAM Kabupaten Klaten

Dilihat dari jumlah sumber air yang ada, baik yang berasal dari sumber mata air dan dari waduk atau rawa-rawa, ada 4 (empat) Kecamatan yang mempunyai sumber air dari mata air terbanyak, yaitu: (i) Kecamatan Manisrenggo sebanyak 24 sumber mata air, (ii) Kecamatan Tulung sebanyak 24 sumber mata air, (iii) Kecamatan Karangnongko sebanyak 17 sumber mata air, dan (iv) Kecamatan Ngawen sebanyak 16 sumber mata air. Sementara hanya ada 1 (satu) Kecamatan yang mempunyai sumber air dari waduk, yaitu Kecamatan Bayat.

5. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sepanjang 777 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Berdasarkan kondisi jalan yang ada, tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Klaten pada tahun 2015. Perincian selengkapnya dapat dilihat pada sebagaimana Tabel 2.46.



Tabel 2.46
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (Km)

Keadaan	Status Jalan									
	Jalan Negara			Jalan Provinsi			Jalan Kabupaten			
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
(1)	(2)			(3)			(4)			
I	Jenis Permukaan									
	a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	754	754	753,94
	b. Berbatu/Macadam	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	3,16
	c. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	-	-	-	-	21,37	21,37	12,53
	Jumlah - I	33,52	33,52	33,52	41.360	41.360	41.360	777	777	769,63
II	Kondisi Jalan									
	a. Baik	3,9	3,9	3,9	25,76	25,76	25,76	344,42	550,57	381,08
	b. Sedang	29,62	29,62	29,62	15,61	15,61	15,61	213,52	86,63	206,61
	c. Rusak	-	-	-	-	-	-	86,63		68
	d. Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	132,44	132,44	113,94
	Jumlah - II	33,52	33,52	33,52	41,37	41,37	41,37	777	769,64	769,63
III	Kelas Jalan									
	a. Kelas I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kelas III	-	-	-	41.360	41.360	41.360	-	-	-
	d. Kelas IIIA	33,52	33,52	33,52	-	-	-	-	-	-
	e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	777	777	769,63
	g. Kelas IV	-	-	-	-	-	-	754	754	
	h. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	1,63	1,63	
	Jumlah - III	33,52	33,52	33,52	41,36	41,36	41,36	777	777	769,63

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan seperti terlihat pada Tabel 2.50. Dari tabel tersebut dapat dilihat Kecamatan-Kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8.100 km; (ii) Kecamatan Pedan 6.100 km; (iii) Kecamatan Tulung 6.000 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5.000 km.

Jenis/kategori jalan Kabupaten yang tersebar di seluruh Kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 47.540 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42.880 km; (iii) Kecamatan Prambanan 39.140 km; dan (iv) Kecamatan Karangnongko 38.320 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.47.



Tabel 2.47
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten Tahun 2015 (dalam km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
02.	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
03.	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
04.	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
05.	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
06.	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
07.	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
08.	Kebonharum	-	20,440	42,825	10,725
09.	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10.	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11.	Karangnongko	-	38,320	74,540	37,735
12.	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13.	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14.	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15.	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16.	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17.	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18.	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19.	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20.	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21.	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22.	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23.	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24.	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25.	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26.	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	776,960	2.171,006	1.494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

6. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen, walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik.

Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT Ekapari
2. CV. Dewa Nusantara Tour
3. CV. Pulo Mas Tour
4. PT. Danita Tour Service
5. Adi Tour
6. Giri Sampurna Putra Tour
7. H and R Tour
8. Multi Pratama
9. Sembilan Buana Tour
10. Persada Indah Tour
11. Sargedde Tour and Travel
12. Pradana Tour
13. Selendang Sutera
14. Bintang Timur
15. Galihayu Tour and Travel
16. Astuti Pinastika Tour



17. Graphindo Tour Travel

18. Kharisma Tour

2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal atau investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*) melalui peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Klaten.

Peningkatan peluang investasi dilaksanakan dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan keamanan dan ketertiban kota, pengembangan penanaman modal dan investasi daerah, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, mendorong tumbuhnya industri kreatif. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas merupakan daya tarik investasi, hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) diperlukan untuk menjawab tantangan terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, tingginya kedua variable tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Gambaran jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi berdasarkan kelompok industri di Kabupaten Klaten tahun 2015, tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.48
Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2015

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (JutaanRp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
I	INDUSTRI BESAR / MENENGAH				
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	88	7.713	377.137.964	1.738.536.117
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	46	5.098	250.138.541	1.153.325.828
Sub Jumlah					
	2015	131	134	12.811	627.276.505
	2014	130	131	12.618	623.604.195
	2013	130	12.606	622.984.310	2.863.370.694
	2012	126	12.543	619.884.886	2.849.125.069
	2011	126	12.543	607.730.280	2.766.140.844
II	INDUSTRI KECIL				
01	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	17.595	71.614	545.651.322	2.275.800.560
02	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	17.071	69.512	445.559.695	1.860.183.148
Sub Jumlah					
	2015	34.155	34.666	141.126	991.211.017
	2014	34.121	34.155	139.045	986.211.337
	2013	33.951	34.121	138.907	985.231.008
	2012	33.937	33.951	138.216	980.329.361
	2011	32.798	33.937	136.857	963.015.000

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten



2.1.5.4. Fokus Kualitas Sumber Daya Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) merumuskan Pembangunan Manusia sebagai upaya memperluas peluang dan pilihan maupun taraf yang telah dan akan dicapai sehingga upaya tersebut dapat diketahui secara transparan. Konsep Pembangunan Manusia menuntut terjadinya formasi (*formation*) atas kemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli sehingga penduduk memperoleh/menemukan manfaatnya terutama dalam hal produktivitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dan ini berarti menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Klaten menurut standar UNDP sudah berada pada tingkat “menengah atas” dimana IPM Kabupaten Klaten sudah mencapai 74,91 pada tahun 2013.

Di Kawasan Subosukawonosraten, posisi IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2010 menempati urutan ke-3 (atau urutan 11 tingkat Provinsi Jawa Tengah) setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49

Tabel 2.49
Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2013

Kabupaten	AHH	AMH	MYS	PengeluaranPerkapita (Rp)	IPM	Peringkat
Klaten	72,16	90,01	8,33	652.610	74,91	11
Boyolali	70,71	88,12	7,46	637.530	71,88	32
Sukoharjo	70,64	91,36	8,82	654.950	74,91	10
Wonogiri	72,82	84,60	6,71	655.310	73,09	23
Sragen	73,05	84,49	7,34	637.910	72,31	25
Karanganyar	72,56	90,32	8,27	654.010	75,27	7
Surakarta	72,75	96,87	10,53	661.880	79,10	1

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

AMH : Angka Melek Huruf

MYS : *Mean Years of Schooling* (Rata - rata Lama Sekolah)

Sumber: IPM Kabupaten Klaten 2013

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Tahun 2011 jumlah pencari kerja wanita sebanyak 5.150 orang, pada Tahun 2015 menjadi 4.287 pencari kerja. Jumlah pencari kerja laki-laki Tahun 2011 sebanyak 5.150 orang, tahun 2015 menjadi 4.596 orang. Jumlah pencari kerja, baik laki-laki maupun perempuan dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dan gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50



Tabel 2.50
Banyaknya Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2011-2015

Tahun	SD		SMP		SMA/SMK		Sarjana Muda		Sarjana		Jumlah	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	12	36	304	425	3.728	2.848	220	491	332	487	4.596	4.287
2014	9	21	268	384	3.265	2.340	176	514	529	1.086	4.237	4.345
2013	9	35	402	701	4.593	3.886	483	970	1.550	2.457	7.037	8.049
2012	8	24	255	362	2.475	1.922	134	333	279	346	3.148	2.987
2011	18	24	234	631	3.830	3.716	194	365	288	414	4.564	5.150

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka 2015

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2015 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN KLATEN 2010-2015

2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada tahun 2015 berdasarkan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 2.51

Tabel 2.51
Realisasi Jumlah Gaji & Tunjangan dan Pelaksanaan Program Kegiatan
Dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2015

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Langsung					Jumlah Belanja Tidak Langsung
		Prog.	Keg.	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Pendidikan	11	200	55.421.655.000	41.198.315.162	74,34	611.733.629.811
	TK Negeri	2	7	10.000.000	9.962.400	99,62	
	SD Negeri	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri	1	130	3.730.610.000	3.531.725.424	94,67	
	SMA Negeri	32	109	350.000.000	345.935.515	98,84	
	SMK Negeri	2	77	660.000.000	644.613.998	97,67	
	SKB	6	18	310.066.000	300.681.061	96,97	
	UPTD Pendidikan	2	78	7.089.750.000	7.037.497.800	99,26	
2	Dinas Kesehatan	14	74	37.534.642.500	35.673.060.847	95,04	69.973.282.444
	Puskesmas	1	1	54.400.393.460	10.403.604.048	19,12	
	RSUD	2	4	44.371.000.000	33.286.761.437	75,02	
3	Dinas Pekerjaan Umum	24	204	264.367.766.000	230.290.385.289	87,11	18.860.329.485
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	58	6.990.959.000	6.397.420.539	91,51	3.031.056.445
5	Dinas Perhubungan	8	66	6.413.045.000	6.165.088.057	96,13	5.062.819.039
6	Badan Lingkungan Hidup	6	52	10.222.899.500	8.450.849.516	82,67	1.639.609.308
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	29	2.930.573.000	2.126.641.527	72,57	2.934.251.292
8	Kantor Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	13	57	3.453.991.000	3.284.662.096	95,10	6.444.517.277
9	Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi	12	73	3.469.062.000	2.677.412.412	77,18	4.794.059.095
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	12	62	17.357.862.000	15.184.310.845	87,48	11.110.732.450
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8	48	5.577.382.000	5.436.711.917	97,48	3.141.467.382
12	Satuan Polisi Pamong Praja	8	31	3.521.654.000	3.358.293.667	95,36	3.260.044.913
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	52	5.970.054.000	4.457.328.750	74,66	2.188.874.892
14	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	-	-	-	9.685.461.374
15	Sekretariat Daerah :						
	Bagian Tata Pemerintahan	7	33	1.840.178.000	1.287.747.775	69,98	1.178.104.969
	Bagian Pembangunan	4	16	926.240.000	754.884.540	81,50	899.177.956
	Bagian Hukum	4	15	1.997.467.000	1.702.995.147	85,26	927.046.186
	Bagian Perekonomian	7	14	697.935.000	618.070.650	88,56	762.267.540



No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Belanja Langsung					Jumlah Belanja Tidak Langsung
		Prog.	Keg.	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bagian Humas	6	32	3.044.556.500	2.752.999.270	90,42	996.469.108
	Bagian Organisasi	5	19	651.000.000	447.575.686	68,75	1.470.207.008
	Bagian Kesra	3	17	5.695.928.000	2.930.483.614	51,45	2.953.258.180
	Bagian Umum	6	45	13.651.920.000	12.164.392.269	89,10	4.219.986.642
16	Kesbangpolinmas	9	33	1.406.955.000	1.269.644.669	90,24	1.094.737.139
17	Bupati dan Wakil Bupati						155.784.904
18	Sekretariat DPRD	4	35	17.300.000.000	9.676.329.470	55,93	2.810.867.349
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	80	20.385.599.000	17.646.180.510	86,56	7.404.322.594
20	Kantor Pelayanan Terpadu	5	23	929.413.000	791.453.090	85,16	1.327.056.493
21	Inspektorat Kab. Klaten	5	30	3.539.387.000	2.881.105.465	81,40	3.252.743.922
22	Badan Kepegawaian Daerah	4	44	5.985.082.000	5.207.439.927	87,01	2.638.871.826
23	Kecamatan Klaten Utara	10	42	617.316.000	603.545.515	97,77	1.463.210.297
24	Kecamatan Klaten Tengah	10	36	460.516.000	446.962.148	97,06	1.073.815.233
25	Kecamatan Klaten Selatan	10	36	451.927.000	442.829.257	97,99	1.105.990.600
26	Kecamatan Kebonarum	10	39	471.890.000	464.480.549	98,43	1.153.858.606
27	Kecamatan Wedi	10	37	550.616.000	527.438.912	95,79	1.635.222.822
28	Kecamatan Jogonalan	10	39	756.916.000	705.627.843	93,22	1.431.930.488
29	Kecamatan Gantiwarno	10	39	503.927.000	446.169.253	88,54	1.605.071.674
30	Kecamatan Prambanan	10	35	588.982.000	574.471.665	97,54	1.521.567.247
31	Kecamatan Manisrenggo	10	40	641.036.000	575.712.876	89,81	1.399.025.758
32	Kecamatan Kemalang	10	41	724.616.000	697.778.082	96,30	1.400.887.034
33	Kecamatan Karangnongko	10	39	493.416.000	457.364.220	92,69	1.396.561.962
34	Kecamatan Jatinom	10	37	817.716.000	784.691.505	95,96	1.456.868.405
35	Kecamatan Karangnom	10	37	515.316.000	472.488.485	91,69	1.237.363.336
36	Kecamatan Tulung	10	37	559.416.000	436.951.519	78,11	1.601.546.254
37	Kecamatan Polanharjo	10	36	581.016.000	574.157.899	98,82	1.641.864.537
38	Kecamatan Delanggu	10	37	646.516.000	592.208.402	91,60	1.514.475.466
39	Kecamatan Juwiring	10	39	506.716.000	484.722.273	95,66	1.684.147.467
40	Kecamatan Wonosari	10	37	631.504.000	614.438.693	97,30	1.986.218.869
41	Kecamatan Ceper	10	39	598.728.000	542.210.986	90,56	1.500.311.855
42	Kecamatan Pedan	10	39	639.516.000	621.727.726	97,22	1.440.319.076
43	Kecamatan Karangdowo	10	37	541.129.000	518.394.750	95,80	1.570.248.589
44	Kecamatan Cawas	10	41	739.616.000	671.198.113	90,75	1.496.229.053
45	Kecamatan Trucuk	10	40	520.916.000	428.051.323	82,17	1.670.941.161
46	Kecamatan Bayat	10	37	665.527.000	617.679.665	92,81	1.375.290.737
47	Kecamatan Ngawen	10	41	575.116.000	567.120.332	98,61	1.514.668.383
48	Kecamatan Kalikotes	10	38	476.116.000	377.779.328	79,35	1.218.992.239
49	Kelurahan Tonggolan	11	29	299.971.520	291.327.510	97,12	455.354.892
50	Kelurahan Kabupaten	11	29	296.567.000	290.307.074	97,89	339.989.392
51	Kelurahan Klaten	11	32	409.217.000	398.149.140	97,30	478.734.985
52	Kelurahan Mojayan	9	27	282.712.000	261.845.987	92,62	253.671.144
53	Kelurahan Buntalan	12	34	530.404.500	508.567.360	95,88	290.086.575
54	Kelurahan Bareng	9	30	373.648.000	362.032.617	96,89	428.217.911
55	Kelurahan Bareng Lor	12	35	446.167.000	441.804.999	99,02	249.180.490
56	Kelurahan Gergunung	11	32	577.067.000	565.641.749	98,02	339.737.550
57	Kelurahan Gayamprit	10	30	504.692.000	486.880.502	96,47	420.511.062
58	Kelurahan Jatinom	12	30	474.092.000	433.180.444	91,37	259.605.470
59	Kantor Ketahanan Pangan	4	29	1.698.057.000	1.138.656.022	67,06	1.393.479.074
60	Badan Pemberdayaan Masyarakat	6	50	5.485.627.000	4.082.037.224	74,41	2.095.952.876
61	Kantor Arsip dan Perpustakaan	6	27	1.301.300.000	1.205.024.783	92,60	1.314.572.307
62	Dinas Pertanian	16	75	36.863.015.000	33.673.330.634	91,35	17.543.973.735
Jumlah 2015		647	3313	677.023.583.980	538.777.551.753	79,58	849.910.731.634
2014		611	3022	550.396.714.480	484.601.546.494	88,05	810.292.904.687

Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten

*) Unaudited

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2015 sebanyak Rp.849.910.731.634,- sedangkan jumlah belanja langsung sebesar Rp.677.023.483.980,00 dan terealisasi sebanyak



Rp.538.777.551.753,00 (79,58%) dengan sejumlah 647 program, dan terinci menjadi 3.313 kegiatan.

2.5.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015

Adapun capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan, serta pengembangan budaya prestasi. Sasaran strategis dan target capaian kinerja berdasarkan penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada tahun 2015 adalah sebagaimana Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Target dan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Urusan Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		1.1.	Angka melek huruf	99,01%	100	99,78	100	100	●
		1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,2	11	8,96	81	11	▲
		1.3.	Angka partisipasi kasar	92,56%	98,25	85,27	87	98,25	▲
		1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	7,35	7,37	7,3	99	7,37	●
		1.5.	Angka Partisipasi Murni						
		1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	105,31%	100	81,60	82	100	▲
		1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	68,68%	97,42%	63,94	66%	97,42%	▲
		1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	55,58%	78,84%	60,46	77%	78,84%	▲
		1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	109,74%	100%	90,92	91%	100%	▲
		1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1 : 258	0,33	0,76	228%	0,33	●
		1.1.3.	Rasio guru/murid	1:12	1:32	1:15	82%	1:32	▲
		1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:36	1:40	1:35	95%	1:40	▲
		1.2.	Pendidikan menengah:						
		1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	78,52%	100%	62,30%	62%	100%	▲
		1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 610	0,55	0,23	42%	0,55	▲
		1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	1:11	1:35	1:10	74%	1:35	▲
		1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1:31	1:35	1:32	97%	1:35	▲
		1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,27%	100%	99,78	100%	100%	●
		1.3.	Fasilitas Pendidikan:						
		1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	89%	99%	67,1	67,78%	99%	▲
		1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	93%	99%	89,47	90%	99%	▲
		1.4.	Pendidikan Anak						



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			Usia Dini (PAUD):						
		1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	103,76%	100%	92,19	92%	100%	▲
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.5.	Angka Putus Sekolah:						
		1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05%	0%	0,02		0%	▲
		1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,11%	0%	0,10		0%	▲
		1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,96%	0%	0,73		0%	▲
		1.6	Angka Kelulusan :						
		1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100%	97,78	98%	100%	▲
		1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100%	95,55	96%	100%	▲
		1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	94,54%	100%	102,21	102%	100%	●
		1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	106,57%	100%	100,37	100%	100%	●
		1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81,57%	89,19%	96,64%	108%	89,19%	●
3	Terwujudnya peningkatan mutu SDM tenaga kependidikan	1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50,93%	80%	86,42%	108%	80%	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel tersebut di atas, aspek pelayanan umum bidang pendidikan pada indikator capaian kinerja yang melampaui target diantaranya: Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, dan Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (100%) akan tetapi untuk indikator-indikator : pendidikan dasar, dan menengah tidak tercapai. Penyebab ketidak berhasilan ini disebabkan adanya base data kependudukan yang mengalami perubahan sebagai akibat penataan administrasi kependudukan, semula target ditetapkan dengan base data lama, tetapi ketika diukur dengan menggunakan base data lain, mengakibatkan capaiannya rendah.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kesehatan lingkungan dan permukiman, penanganan penyakit menular, dan upaya penanggulangan kemiskinan melalui bidang kesehatan. Adapun sasaran dan target capaian kinerja berdasarkan penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.53

Tabel 2.53
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD Urusan Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	984,67	984,69	987	100,23	984,69	●
		2.2.	Angka usia harapan hidup	71,64	72,81	71,81	98,63	72,81	▲
		2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,03%	0,01	0,02	200,00	0,01%	●
		Aspek Pelayanan Umum							
		2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	2	2	2,50	125,00	2	●
		2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per	0,291	0,287	0,147	51,22	0,287	▲



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
			satuan penduduk						
		2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0612	0,0604	0,0000	0,00	0,0604	▲
		2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,187	0,185	0,313	169,19	0,185	●
		2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,179	1,164	0,496	42,61	1,164	●
		2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100	107,17	107,17	100%	●
		2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93%	100	99,98	99,98	100%	▲
		2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,25%	100	100	100,00	100%	●
		2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100,00	100%	●
		2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	31,27%	50	29,00	58,00	50%	▲
		2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100	100	100,00	100%	●
2	Terwujudnya Pemenuhan Kesehatan bagi Masyarakat terutama masyarakat miskin	2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	91,40%	94,50	100	105,82	94,50%	▲
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.13.	Cakupan kunjungan bayi	99,67%	100	95,72	95,72	100%	▲
		2.14.	Cakupan Puskesmas	130,77%	130,77	100	76,47	130,77%	●
		2.15.	Cakupan Pembantu Puskesmas	20,95%	23,94	100	417,71	23,94%	●
		22.6.	Posyandu aktif	100%	100	100	100	100%	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya: Angka kelangsungan hidup bayi (100,23%), Rasio posyandu per satuan balita (125%), dan yang tidak tercapai diantaranya: Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA(58,00%), Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (51,22%).

3. Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Mengupayakan sistem jaringan jalan, pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air secara terpadu, Pengelolaan sampah secara terpadu. Pengendalian dan penataan ruang wilayah sesuai dengan tapak produksi dan tapak sosial. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan pekerjaan umum, permukiman dan penataan ruang sebagaimana tabel 2.54.

Tabel 2.54
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan	3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	71,02%	72,01	72,01	100	72,01	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
	sarana prasarana sosial dasar masyarakat	3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	1,67%	1,74%	1,5	86,21	1,74	▲
		3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	80,60%	80,95	80,97	100,02	80,95	●
		3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1 dikelola pemkab	1	1	100	1,78	●
		3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	9,22%	9,75	10	102,56	9,75%	●
2	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat	3.7.	Rasio rumah layak huni	21,92%	20	20	100	20,00%	●
		3.16.	Lingkungan Pemukiman	25.760 ha	25.760	25.760	100	25.760 ha	●
		4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	84,19%	84,28%	68,43	81,19	84,28%	▲
		4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	282.850	282.900	347380	122,79	282.900	●
		4.3.	Rumah layak huni	96,64%	86,74%	86,50	99,72	86,74%	●
3	Terpenuhinya aksesibilitas jalan	3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	777 km	777	771	99,23	777 km	●
		3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	2.171.006 km	2.171.006	2113,00	97,33	2.171.006 km	▲
		3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	551,83 km	559,52	551	98,46	559,52 km	▲
		3.12.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2.040 M2	2.040	2.032	100,39	2.040 M2	●
		3.13.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2%	1,49	0,70	46,98	1,6%	▲
		3.14.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15,30%	16,02	16,43	102,51	1,49%	●
4	Terpenuhinya kebutuhan irigasi	3.15.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	30%	45	42	93,33	16,02%	▲
5	Peningkatan penataan ruang	5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	2.014 ha	2.014	2.022	100,40	2.014 ha	●
		5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	4,73%	4,74	4,78	100,84	4,76%	●
		5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	3	0	0	-	3	
		8.1.	Persentase penanganan sampah	42,80%	42,84	44	102,71	42,85	●
		8.2.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	78%	72	73,02	101,43	78%	●
		8.1.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	197 unit	192	193	100,52	197 unit	●
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
		2.	Penataan Ruang						
		2.1.	Luas wilayah produktif	33.412 Ha	33.412	33.111	99,43	33.412	▲
		2.2.	Luas wilayah industri	31,7940 Ha	31,7940	108,88	299,49	31,7940	●
		2.3.	Luas wilayah banjir	1.097 Ha	1.097 Ha	1.097 Ha	100	1.097	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya: 1). Persentase penanganan sampah (102,71%), 2). Rumah tangga pengguna listrik (122,29%), sedangkan target



yang tidak tercapai diantaranya: 1). Rasio Jaringan Irigasi (86,21%) dan Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (46,91%).

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Statistik

Urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan data dan informasi, perencanaan tata ruang, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS), peningkatan ketersediaan data, peningkatan pelaksanaan perencanaan pengendalian dan evaluasi, peningkatan koordinasi. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik sebagaimana Tabel 2.55

Tabel 2.55
Sasaran dan Target Capaian
Urusan Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Peningkatan aspek pelayanan umum urusan perencanaan pembangunan daerah	1.1	Pertumbuhan PDRB	4,38	4,40	5,40	121,62	4,44	●
		1.2	Laju Inflansi	6,09	4,35	5,72	131,49	4,35	●
		1.3	PDRB Per Kapita	3.794.564,88	4.647.070,05	4230886	91,04	4.647.070,06	●
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah.	1.1	Tersedianya dok. Perencanaan RPJPD yg ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.2	Tersedianya dok. Perencanaan RPJMD yg ditetapkan dengan Perda/Perbup	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.3	Tersedianya dok. Perencanaan RKPD yg ditetapkan dg Perbup	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.4	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
		1.5	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	100	Ada	●
Fokus Aspek Daya Saing									
3	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	3	Penataan Ruang						
		3.1	Luas Wilayah Produktif	33.412	33.220	33.111	99,43	33.412	●
		3.2	Luas Wilayah Industri	31,7940	31,7940	108,8839	299,49	31.7940	●
		3.3	Luas Wilayah Kebanjiran	1.097	1.097	1.097	100	1.072	●
Keterangan :				■	▲	●			
				Akan Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pengendalian luas wilayah produktif perlu kerja keras mengingat perubahan lahan pertanian ke non pertanian dari tahun ke tahun meningkat.

5. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan pelayanan angkutan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan perhubungan pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.56.



Tabel 2.56
Sasaran dan Target Capaian Urusan Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
					Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Peningkatan otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian dalam mewujudkan pelayanan angkutan	7.1	Jumlah arus penumpang	300.422	3.304.641	1.706.716	51,65	3.304.641	▲	
		7.2	Rasio ijin trajek	4,83	5,06	0,00002	40,00	5,06	▲	
		7.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	511	532	532	100,00	532	●	
		7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis	9	10	9	90,00	10	▲	
		7.5	Angkutan darat	2,81%	2,81%	1,76	62,63	2,81%	▲	
		7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	25,83%	21,80%	21,80	100	21,80%	●	
		7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	00:60 (0,041666667)	0,6	0,6	100	00:60 0,041666667	●	
		7.8	Pemasangan Rambu-rambu	34,05%	51,55%	53,53	103,84	51,55%	●	
		1.	Komunikasi dan Informatika							
		25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	170	16	17,33	108,31	192	●	
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
2	Terwujudnya koordinasi kerjasama antar daerah dengan pelaku pembangunan di Kabupaten Klaten	1.	Perhubungan							
		1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,6	2,27	0,06	2,64	2,3	▲	
		1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.122.619	1.123.946	1.294.735	115,20	1.123.946	●	
		1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1.122.619	1.123.946	1.294.735	115,20	1.123.946	●	
Keterangan :					▲	●				
					Tidak Tercapai	Tercapai				

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja RPJMD urusan perhubungan yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya : 1). Kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 100% 2). Pemasangan Rambu-rambu 103,84%, sedangkan yang belum bisa mencapai target diantaranya: 1). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai 2,64% 2). Angkutan darat 62,63%. Ketidak tercapainya target indikator rasio ijin trajek disebabkan karena proporsi jumlah penduduk yang dipakai dengan base line data yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap indikator capaian.

6. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi kerusakan lingkungan pada kawasan budidaya melalui peningkatan kerjasama kemitraan dan mediasi penanganan permasalahan lingkungan secara terpadu. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan lingkungan hidup pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.57

Tabel 2.57
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	8.1.	Pencemaran status mutu air	10,50%	25%	25%	100	25%	●
		8.2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	22,50%	37,50%	37,50%	100	37,50%	●
		8.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100%	100%	100%	100	100%	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat target kinerja Urusan lingkungan hidup belum dapat diukur secara pasti, hal ini tergantung pada kinerja SKPD terkait.

7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun sasaran dan capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.58

Tabel 2.58
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Peningkatan Otonomi daerah, pemerintahan umum dalam mendukung pencatatan kependudukan dan sipil	10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,97	0,99	0,67	67,68	0,99	▲
		10.2.	Jumlah bayi berakte kelahiran	48.438	78.954	10.420	13,20	78.954	▲
		10.3.	Jml Akte Pernikahan per tahun	14.542	17.279	10.636	61,55	17.279	▲
		10.4.	Kepemilikan KTP	969.926	1.004.337	965.219	96,11	1.004.337	▲
		10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	37,05	59,6	81,65	137,00	59,6	●
		10.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SP NIK	E. KTP	E. KTP	E. KTP	E. KTP	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : keluarga berencana, perlindungan anak, meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana Tabel 2.59



Tabel 2.59
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum dan kesejahteraan masyarakat									
1	Peningkatan peran perempuan di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan	11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43,60%	60%	53	83,33	60%	▲
2	Penguatan kelembagaan pengarusu-tamaan gender dan anak yang didukung kebijakan Pemerintah daerah mengenai Perlindungan anak dan perempuan	11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	56,39%	80%	80%	100	80%	●
		11.3	Rasio KDRT	0,37%	0,20%	0,20%	0,19	0,20%	▲
		11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	76 kasus	76 kasus	76 kasus	100	126 kasus	●
		12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100	2,24	▲
		12.2	Rasio akseptor KB	14,03%	35%	35%	100	35%	▲
		12.3	Cakupan peserta KB aktif	46,97%	85%	85%	100	85%	●
		12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	43%	60%	60%	100	20%	▲
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya :1). Sedangkan yang perlu ditingkatkan target capaiannya adalah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 95,96%, 2). Rasio KDRT justru meningkat, serta Rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi 2,34.

9. Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan pemberdayaan fakir miskin, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan pengembangan Ketransmigrasian. Adapun sasaran dan capaian kinerja urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian pada tahun 2015 sebagaimana tabel 2.60

Tabel 2.60
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat	4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	0,17%	0,28	0,97	346,43	0,28%	●
		11.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,01%	0,00	0,30		0%	▲
		11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	18,88	22,93	97,25	424,12	22,93	●
		14.1	Angka partisipasi angkatan kerja	20,52	22,99	67,79	294,87	22,99	●
		14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,57%	0,21	0,75	357,14	0,21%	●
		14.3	Pencari kerja yang ditempatkan	7,36%	8,48	24,74	291,75	8,46%	●
		14.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,5%	3,93	2,51	63,87	3,93%	▲
		14.5	Keselamatan dan perlindungan	2,62%	4,28	9,24	215,89	4,26%	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		16.3	Rasio daya serap tenaga kerja	2.31.2,60	2323,33	1.754,45	75,51	2.323,33	▲
		1.1	Rasio kelulusan S1/2/3	73	104	2,75	2,64	104	▲
		1.2	Rasio ketergantungan	93,73	93,73	30,51	32,55	93,73	▲
2	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKS)	13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	35	12,41	13,98	112,65	35	▲
		13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	0,22%	35	23	65,71	0,45%	▲
		13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,84%	0,45	40,78	9.062,22	2,91%	●
			Persentase Jumlah penduduk Miskin	16,13				12,41	▲
3	Peningkatan tarap hidup masyarakat melalui program transmigrasi		Transmigrasi swakarsa/UMUM	80	48,67	58,34	119,87	15,42	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya : 1). Rasio penduduk yang bekerja 346,43%, 2).Angkatan partisipasi angkatan kerja perempuan 424,12%. Sedangkan target yang tidak tercapai 1). Tingkat pengangguran terbuka 63,87%, 2). Rasio kelulusan S1/S2/S3 hanya mencapai 2,57% hal perlu mendapat perhatian serius mengingat angka meningkat, berarti ada permasalahan yang harus di atasi.

10. Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Penguatan kelembagaan para pelaku industri, perdagangan dan koperasi, peningkatan kompetensi dan sarana prasarana pendukung, pengembangan usaha industri kecil dan menengah perdagangan dan koperasi yang berbasis pada produk unggulan daerah untuk bersaing di pasar regional dan nasional, serta Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
					Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	
Fokus Aspek Pelayanan Umum										
1	Mendorong peran serta koperasi, dan produk UMKM dlm meningkatkan kesejahteraan masyarakat	15.1	Persentase koperasi aktif	73%	85	72,80	85,65	85%	▲	
		15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1.427	2.052	1941	94,59	2.052	▲	
		15.3	Jumlah BPR/LKM	52	71	42	59,15	71	▲	
		15.4	Usaha Mikro dan Kecil	45.399	53.600	54916	102,46	53.600	▲	
		25.1.	Pameran/expo	Tk. Nas 1		1	3	300,00	1	●
				Tk. Regional 3		3	0	0	3	▲
Tk. Daerah 6				6	0	0	6	▲		
Perdagangan										
2	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat	6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	25,68%	28%	27,30	97,50	28%	▲	
		6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	9.750.915,80	9.900.000	19.349.440,03	195,45	9.900.000	●	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		7	Perindustrian						
		7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,25%	13,75%	21,59	157,02	13,75%	●
		7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	8,75%	11%	10,50	95,45	11%	▲
		7.3.	Pertumbuhan Industri.	5%	10%	10,9	109,20	10%	●
		7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	85%	100%	95	95	100%	▲
		ASPEK DAYA SAING							
3	Peningkatan daya saing daerah	3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Bank Umum 2,	2	2	100	2	●
				BUMD 2,	2	2	100	2	●
				BPR 20,	20	20	100	20	●
				BKK 1	1	1	100	1	●
		3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	2 jenis	2	2	100	2	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Capaian penyelenggaraan urusan perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan UMKM pada tahun 2015 ada indikator yang terlampaui dan yang tidak tercapai target sarannya, dan yang tercapai diantaranya: 1). Pameran/expo mencapai 300%, 2). Ekspor perdagangan (US \$) mencapai 195,45%.

11. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan pada urusan ini mencakup :

- a) Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik diarahkan untuk peningkatan kemampuan perlindungan masyarakat, fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketertiban, peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Adapun sasaran dan target Capaian Kinerja RPJMD bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana Tabel 2.62

Tabel 2.62
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
		19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6	6	6	100	6	●
		19.2.	Jumlah Ormas/LSM	14/26	14/26	27/66	100	192,86/253,85	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

- b) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pengawasan terhadap masyarakat dan/atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun sasaran dan target Capaian Kinerja RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		Fokus Aspek Pelayanan Umum							
1	Terwujudnya koordinasi kerjasama antar pelaku pembangunan di Kabupaten Klaten	20.1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,4	0,4	0,4	100,00	0,4	●
		20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	95,8	94,6	84,54	88,97	94,6	▲
2	Terwujudnya Keamanan dan ketertiban bagi masyarakat	20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	9,2	9,24	23,87	258,28	9,24	●
		20.4.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	12.531	13.268	13.268	100	12.531	●
		20.5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	401 Desa/kel	401	401	100,00	401 desa/kel	●
		20.6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	1250	300	240	80	350	▲
		1.2.	Jumlah demo	8 kali	8	5	62,5	8	●
Keterangan :					▲	●			
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tidak tercapai diantaranya : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten angka tinggi, artinya permasalahan ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Klaten meningkat sehingga memerlukan penanganan khusus, sisi lain jumlah demo sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang harus menggerakkan partisipan massa mengalami aklerasi peningkatan.

12. Penunjang Urusan Pemerintah.

Penunjang Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPPKAD, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, BPBD, Kecamatan dan Kelurahan diarahkan untuk :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari Bagian Pemerintahan : Pengembangan Wilayah Perbatasan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; Bagian Hukum: Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluhan, Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Organisasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, Bagian Pembangunan: Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Bagian Perekonomian: Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi, Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi, Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah & Perhubungan, Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan, Bagian Kesejahteraan Rakyat: Pemuda dan Olah Raga, Peningkatan koordinasi Bidang Kebudayaan, Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan, Bagian Humas: Kerjasama Informasi Dengan Mass Media, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Bagian Umum: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pelayanan Administrasi



- Perkantoran, Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur dan Penyelamatan dan Pelestarian dokumen arsip.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Peningkatan & pengembangan Pengelola Keuangan Daerah serta Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendapatan.
 - e. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu: Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu.
 - f. Badan Kepegawaian Daerah: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - g. Kecamatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kecamatan, Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan, Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kecamatan.
 - h. Kelurahan: Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan, Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran dan capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Pertanahan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Penanaman modal, ESDM, Persandian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015, sebagaimana Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanahan,
Perangkat Daerah,Kepegawaian, Penanaman modal, ESDM, Persandian Komunikasi dan
Informatika.

(1)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
1	BAGIAN PEREKONOMIAN								
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat	16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	14	19	16	84,21	22	▲
		16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	714	1.100	6.446	586,00	1.300	●
		16.1.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	19%	19	3	15,79	19	▲
	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	3.	Energi & Sumber daya Mineral						
		3.1.	Pertambangan tanpa ijin	5 Ha	5	55	1100,00	5 Ha	▲
		3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,30%	2,1	7,19	342,38	2,30%	●
2.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								
	Peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan Otonomi Daerah, Pemerintahan	1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	70%	76	85	111,84	80%	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket
					Rencana	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	2	Rasio RT/RW terhadap total jumlah penduduk	0,904	0,904	0,902	99,78	0,906	●
		3	Rasio BPD terhadap total jumlah penduduk	0,22	0,22	0,219	99,55	0,221	●
		4	Rasio Katdes terhadap total jumlah penduduk	0,178	0,178	0,16	89,89	0,178	●
3.	BAGIAN HUMAS								
	Peningkatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam mewujudkan hubungan masyarakat yang harmonis	25.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,07	0,08	0,08	100	0,09	●
		25.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	7/12	8/14	8/14	100	8/15	●
		25.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	7/0	7/0	7/1	100	7/0	●
		25.5	Web site milik pemerintah daerah	1	1	2	200	1	●
4.	BAGIAN ORGANISASI								
	Penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah, peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan secara umum	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,25	77,78	76,86	98,82	77,86%	●
		2	Standar Operasional	SKPD	45	45	100	45	●
		3	Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM)	SPM	15	15	100	15	●
		4	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	7	7	7	100	7	●
5.	BAGIAN KESRA								
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk						
		2	Gelangan / balai remaja (selain milik swasta)	198	198	198	100	220	●
		3	Lapangan olahraga	100	100	100	100	100	
6.	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU								
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan iklim investasi dan penguatan industri lokal	1	Penyelesaian izin lokasi	14 hari	14 hari	14 hari	100	14 hari	●
		2	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	ada	ada	ada	100	ada	●
		3	Lama proses perijinan	14 hari	14 hari	14 hari	100	14 hari	●
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25	25	100	22	●
7.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan iklim investasi dan penguatan industri lokal	20.1.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	3 unit	3	5	166,7	3 unit	●
		1.3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Pajak = 9 Retribusi=3	9 3	10 3	111	Pajak = 9 Retribusi=3	●
		1.4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	100	1	●
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	Kesiap-siagaan Pemda dan masyarakat dalam penanganan kebencanaan	1	Luas wilayah kebanjiran	1.072 ha	1.072 ha	1.072 ha	100	1.072 ha	
		2	Luas wilayah kekeringan;	45 ha	45 ha	45 ha	100	45 ha	
		A	KMLR	8 ha	8 ha	8 ha	100	8 ha	
		B	KMLS	43	43	43	100	43	
		C	KMLB	55	55	55	100	55	
		d	KMLP						
		20.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	26 Kec.	26 Kec.	26 kec	100	26 Kec.	●
		20.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50 Menit	50 Menit	50 menit	100	50 Menit	●
Keterangan :									
					Tidak Tercapai	Tercapai			

Sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten hingga tahun 2015, diantaranya: 1). SIMDA (Sistem Informasi Management Daerah), 2). SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai), 3). SIAK (Sistem Informasi Analisis Kependudukan), 4). SIMKEUDA (Sistem Informasi Management Keuangan Daerah), 5). SIM Gaji (Sistem Informasi Management Gaji), 6). SIM Perpustakaan dan SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

Sasaran dan capaian kinerja Penunjang Urusan Pemerintah mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten 2010-2015, sebagaimana Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan, daerah, Pertanahan,
Perangkat Daerah,Kepegawaian, Penanaman Modal , ESDM, Persandian Komunikasi dan
Informatika Mengacu RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
1	2	3	4	5			6	7	
1	SEKRETARIAT DPRD								
1	Meningkatnya kualitas legislasi DPRD	1	Jumlah produk legislasi DPRD	Perda	29	13	44,83	63	▲
				Raperda Inisiatif	2	2	100,00	8	●
				Keputusan DPRD	20	33	165,00	169	●
				Keputusan Pimpinan DPRD	20	34	170,00	89	●
				Keputusan Panitia Musyawarah	18	18	100,00	59	●
	Meningkatnya kualitas pengawasan DPRD	2	Jumlah Produk pengawasan DPRD	Reses	3	3	100,00	12	●
				Fraksi	7	7	100,00	28	●
				Kunjungan kerja ke Wilayah/SKPD	192	133	74,48	356	▲
	Meningkatnya kualitas penganggaran daerah yang bersifat <i>pro poor, pro jobs, pro growth dan pro environment</i>	3	Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan	Keputusan Badan Anggaran	9	9	100,00	42	●
				KUA PPAS	1	1	100,00	5	●
				KUA PPAS Perubahan	1	1	100,00	5	●
				Perda APBD	1	1	100,00	5	●
				Perda RAPBD Perubahan	1	1	100,00	5	●
2	SEKRETARIAT DAERAH								
	a. BAGIAN HUKUM								
	Peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum Serta HAM.	1	Jumlah Penetapan Perda	9	29	13	44,83	63	▲
		2	Jumlah Penetapan Perbup	60	44	47	106,82	45	●
		3	Jumlah Penanganan Perkara	1 Perkara PTUN	1	2	200	1 Perkara PTUN	●
	b. BAGIAN PEMBANGUNAN								
	Peningkatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan terwujudnya koordinasi kerjasama antar pelaku pembangunan di Kab. Klaten	1	Prosentase capaian pelaksanaan kegiatan SKPD Kabupaten	100	100	81	81	88,89	▲
		2	Jumlah pengguna layanan ULP	67	67	67	100	67	●
		3	Jumlah pengguna layanan LPSE	67	67	67	100	67	●
	c. BAGIAN UMUM								
	Terwujudnya aspek pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Jenis belanja pemeliharaan mebelair	5 jenis	5	5	100	5 jenis	●
		2	Jenis belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional	4 jenis	4	4	100	4 jenis	●
		3	Jumlah unit penataan arsip	8	8	8	100	8	●
		4	Penyediaan pakaian dinas & pakaian khusus	5/3	5/3	5/3	100	5/3	●
		5	Penyediaan kebutuhan rumah tangga bupati/wk. bupati	9 bahan pokok	9	9	100	9 bahan pokok	●
		6	Pemeliharaan Gamelan	1 pangkon gamelan	1	1	100	1 pangkon gamelan	●
		7	Penyediaan jamuan tamu bupati/wk. bupati	1 tahun	1	1	100	1 tahun	●
3	INSPEKTORAT								
	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan terkendalinya kebijakan KDH	1	Jumlah pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Obrik	384	384	100	100	●
				Kasus	40	66	165	100	●
				Review LKD	1	1	100	100	●
				Tindaklanjut hasil pengawasan	188	188	100	100	●
				Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan (Larwasda)	300	300	100,00	100	●
	Meningkatnya kualitas aparaturnya pengawasan daerah terhadap total hasil obrik			8,33	8,33	100	100	●	
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
	Peningkatan pelayanan publik untuk mendukung otonomi	1	Rasio jumlah PNS perempuan terhadap total PNS	51,25	52,99	53,95	101,81	52,36	●



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket
				Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5			6	7
	daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	2 Rasio jumlah PNS berpendidikan dasar (SD + SMP) terhadap total PNS	5,47	5,23	4,54	86,81	5,46	▲
		3 Rasio jumlah PNS berpendidikan Menengah (SMA dan sejenisnya) terhadap total PNS	30,30	24,98	23,67	94,76	29,70	▲
		4 Rasio jumlah PNS berpendidikan Diploma terhadap total PNS	29,29	29,13	24,31	83,45	29,69	▲
		5 Rasio jumlah PNS berpendidikan SI terhadap total PNS	30,07	35,87	44,18	123,17	33,27	●
		6 Rasio jumlah PNS berpendidikan S2 terhadap total PNS	30,07	2,19	3,30	150,68	1,86	●
		7 Rasio jumlah PNS Golongan I terhadap total PNS	3,51	2,29	1,76	76,86	2,84	▲
		8 Rasio jumlah PNS Golongan II terhadap total PNS	15,93	16,19	14,15	87,40	15,85	▲
		9 Rasio jumlah PNS berpendidikan III terhadap total PNS	38,42	37,53	43,73	116,52	37,56	●
		10 Rasio jumlah PNS Golongan IV terhadap total PNS	42,13	43,99	40,36	91,75	43,74	▲
Keterangan :				▲	●			
				Mengalami Penurunan	Naik			

Catatan : Rencana berdasarkan kondisi tahun 2014

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta pengembangan teknologi tepat guna perdesaan. Adapun sasaran dan capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana Tabel 2.66.

Tabel 2.66
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2015	Ket
				Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5			6	7
		Fokus Aspek Pelayanan Umum						
		Kemiskinan	115.537	164.350	197.124	83,87	103.983	▲
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan otonomi desa	22.1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	3910	3910	3910	100	3910	●
		22.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	428	428	428	100	428	●
		22.3. PKK aktif (Jumlah Posyandu)	428	428 (2.327)	428 (2.327)	100	428 (2.327)	●
Keterangan :				▲	●			
				Tidak Tercapai	Tercapai			

Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tercapai diantaranya : 1). Rata-rata jumlah binaan PKK, dan 2). PKK aktif. Kemiskinan tidak bisa tercapai target penurunannya.

14. Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan



Perpustakaan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Peningkatan kualitas Pelayanan dan Prasarana Kearsipan. Adapun sasaran dan target capaian kinerja urusan arsip dan perpustakaan pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.67

Tabel 2.67
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
Fokus Aspek Pelayanan Umum									
1	Peningkatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan	24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar		Sesuai standar	●
		24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	9	9	5	55,56	9	▲
		26.1.	Jumlah perpustakaan	Tk. Desa 35	35	39	111,43	Tk. Desa 35	●
				Tk. Kab 1	1	1	100,00	Tk. Kab 1	●
		26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.671	15.671	7.673	48,96	15.671	▲
		26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	34.557	34.557	43.661	126,34	34.557	●
Keterangan :				▲	●				
				Tidak Tercapai	Tercapai				

Dari tabel di atas, hampir semua target RPJMD terlampaui kecuali peningkatan jumlah pengelola arsip dan perpustakaan yang mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengurangan personil dan kebijakan. Disamping itu jumlah pengunjung juga tidak bisa tercapai, hanya 48,96%.

15. Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. Kebijakan pada uraian ini diarahkan pada: Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan). Gambaran selengkapannya sasaran dan target capaian urusan ketahanan pangan pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket		
				Rencana	Realisasi	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)		
Fokus Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat	21.1	Regulasi ketahanan pangan	1	0	1	1		●	
		21.2	Ketersediaan pangan utama :	61,543 ton	61,449	245,655	399,77	61.543 ton	●	
			- Padi							
			- Jagung	9,898 ton	9,898	84,030	848,96	9.898 ton	●	
	- kedelai	3,679 ton	3,679	5,355	145,56	3.679 ton	●			
Keterangan :				▲	●					
				Tidak Tercapai	Tercapai					

Dari tabel di atas, target indikator urusan ketahanan pangan mampu melampaui target diukur dengan ketersediaan pangan utama.

B. Urusan Pilihan

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk : Peningkatan kesejahteraan petani dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan, pengembangan klaster dan revitalisasi bidang pertanian, pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dan pengembangan budi daya perikanan. Adapun capaian kinerja urusan pertanian, kehutanan dan perikanan pada Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.69

Tabel 2.69
Sasaran dan Target Capaian Kinerja RPJMD
Urusan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2010	Target Capaian Tahun 2015			Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2015	Ket	
				Rencana	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Peningkatan bidang pertanian secara terpadu, dengan upaya mempertahankan kesuburan tanah, penguatan kelembagaan kelompok tani, pemenuhan sapsras bidang pertanian, ketersediaan bibit unggul, penanggulangan hama secara terpadu dan proteksi dan advokasi bagi petani	1 Pertanian							
		1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	61,77	62,1	62,1	100	62,1	●
		1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	21,96	22,26	22,26	100	22,26	●
		1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	74,99	75,24	75,24	100	75,24	●
		1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	3,28	3,4	3,4	100	3,4	●
		1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	●
		1.6.	Cakupan bina kelompok petani	15,57	19,84	19,84	100	19,84	●
2	Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup	2 Kehutanan							
		2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	19,13	19,84	5,98	46,38	19,84	▲
		2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	54	19,53	19,53	100	19,53	▲
		2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,22	3,4	3,4	100	3,4	●
3	Terwujudnya kawasan agropolitan berbasis Kecamatan dengan menggali keunggulan potensi yang dimiliki	5 Kelautan & perikanan							
		5.1.	Produksi perikanan	81,86	94,02	94,26	100,26	94,02	●
		5.2.	Konsumsi ikan	32,69	51,92	13,06	25,15	51,92	▲
		5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan		Tidak ada nelayan	
		5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan	Tidak ada nelayan		Tidak ada nelayan	
4	Pemanfaatan pola ruang untuk menjaga kawasan produktif sebagai kawasan budidaya	6 Pemanfaatan Ruang							
		6.1	Luas wilayah produktif	33.412	33.412	33.111	100	33.412	●
Keterangan :				▲	●				
				Tidak Tercapai	Tercapai				

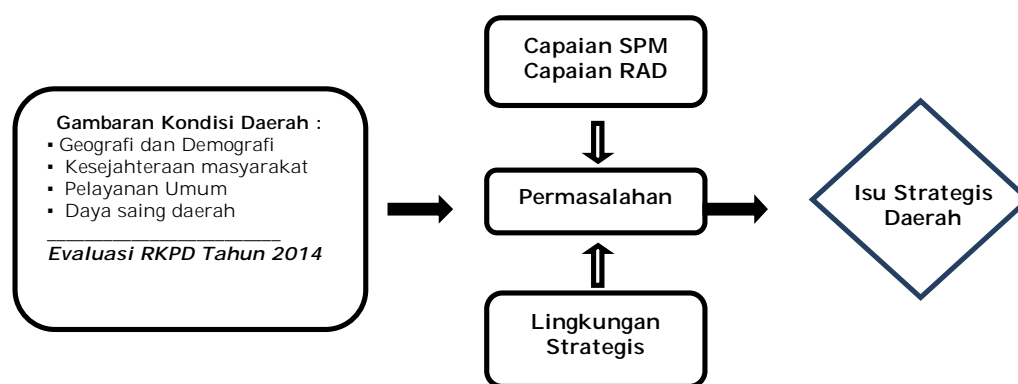
Dari tabel di atas, terlihat ada beberapa target kinerja yang terlampaui juga ada yang tidak bisa tercapai. Target yang tidak tercapai diantaranya : Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB juga tidak terlampaui targetnya, disamping itu Rehabilitasi hutan dan lahan kritis perlu kerja keras terutama sebagai akibat galian Gol. C di Kecamatan Kemalang.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2015. Sehingga hasil pengidentifikasian permasalahan



kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis dengan memperhatikan capaian SPM (Standar Pelayanan Umum), RAD (Rencana Aksi Daerah) yang disusun serta lingkungan strategis daerah. Identifikasi permasalahan tergambar secara sederhana, sebagai berikut :



Gambar 2.21 Alur Proses Identifikasi Isu Strategis Daerah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (amanat UUD 1945). Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut RPJMN 2014-2019 memfokuskan pencapaian agenda pembangunan nasional untuk; 1.) mewujudkan Indonesia yang sejahtera (memperkuat *triple tracks strategy* serta pembangunan *inklusif* dan berkeadilan), 2). mewujudkan Indonesia yang Demokratis (memantapkan konsolidasi demokrasi), dan 3). mewujudkan Indonesia yang berkeadilan (memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan).

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional, meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan penting hingga akhir tahun 2015 dan perkiraan pencapaiannya di tahun 2016 namun disadari bahwa kondisi saat ini dan perkiraan kedepan masih menunjukkan berbagai tantangan yang perlu menjadi prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2017. Kondisi ini kemudian ditetapkan sebagai permasalahan dan pokok-pokok isu strategis pembangunan Tahun 2017 secara nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan Sektor Unggulan melalui Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; Peningkatan Ekspor Non Migas
2. Pembangunan Manusia melalui Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan; Perumahan dan Permukiman
3. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Efektivitas Terpercaya melalui Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; Reformasi Birokrasi
4. Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan melalui pembangunan Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Antar Kelompok Pendapatan; Desa dan Kawasan Pedesaan; Perkotaan; Pengembangan Konektivitas Nasional
5. Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional melalui Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi; Pembangunan Pariwisata; Peningkatan Investasi



2.4. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional, kondisi Jawa Tengah baik dalam pengertian potensi dan agregat permasalahan yang dihadapi, isu strategis Jawa Tengah tahun 2017, diantaranya :

- 1). Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2). Kedaulatan pangan;
- 3). Kedaulatan energi;
- 4). Pembangunan infrastruktur;
- 5). Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan Demokrasi.

Berdasarkan isu tersebut di atas, kondisi obyektif atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan penting hingga akhir tahun 2015 dan perkiraan pencapaiannya di tahun 2016, namun disadari benar bahwa kondisi pemerintahan dan rakyat saat ini dan perkiraan kedepan masih menunjukkan banyaknya permasalahan dan tantangan pembangunan; Identifikasi terhadap berbagai kondisi ini merupakan isu pokok permasalahan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya ditetapkan sebagai skala prioritas dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017 dengan tetap mensinkronkan terhadap prioritas pembangunan Provinsi maupun Nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017 diantaranya, adalah :

- 1). Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- 2). Penyediaan dan ketercukupan ketahanan dan keamanan pangan;
- 3). Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan;
- 4). Belum optimalnya kapasitas pengelolaan sumber daya daerah (energi) yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan berlandaskan pada potensi dan kondisi wilayah serta kawasan ekonomi daerah yang terintegratif;
- 5). Kerusakan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, drainase dan jembatan belum sepenuhnya mendapat pemihakan
- 6). Masih lemahnya pengembangan kapasitas pemerintahan yang berdasarkan pada tingkatan sistem, institusional dan individu bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan masalah mendesak yang dihadapi dan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- b. Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelayanan sosial;
- c. Kebutuhan memperbaiki akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap akses sumber daya produktif dan kesempatan kerja;
- d. Kebutuhan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang tepat adanya tuntutan reformasi birokrasi;
- e. Kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan manajemen sumber daya alam dan aset daerah;
- f. Kebutuhan kualitas pembangunan berkelanjutan.



Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.70

Tabel 2.70
Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan
Kabupaten Klaten Tahun 2017

No	Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	Pembangunan Sektor Unggulan melalui Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; Peningkatan Ekspor Non Migas	Kedaulatan Pangan	Penyediaan dan kecukupan ketahanan dan keamanan pangan
		Kedaulatan energi	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya daerah (energi) yg dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan berlandaskan pada potensi dan kondisi wilayah serta kawasan ekonomi daerah yg terintegratif.
2	Pembangunan Manusia melalui Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan; Perumahan dan Permukiman	Pengurangan kemiskinan	Kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelayanan sosial
3	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Efektivitas Terpercaya melalui Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah	Kebutuhan terhadap kebijakan dan kelembagaan yang tepat adanya tuntutan reformasi birokrasi
4	Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan melalui pembangunan Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Antar Kelompok Pendapatan; Desa dan Kawasan Pedesaan; Perkotaan; Pengembangan Konektivitas Nasional	Pembangunan Infrastruktur	Kerusakan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, drainase dan jembatan belum sepenuhnya mendapat pemeliharaan.
5	Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional melalui Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi; Pembangunan Pariwisata; Peningkatan Investasi	Pengurangan Pengangguran	Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian, IKM/UMKM dan koperasi berbasis klaster untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2017 dan sekaligus proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro regional pada tahun tersebut dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi Kabupaten Klaten, wilayah sekitarnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai Kerangka Ekonomi Daerah tersebut, perlu disusun berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang strategis guna menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2017 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diajukan.

3.1.1. KONDISI EKONOMI

3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Perkembangan perekonomian global terus menunjukkan kinerja positif, dan berdampak pada ekonomi domestik. Perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan semula, baik untuk tahun 2014 maupun tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan PDB atas harga konstan 200 pada triwulan III-2014 dibanding triwulan II-2014 mencapai 2,96 persen (q-to-q) dan apabila dibanding dengan tahun yang sama 2013 mengalami pertumbuhan 5,01 persen (y-on-y). Secara kumulatif, pertumbuhan PDB Indonesia hingga triwulan III-2014 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2014 terhadap triwulan III-2013 (y-to-y) didorong oleh oleh semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,01%. Sementara dibanding dengan triwulan II-2014 (q-to-q) pertumbuhan tertinggi dicapai sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 6,74%.

Pertumbuhan kumulatif triwulan III-2014 (q-to-q) dibanding dengan triwulan III-2013 pertumbuhan tertinggi dicapai semua sektor, kecuali pertambangan dan penggalian yang turun 0,13% dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,65%.

Struktur PDB triwulan III-2014 didominasi oleh sektor industri pengelolaan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing memberikan kontribusi sebesar 23,37%, 15,21% dan 14,26%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2014 terhadap triwulan III-2013 (q-to-q) didorong oleh pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (11,12%); komponen pengeluaran rumah tangga (2,72%); komponen pembentuk modal



tetap bruto (4,02%). Komponen ekspor netto juga mengalami pertumbuhan positif, yakni komponen ekspor barang dan jasa turun 0,02%, sedangkan komponen impor barang dan jasa turun 2,87%.

Pertumbuhan PDB pengeluaran triwulan III-2014 (q-to-q) dibanding dengan triwulan III-2013 ditopang oleh pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,44%); komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (4,35%); komponen pembentuk modal tetap bruto (4,02%); Komponen ekspor netto juga mengalami pertumbuhan positif, yakni komponen ekspor barang dan jasa turun 0,70%, sedangkan komponen impor barang dan jasa turun 3,63%.

Pertumbuhan PDB pengeluaran sampai triwulan III-2014 (c-to-c) sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini didorong oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,54%); komponen pembentuk modal tetap bruto (5,05%), konsumsi pengeluaran pemerintah (2,35%). Selanjutnya pada komponen ekspor netto mengalami pertumbuhan positif, yakni komponen ekspor barang dan jasa tumbuh minus 0,63% dan impor barang dan jasa turun 3,21%.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2014 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,51 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,63 persen, Pulau Kalimantan 8,21 persen, Pulau Sulawesi 4,97 persen, dan sisanya 4,68 persen di pulau-pulau lainnya.

Kondisi ekonomi Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Asumsi dasar ekonomi makro 2014 tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hingga saat ini dan prospeknya ke depan. Dengan modal kinerja ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir yang cukup menggembirakan, prospek kondisi ekonomi makro Indonesia ke depan diperkirakan berpotensi membaik. Inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang moderat, sejalan dengan target inflasi dari Bank Indonesia. Sejalan dengan itu, suku bunga juga mulai menunjukkan penurunan. Nilai tukar rupiah relatif stabil, meskipun sejak akhir 2011 mengalami pelemahan sebagai imbas dari krisis ekonomi global. lain yang dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2013 adalah terkait dengan perhitungan migas, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Variabel-variabel tersebut meliputi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price – ICP*), *lifting* minyak, dan *lifting* gas. Variabel *lifting* gas baru mulai dimunculkan sebagai asumsi dasar sejak APBN 2013 ini, dalam rangka meningkatkan transparansi perhitungan penerimaan gas bumi. Harga minyak mentah Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sehingga sulit untuk diprediksi. *Lifting* minyak dan gas sebenarnya didominasi oleh faktor internal, tetapi hal tersebut menjadi tantangan yang cukup kompleks mengingat pencapaian *lifting* minyak yang selalu di bawah target dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mempertimbangkan berbagai



fakta tersebut dengan seksama, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,8 persen. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi. Dari sisi produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 4,00 persen. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa, membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang didukung oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2017 berkisar Rp. 12.100,- /US\$ dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 7,1%. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia, serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*.
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2017 sebesar 5,5 – 6% persen. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi, nilai tukar, dan arus modal masuk ke Indonesia.
5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US\$105 per barel. Perkiraan tersebut antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.
6. *Lifting* minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 830.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak.

Berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas, fokus pentahapan RPJMNas ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu IPTEK yang terus meningkat, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :



- a. Ekonomi, melalui penekanan pertumbuhan ekonomi makro, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas;
- b. Lingkungan hidup;
- c. Politik;
- d. Penegakan hukum;
- e. Tata kelola dan reformasi birokrasi;
- f. Pertahanan dan keamanan;
- g. Kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan IPM, pendidikan dan kesehatan;
- h. Pembangunan kelautan; dan
- i. Pembangunan kewilayahan.

3.1.1.2. Kondisi Ekonomi Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Surakarta

Perkembangan perekonomian global dan nasional yang terus menunjukkan perkembangan positif diharapkan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional Jawa Tengah, sehingga berpotensi tumbuh lebih tinggi pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2015 berkisar pada angka 5,4 – 5,8%, dan DPK (dana pihak ketiga) antara 14 – 16%, pertumbuhan kredit di angka 15-17%, hal ini dengan berkembangnya investasi di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai 7-7,5%. Hal ini didukung adanya kinerja positif Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflansi daerah (TPID) dengan mendorong program *corporate social responsibility* (CSR), serta upaya mewujudkan konektivitas dengan perbaikan struktur dan infrastruktur di setiap wilayah.

Laju inflansi Jawa Tengah pada triwulan II 2014 (3,65%) dan laju inflansi (y-on-y) Agustus 2014 sampai terhadap Agustus 2013 sebesar 4,36%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflansi adalah sektor tarif listrik, biaya akademi/perguruan tinggi, biaya sekolah dasar, biaya sekolah menengah dan gula pasir. Adapun penyebab terjadinya inflansi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga sebesar 1,85%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,70%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,34%; kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,26%, kesehatan sebesar 0,17%; kelompok sandang sebesar 0,05% dan kelompok bahan makanan sebesar 0,02%.

Kondisi kesejahteraan masyarakat membaik. Berdasarkan survei konsumen menunjukkan ketersediaan lapangan kerja meningkat, namun kualitas penduduk yang bekerja belum mengalami perbaikan karena tenaga kerja yang terserap didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah).

Sementara itu, Perekonomian wilayah Eks Karesidenan Surakarta selama tahun 2014 diantara kabupaten/kota di wilayah eks. Karesidenan Surakarta



(Soloraya), pertumbuhan ekonomi *Kabupaten Sragen* yang tertinggi, yakni mencapai 6,2-6,7 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 6,4-6,9%. *Kota Surakarta* pada tahun 2014 berkisar mencapai 5,5-6,0 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,2-6,2%. *Kabupaten Boyalali* 2014 tumbuh mencapai 5,0-5,5 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,2-5,7%. *Kabupaten Sukoharjo* pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,6-5,1 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 4,4-5,4%. *Kabupaten Karanganyar* pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9-5,4 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,3-5,8%. *Kabupaten Wonogiri* pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,9-4,4 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 4,3-4,8 %. Sedang pertumbuhan perekonomian *Kabupaten Klaten* tahun 2014 mencapai 5,4-5,9 % (y-on-y), dan untuk tahun 2015 diperkirakan berkisar pada angka 5,5-6,0 %.

Sejalan dengan inflansi nasional, inflansi di eks Karesidenan Surakarta akan mengalami pelambatan, angkanya berkisar antara 6,55% lebih rendah dibanding nasional, maupun Jawa Tengah berkisar antara 7,15 persen dan 7,25 persen. Trend pelambatan ini disebabkan adanya ketercukupan bahannpangan strategis seperti beras, jagung dan bawang. Disamping itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga akan membaik, diukur berdasarkan survei konsumen menunjukkan ketersediaan lapangan kerja meningkat, dan berkurangnya pengaruh kenaikan BBM, serta ketercukupan pangan lokal.

Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "*Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Mandiri*" dengan Misi:

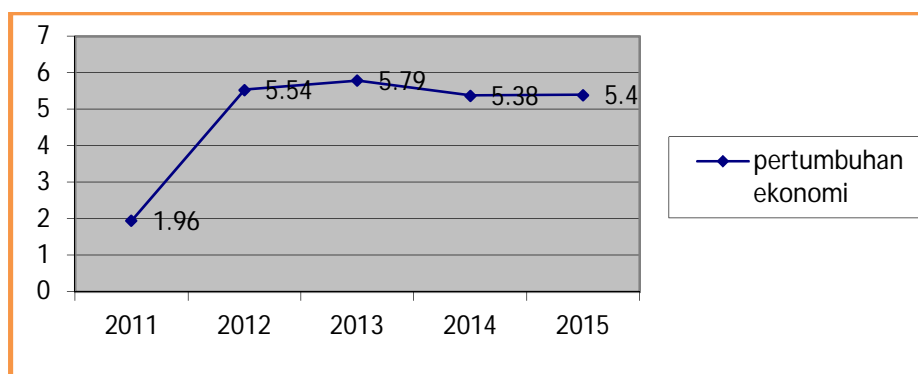
- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan Dan Pengangguran;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Yang Bersih, Jujur Dan Transparan : *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*;
- d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat Untuk Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan;
- e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Proses Pembangunan Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat; dan
- g. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah Yang Berkelanjutan Dan Ramah Lingkungan.



3.1.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Klaten

A. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dalam waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011-2014 pertumbuhan ekonomi berkisar antara 1,9-5,9%, dan pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 6,0%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1



Sumber : Capaian RPJMD Kab. Klaten, dan Analisis BI-2015

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten
Tahun 2011-2015

B. Produk Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2014 dapat dilihat pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2000 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Nilai PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun 2000, di Kabupaten Klaten selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten
Tahun 2012-2014 (dalam Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.471.010,67	11,1	2.583.620,33	4,56	2.562.146,59	-0,83
2	Pertambangan dan Penggalian	523.680,55	3,87	557.451,35	6,45	597.551,15	7,19
3	Industri Pengolahan	5.991.221,12	6,51	6.506.551,46	8,6	7.094.088,57	9,03
4	Pengadaan Listrik dan gas	34.545,06	8,7	37.301,57	7,98	39.710,03	6,46
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.692,21	1,14	11.878,14	11,09	13.083,66	10,15
6	Konstruksi	1.199.173,63	2,55	1.254.970,42	4,65	1.294.690,29	3,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.912.955,36	1,15	4.028.912,46	2,96	4.124.651,58	2,38
8	Transportasi dan Pergudangan	424.248,41	4,17	468.996,42	10,55	512.975,80	9,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	733.824,99	2,26	755.159,55	2,91	792.087,87	4,89
10	Informasi dan Komunikasi	722.286,22	2,11	749.129,31	3,72	778.393,63	3,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	637.716,58	6,26	701.765,45	10,04	717.168,09	2,19
12	Real Estate	272.023,36	3,62	290.530,05	6,8	316.062,61	8,79
13	Jasa Perusahaan	50.940,86	9,49	60.535,96	18,84	65.626,24	8,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	530.808,20	-0,10	543.501,77	2,39	540.694,79	-0,52
15	Jasa Pendidikan	1.085.188,87	23,09	1.193.988,37	10,03	1.333.544,38	11,69

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	182.777,69	13,45	200.873,15	9,9	224.544,38	11,52
17	Jasa Lainnya	319.311,93	-1,18	354.825,20	11,12	385.231,09	8,57
Produk Domestik Regional Bruto		19.102.405,71	5,71	20.299.990,96	6,27	21.392.250,75	5,38

Sumber : *Kajian Ekonomi Daerah, 2015*

Dari Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama tahun 2012-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.19.102.405,7 pada tahun 2012, meningkat menjadi sebesar Rp.21.392.250,75 pada tahun 2014.

C. Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah

Apabila dilihat dari perkembangan Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2011-2016, sebagai berikut:

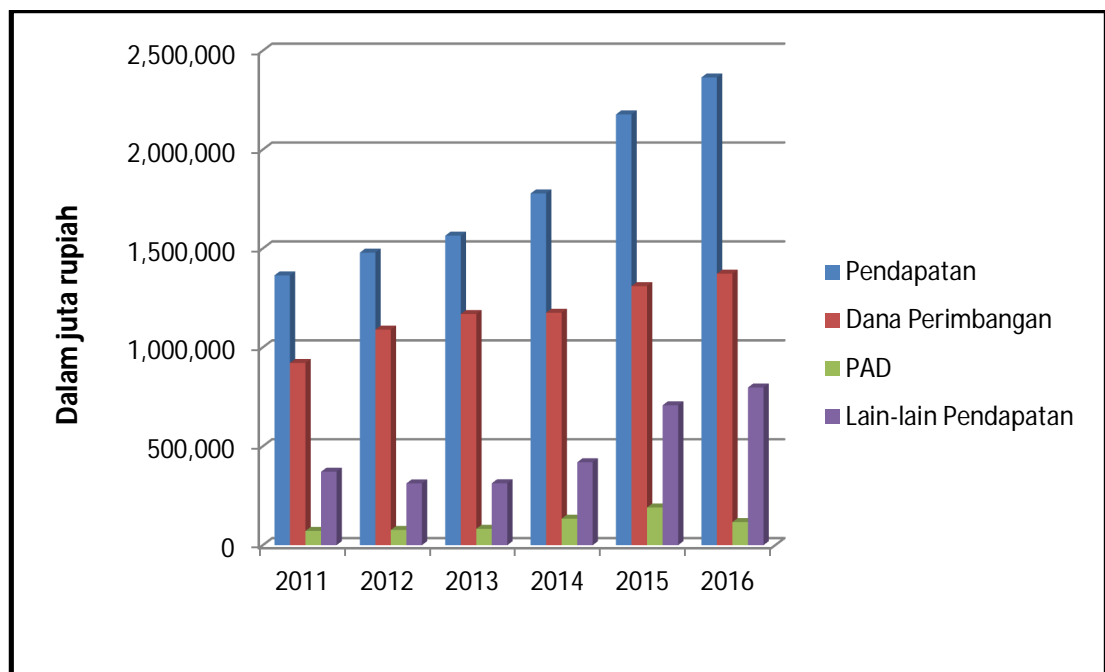
- 1). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara signifikan, pada tahun 2011 sebesar Rp.71.580.476.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.75.874.326.000,- pada tahun 2013 Rp.82.921.358.000,- pada tahun 2014 sebesar Rp.134.024.840.163,- pada tahun 2015 sebesar Rp. 189.435.677.876,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.194.443.122.000,-
- 2). Penerimaan Alokasi Dana Perimbangan di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan secara signifikan. Secara rinci, sebagai berikut:
 - (a). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tahun pada tahun 2011 sebesar Rp. 43,395,134,000,- pada tahun 2012 sebesar Rp. 43.083.187.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.41.269.436.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.32.460.001.777,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.68.201.275.234,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.26.483.384.000,-
 - (b). Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2011 sebesar Rp.792.938.525.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.967.284.829.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.066.318.427.000,- serta pada tahun 2014 sebesar Rp.1.142.586.588.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.1.164.196.398.000,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.1.237.967.327.000,-
 - (c). Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2011 sebesar Rp.80,964,300,000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.74.501.530.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp.61.175.420.000,- serta pada tahun 2014 sebesar Rp.49.932.315.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.77.379.170.000,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.108.346.850.000,-



3). Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2011 sebesar Rp.235,561,248,000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.249.086.862.000,- pada tahun 2013 sebesar Rp.313.084.793.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.419.000.394.011,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.707.207.496.846,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.797.244.574.000,-

Secara umum pos pendapatan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp.1.345.233.534.000,- pada tahun 2012 sebesar Rp.1.409.830.734.000,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.1.564.769.434.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.1.778.004.138.951,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.2.175.576.489,- serta pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.364.485.257.000,-

Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2016 dapat dilihat pada gambar 3.2.



Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten (2016)

Gambar 3.2.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2010-2016 (dalam jutaan rupiah).

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit (di atas 10%), dan (iii) Menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran di atas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada *track* yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap; yakni mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dan layak secara ekonomis. Adapun gambaran perkembangan Indikator Makro

Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Klaten
Tahun 2012-2015

No	Indikator Makro Ekonomi	Realiasi				Asumsi 2016
		2012	2013	2014	2015	
1.	PDRB (Berlaku) (Jutaan Rp.)	21.368.291,95	23.348.880,48	26.110.782,38	29.244.076	32.753.365
2.	PDRB (Konstan) (Jutaan Rp.)	19.102.405,71	20.299.990,96	21.392.250,75	23.531.476	25.884.623
3.	Tk. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	5,79	5,38	5,4	5,55
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,66	7,92	7,75	2,57	
5.	Jumlah Penduduk Miskin (%)	14,63	13,88	13,14	12,48	12,33
6.	Jumlah Pengangguran Terbuka (%)	3,66	5,38	6,21	6,15	6,06
7.	PDRB Per Kapita (Konstan/Rp.000)	4.113.304,55	4.028.840,14	4.131.724,25	4.234.608,36	4.337.492,00
8.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :					
	- pendapatan daerah (Rp.)	1.479.022.039.000	1.512.149.518.000	1.778.004.138.951	2.175.576.489.000	2.364.485.257.000
	- PAD (Rp)	77.185.112.000	82.921.300.000	134.024.840.163	189.435.677.876	194.443.122.000
	- besaran IPM	77,98	78,18	78,38	78,58	78,69
	- UMR (Rp.)	812.000	871.500	1.170.000	1.400.000	1.400.000
10	Berbagai macam besaran ratio & perbandingan-perbandingan					
	- Rasio PAD terhadap APBD	4,93	5,78	5,62	6,69	8,02
	- Rasio Dana Perimbangan terhadap APBD	69,90	69,05	69,70	69,36	56,65
	- Rasio Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap APBD	19,95	25,17	24,68	23,94	32,90

Sumber : Bappeda Kab. Klaten

3.1.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun sedikit mengalami perlambatan seiring dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.

Potensi daerah yang besar, ketersediaan lahan yang cukup memadai dan memiliki letak yang strategis di antara Jogjakarta-Surakarta, menjadikan peluang berkembangnya titik tumbuh ekonomi, yang diyakini mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal secara signifikan. Upaya strategis dan regulasi yang adaptif diharapkan terbentuk, sehingga eksploitasi potensi sumber daya alam terjadi secara bijaksana dan memberikan dampak yang positif dan relevan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta potensi pasar yang semakin meningkat. Struktur ekonomi primer tetap merupakan andalan yang akan



ditingkatkan kualitas dan pemerataannya karena merupakan basis utama ekonomi kerakyatan yang adaptif dengan kondisi lokal, disamping struktur ekonomi sekunder dan tersier diperkirakan akan meningkat pada tahun 2016 kedepan, dengan selain berkembangnya iklim investasi dan usaha jasa serta industri di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan trend perkembangan ekonomi di daerah maupun ekonomi nasional, maka target ekonomi makro berdasarkan asumsi Kabupaten Klaten pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi 5,6 %
- Inflasi 4,35 ± 1%
- Rasio penduduk yang bekerja 0,26%
- Persentase kemiskinan 11,21%

Apabila prospek perekonomian daerah pada tahun 2016 didasarkan pada analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1). Posisi geografis Kabupaten Klaten yang strategis terletak diantara Jogjakarta-Surakarta akan memungkinkan terciptanya titik tumbuh ekonomi serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memungkinkan berkembang menjadi kota satelit dan penyangga bagi kebutuhan barang dan jasa.
- 2). Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintah.
- 3). Tersedianya sarana dan prasarana perekonomian (pasar tradisional, tempat perbelanjaan dan pusat-pusat kawasan ekonomi) dan adanya upaya pemerintah dalam rangka mencukupi kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat.
- 4). Etos kerja, keuletan dan jiwa kewirausahaan masyarakat yang tinggi dalam sektor perekonomian mikro, kecil dan menengah (UMKM) berpengaruh dalam memberikan pertumbuhan makro perekonomian daerah.
- 5). Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang terolah akan memungkinkan peningkatan produktifitas dan tergalinya potensi-potensi guna menciptakan produk unggulan daerah.
- 6). Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Klaten serta upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis kerakyatan akan menjadi sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
- 7). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah cukup tinggi.
- 8). Adanya kewenangan dalam menyusun peraturan perundangan dan kebijakan daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah.
- 9). Nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah tetap terpelihara dengan baik.



- 10). Potensi kepariwisataan yang bervariasi menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.
- 11). Adanya infrastruktur dasar publik yang cukup memadai dan terbukanya akses ke setiap wilayah.

b. Kelemahan

- 1). Masih terbatasnya para pelaku UMKM dalam mengakses sumber daya produktif (modal, teknologi, informasi dan pasar).
- 2). Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran
- 3). Belum meratanya kualitas pendidikan dan akses pelayanan kesehatan antar wilayah.
- 4). Belum terciptanya pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka keruangan/wilayah pembangunan sampai tingkat desa
- 5). Masih terbatasnya akses data dan informasi pendukung dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah baik sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan pengembangan.
- 6). Belum optimalnya pertumbuhan kawasan ekonomi wilayah dan produk unggulan daerah yang memiliki daya tarik, daya tahan dan daya saing.
- 7). Belum optimalnya pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

B. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1). Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- 2). Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan ruang lebih besar untuk melakukan penggalan sumber-sumber keuangan dari pajak dan retribusi daerah secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3). Semakin menguatnya pengintegrasian perekonomian dunia yang ditandai dengan perekonomian global yang memperbesar akses pasar bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Kabupaten Klaten.
- 4). Terjalannya kerja sama antar daerah dalam Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN akan semakin menciptakan sinergisitas pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah regional di Wilayah Solo Raya yang lebih baik.



- 5). Terciptanya iklim kondusif atas dasar pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha yang saling menguntungkan akan lebih mendorong tumbuhnya iklim investasi dan mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 6). Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

b. Ancaman

- 1). Semakin menguatnya daya saing terhadap produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dari luar Kabupaten Klaten baik dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.
- 2). Belum optimalnya *deregulasi dan debirokratisasi* investasi daerah serta masih adanya peraturan-peraturan daerah yang *kurang kondusif* dalam mendorong penciptaan investasi.
- 3). Adanya kebijakan pemerintah (kenaikan harga minyak bumi mentah dan resesi ekonomi dunia) dapat berdampak terhadap kenaikan harga (inflasi) yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
- 4). Semakin intensifnya daerah-daerah lain dalam melakukan kebijakan *deregulasi dan debirokratisasi* guna dalam memberikan kemudahan berinvestasi di daerah yang bersangkutan.
- 5). Flutuatifnya harga minyak internasional dan pangan yang dapat mengakibatkan kenaikan harga BBM dan impor barang.
- 6). Flutuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
- 7). Adanya keberlanjutan dari krisis keuangan global yang akan berdampak pada sendi-sendi perekonomian nasional.
- 8). Naiknya harga minyak dunia yang berdampak pada naiknya harga BBM secara nasional.

3.1.2.1. TANTANGAN UTAMA

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal maka Kerangka Ekonomi Makro Daerah diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan utama di antaranya sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2017 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Klaten khususnya bagi UMKM;
2. Ketergantungan bahan bakar impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
3. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas di Kabupaten Klaten;



4. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;

B. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Secara normatif pertumbuhan ekonomi makro daerah yang selalu meningkat diharapkan tidak hanya meningkatkan arus produksi dan distribusi barang/jasa dari dan ke dalam daerah Kabupaten Klaten namun juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara normatif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan daya beli masyarakat meningkat, inflasi dapat dikendalikan, jumlah pengangguran dan penduduk miskin menurun.

Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai universal yang berkembang sekarang (demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, kelestarian lingkungan, dsbnya).

C. Stabilitas Ekonomi

Keberlangsungan perekonomian tidak hanya memerlukan stabilitas ekonomi makro namun juga stabilitas kondisi keamanan dan politik. Hal ini dalam rangka tetap menjamin terpeliharanya potensi, aset-aset dan hasil-hasil pembangunan. Kondisi perekonomian riil yang fluktuatif yang ditandai dengan harga kebutuhan bahan pokok, ketersediaan barang dan jasa dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam mencapai target indikator perekonomian makro.

3.1.3. SASARAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian Kabupaten Klaten di masa depan diarahkan menjadi ekonomi daerah yang mandiri dengan ditopang pertumbuhan ekonomi kreatif. Kerangka ini menjelaskan bahwa ekonomi daerah diharapkan akan terbentuk dengan landasan dan struktur perekonomian yang kokoh, kekuatan fiskal daerah, PDRB perkapita meningkat dengan kontribusi terbesar bersandar pada kemandirian ekonomi kerakyatan. Struktur ekonomi tidak hanya didominasi oleh sektor primer, tetapi juga didukung oleh sektor sekunder dan tersier terutama melalui sektor dan subsektor andalan dan alternatif pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Pada aspek penerimaan daerah (pemerintah) diharapkan terjadi pengurangan ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat, dan sebaliknya Pendapatan Asli Daerah serta sumber daya daerah lainnya akan menjadi kekuatan potensial Kabupaten Klaten di masa datang.

Selain itu Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat daya beli masyarakat serta tetap menjaga stabilitas harga dalam rangka meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Klaten sebesar 1,96% pada Tahun 2011, pada tahun 2012 mencapai 5,54%, pada tahun 2013 mencapai 5,79% , pada tahun 2014 mencapai 5,38% , pada tahun 2015 mencapai 5,4% dan pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai



5,55%. Namun demikian target sebesar tersebut hanya akan tercapai apabila didukung stabilitas ekonomi nasional, politik dan keamanan, serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Terkait dengan target tersebut, mengingat kekuatan dan peluang serta kelemahan dan tantangan Kabupaten Klaten maka laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong kegiatan investasi di sektor industri pertanian, industri dan perdagangan yang berorientasi ekspor serta pengembangan pariwisata. Peluang investasi dalam industri pertanian yang berorientasi ekspor salah satunya dilakukan dengan kemudahan regulasi-regulasi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dengan langkah RIA (*Regulatory Investment Assessment*). Kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah serta antar sektor diharapkan tidak terjadi lagi. Kepastian hukum, penyehatan iklim ketenagakerjaan, peningkatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan prosedur perijinan, perpajakan dan kepabeanan serta peningkatan fungsi intermediasi sektor perbankan dengan sektor dunia usaha merupakan langkah utama guna mendorong kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kualitas pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pemerataan pembangunan diupayakan dengan mendorong kegiatan sektor pertanian dan ekonomi yang berbasis perdesaan dan kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru dengan mengendalikan Upah Minimal Regional (UMR) agar tidak terjadi laju inflasi, memastikan biaya-biaya non UMR dengan mengarahkan pada peningkatan produktifitas tenaga kerja dan membangun hubungan industri yang harmonis.

Kualitas pertumbuhan daerah juga diupayakan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi terhadap sumber daya produktif. Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengurangan pengangguran diupayakan dengan berbagai kebijakan lintas sektoral yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, membuka peluang pemberdayaan masyarakat miskin serta pemberian perlindungan/proteksi sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga dengan berbagai regulasi yang memungkinkan tumbuhnya sektor-sektor riil dan pemantauan perkembangan harga. Stabilitas ekonomi di masa mendatang juga akan didukung dengan semakin menguatnya perkembangan perdagangan dan jasa keuangan di daerah.

Oleh sebab itu peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah akan diupayakan dan ditekankan pada (1) penguatan struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan sektor pertanian yang dilakukan secara terpadu dengan pengembangan agroindustri dan agribisnis berbasis agrominapolitan agar produktivitas, nilai tambah dan daya saing semakin banyak dinikmati para pelaku ekonomi lokal, (2) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar, sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (3) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan perkuatan permodalan dan akses pasar melalui gerakan perkoperasian dan mengembangkan jenis koperasi yang ada antara lain : Koperasi Simpan Pinjam,



Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah , (4) peningkatan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, (5) memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah berbasiskan pada peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan (6) peningkatan terhadap akses sumber daya produktif.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017, maka sasaran ekonomi pada tahun 2017 sebagai berikut :

1). Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di berbagai daerah dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat masih adanya kebijakan yang tidak *pro-poor* dan sisi lain disebabkan penyebaran penduduk yang tidak merata, juga terbatasnya lapangan kerja disamping jumlah angkatan kerja lebih banyak. Berdasarkan hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2011 di Kabupaten tercatat sebanyak 133.771 RTS (rumah tangga sasaran) dengan perincian, untuk kategori Rumah Tangga Miskin sebanyak 48.455 RTS, Rumah Tangga Hampir Miskin sebanyak 44.512 RTS dan Rumah Tangga Rentan Miskin sebanyak 44.805 RTS. Tahun 2017 ditarget presentase jumlah penduduk miskin tinggal 11,21%. Dari data ini menunjukkan bahwa masih besarnya tantangan Pemerintah Kabupaten Klaten di dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

2). Berkurangnya Jumlah Pengangguran Terbuka

Dengan berkurangnya lapangan kerja di sektor formal telah mengakibatkan munculnya lapangan kerja di sektor informal (maraknya Pedagang Kaki Lima, semakin banyaknya wiraswasta dan kegiatan Usaha Rumah Tangga Mikro Kecil Menengah). Meningkatnya kegiatan PKL di beberapa tempat sampai menyebar di wilayah ibu kota kecamatan. Tumbuhnya sektor informal tersebut satu sisi telah ikut berperan sebagai katup pengaman atas berkurangnya kemampuan sektor formal dalam menyediakan kesempatan kerja namun di pihak lain sering berbenturan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada upaya ketertiban dan keindahan kota. Dengan mengingat realita demikian maka diupayakan terciptanya regulasi dan kebijakan daerah yang berdampak pada pengurangan pengangguran terbuka namun sekaligus tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 70,03. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 mencapai 4,50% dan pada tahun 2011 turun menjadi 4,35%, dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 3,95% serta tahun 2015 mencapai 3,93%. Serta tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 akan ditekan mendekati 5,8%.

Mengingat letak geografi, potensi, kekuatan, peluang dan tantangan Kabupaten Klaten maka sektor kepariwisataan daerah yang belum optimal diupayakan dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata yang bervariasi di wilayah kabupaten ini diharapkan terangkai dalam koridor pariwisata Jogjakarta-Surakarta yang semakin berkembang sekarang ini. Kerjasama *Java Promo* yang melibatkan



Kabupaten Klaten salah satunya diharapkan mampu merealisasikan upaya pengembangan pariwisata.

Dalam kenyataannya sektor UMKM dapat bertahan walaupun kondisi perekonomian nasional dan global sedang tidak stabil. Walaupun sektor pertanian sudah tidak mampu menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB namun mengingat realita sektor ini masih dominan, maka upaya intensifikasi pertanian khususnya non beras dan pendirian industri berbasis pertanian diharapkan akan memberikan peluang kesempatan kerja. Kegiatan penggalan dan implementasi produk unggulan daerah diharapkan mendapat perhatian sehingga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.

3). Terjaganya Stabilitas Harga

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah merupakan parameter kondisi makro perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun perkembangan harga (*inflasi*) juga tinggi akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Dalam dimensi makro inflasi yang tinggi juga dapat mengurangi daya saing atas produk barang dan jasa.

Secara umum pada tahun 2011 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 7,9% dan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 7,13 persen berarti ada penurunan. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Klaten didorong adanya penurunan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada penurunan BBM nasional, serta harga Elpiji 12 Kg, serta tekanan nilai Dollar AS terhadap rupiah di tengah ketidak-pastian pemulihan ekonomi global, adanya gangguan cuaca dan infrastruktur yang mengganggu pasokan komoditas, penetapan HPP untuk pengadaan Bulog, dan pengekatan infor pemerintah pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 mencapai 2,37 persen, sehingga untuk tahun 2017 harus dapat menekan laju inflasi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah agar tercapai hasil dan daya-guna dalam penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja, maka aspek yang menjadi landasan adalah :

1. Efektif
2. Efisien
3. Prioritas
4. Perspektif
5. Investasi
6. Berimbang
7. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dasar hukum penyusunan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut bahwasanya APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran dalam bentuk Peraturan Daerah.



Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang ada dinyatakan secara tegas bahwa APBD disusun berdasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sumber-sumber pendapatan daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - 1). Pajak Daerah
 - 2). Restribusi Daerah
 - 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
 - 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
 - 1). Bagi Hasil Pajak
 - 2). Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
 - 3). Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 4). Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagai upaya untuk menopang pembiayaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2015 sebesar Rp.91.861.730.154,- dan pada tahun 2016 diperkirakan akan menjadi sebesar Rp.797.244.574.000,- serta pada tahun 2017 diprediksi akan mencapai Rp.137.022.832.000,-

Dengan melihat kondisi kerangka ekonomi makro tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Klaten tetap optimis bahwa kondisi perekonomian di tahun 2016 diprediksi tetap dapat dipertahankan seperti tahun 2015. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti, baik ditingkat nasional maupun global, mengingat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Terkait dengan Pendapatan Daerah dalam satu tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Daerah, diantaranya menyangkut permasalahan aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga perbankan dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Hal ini agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan. Namun demikian untuk mempertahankan target pendapatan daerah tersebut tetap diperlukan kondisi kestabilan ekonomi, politik dan keamanan lokal. Secara rinci realisasi pendapatan



daerah pada Tahun 2013 dan 2014 serta asumsi Tahun 2015 s/d 2016 ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Klaten maka beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Target pendapatan daerah di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2017 mendekati Rp.1,518 trilyun, berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan kebijakan, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i)mulai tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, (ii) secara bertahap dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
3. Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhanpenyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Klaten.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkat besarnya sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).



6. Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
7. Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
8. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan tetap karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
9. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
 - a. Perbaikan sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
10. Peningkatankualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
11. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Klaten, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp.) (dalam ribuan)			Proyeksi (Rp.) (dalam ribuan)	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi APBD Tahun 2016	Prediksi Tahun 2017
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	82.921.358	134.024.840	190.605.637	115.128.215	116.843.122
1.1.1	Pajak Daerah	35.525.000	56.727.250	68.201.277	67.160.000	67.160.000
1.1.2	Retribusi Daerah	23.848.850	18.046.359	21.894.721	22.671.627	22.671.627
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.916.000	6.902.381	7.477.951	7.043.425	7.043.425
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.831.500	52.348.849	93.031.687	97.568.069	19.968.069
1.2	Dana Perimbangan	1.168.763.283	1.224.978.905	1.279.990.558	1.327.797.561	1.264.450.711
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.268.436	32.460.002	38.414.990	26.483.384	26.483.384
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.066.318.427	1.142.586.588	1.164.196.398	1.237.967.327	1.237.967.327
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.175.420	49.932.315	77.379.170	108.346.850	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	313.084.793	419.000.394	707.207.496	797.244.574	137.022.832
1.3.1	Hibah	8.000.000	17.795	1.779.632	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	61.084.338	72.550.328	142.333.018	137.022.832	137.022.832
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.721.763	307.400.751	413.181.317	416.355.317	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.278.692	39.031.520	41.238.559	-	-

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi (Rp.) (dalam ribuan)			Proyeksi (Rp.) (dalam ribuan)	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi APBD Tahun 2016	Prediksi Tahun 2017
1.3.7	Dana Desa	-	-	108.6764.969	243.866.425	-
A	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)	1.564.769.434	1.778.004.138	2.177.803.691	2.364.485.257	1.518.316.665

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan akan berdampak negatif apabila pendapatan negara mengalami fluktuatif akibat pengaruh global. Harga minyak mentah dunia yang mencapai di atas US\$ 100/barrel di pasaran dunia dan krisis keuangan global akan berdampak terhadap postur APBN 2016. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Apabila *asumsi* ini benar-benar terjadi maka bisa jadi kontribusi Dana Perimbangan dalam struktur APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016 akan terjadi penurunan atau minimal sama dengan tahun 2017.

Mendasarkan data-data di atas disimpulkan bahwa kontribusi PAD masih berkisar antara 5,18–6,69 % sedangkan kontribusi Dana Perimbangan berkisar antara 69,4–81,96 %, serta kontribusi Lain-lain Pendapatan berkisar antara 9,22–24,68 % dalam struktur APBD.

Dengan demikian peran PAD Kabupaten Klaten sangat diharapkan mampu mengamankan APBD, dan diperlukan penggalan sumber-sumber pendanaan dari luar APBD. Salah satu sumber pembiayaan di luar APBD dapat berupa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), kemitraan dengan dunia swasta/usaha, kemitraan dengan masyarakat, peningkatan swadaya masyarakat dan sebagainya. Dengan kondisi demikian ini, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya baik PMA maupun PMDN dalam skala luas. Deregulasi kebijakan-kebijakan daerah yang mengarah pada pemberian insentif, kesiapan dan sinergisitas antar SKPD serta langkah jemput bola pemerintah daerah kepada dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan investasi tersebut.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pola penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Struktur belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.4



Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2013-2017

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.) (dalam ribuan)			Proyeksi (Rp.) (dalam ribuan)	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi APBD Tahun 2016	Asumsi Tahun 2017
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.251.486.937	1.123.456.889	1.504.110.830	2.020.963.730	1.292.510.637
2.1.1	Belanja Pegawai	1.115.687.957	954.913.787	1.180.489.400	1.548.116.380	1.153.499.316
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	16.998.800	15.060.600	43.174.386	21.020.580	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.563.510	10.411.745	10.174.075	10.439.500	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	574.000	429.906	613.004	8.983.162	8.983.162
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	83.406.977	141.824.750	269.659.963	429.721.020	127.345.071
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	23.375.692	816.100	-	2.683.087	2.683.087
2.2	Belanja Langsung	376.997.953	281.330.923	573.675.165	402.371.678	-
2.2.1	Belanja Pegawai	23.422.938	18.965.092	25.991.120	27.756.580	-
2.2.2	Belanja Barang/Jasa	171.772.340	140.620.242	241.611.733	233.784.902	-
2.2.3	Belanja Modal	181.802.673	121.745.589	306.072.310	140.830.195	-
B	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	1.628.484.800	1.404.787.812	2.077.785.996	2.423.335.408	1.292.510.637

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Secara umum Belanja Daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten.

Mendasarkan pada permasalahan pokok Kabupaten Klaten, tuntutan peningkatan pelayanan publik dan sarana prasarana dasar yang dihadapi Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka diprediksikan akan terjadi kenaikan jumlah Belanja Daerah di banding tahun 2017.

Dalam rangka pengelolaan Belanja Daerah maka kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh antara lain :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. Penggunaan anggaran Tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.



3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.2.3.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan pos baru dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk menutup *defisit* anggaran atau sebagai pos cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus anggaran. Dalam pola penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:



Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2013- 2017

No.	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Realisasi (Rp) (dalam ribuan)			Proyeksi (Rp.) (dalam ribuan)	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	79.715.456	-	286.555.911	67.050.151	15.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	23.614.421	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	2.143.317	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.715.456	-	312.313.650	67.050.151	15.000.000

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Mendasarkan kondisi tersebut maka kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
- b. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - ❖ Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - ❖ Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- c. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.

- d. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diarahkan untuk penyertaan modal Tahun 2017. Struktur Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2017

No.	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi (Rp.) (dalam ribuan)			Proyeksi (Rp.) (dalam ribuan)	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi APBD Tahun 2016	Asumsi Tahun 2017
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000	6.000.000	-	5.000.000	5.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.000.000	2.000.000	4.961.000	3.200.000	7.200.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran Hutang Belanja	-	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Kewajiban Daerah	-	3.928.415	-	-	-
E	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000	11.928.415	4.961.000	8.200.000	12.200.000
F	PEMBIAYAAN NETO (D-E)	63.715.456	(11.928.415)	307.352.650	58.850.151	2.800.000

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

Mendasarkan kondisi tersebut maka kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 antara lain diarahkan untuk :

- a. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.
- b. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).



3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Secara keseluruhan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dirinci pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Realisasi (Rp.) (dalam ribuan)			Rencana	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	82.921.358	134.024.840	190.605.637	115.128.215	116.843.122
1.1.1	Pajak Daerah	35.525.000	56.727.250	68.201.277	67.160.000	67.160.000
1.1.2	Retribusi Daerah	23.848.850	18.046.359	21.894.721	22.671.627	22.671.627
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.916.000	6.902.381	7.477.951	7.043.425	7.043.425
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.831.500	52.348.849	93.031.687	97.568.069	19.968.069
1.2	Dana Perimbangan	1.168.763.283	1.224.978.905	1.279.990.558	1.327.797.561	1.264.450.711
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.268.436	32.460.002	38.414.990	26.483.384	26.483.384
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.066.318.427	1.142.586.588	1.164.196.398	1.237.967.327	1.237.967.327
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.175.420	49.932.315	77.379.170	108.346.850	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	313.084.793	419.000.394	707.207.496	797.244.574	137.022.832
1.3.1	Hibah	8.000.000	17.795	1.779.632	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	61.084.338	72.550.328	142.333.018	137.022.832	137.022.832
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.721.763	307.400.751	413.181.317	416.355.317	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.278.692	39.031.520	41.238.559	-	-
1.3.7	Dana Desa	-	-	108.676.499	243.866.425	-
A	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 s/d 1.3)	1.564.769.434	1.778.004.138	2.177.803.691	2.364.485.257	1.518.316.665
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.251.486.937	1.123.456.889	1.504.110.830	2.020.963.730	1.292.510.637
2.1.1	Belanja Pegawai	1.115.687.957	954.913.787	1.180.489.400	1.548.116.380	1.153.499.316
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	16.998.800	15.060.600	43.174.386	21.020.580	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.563.510	10.411.745	10.174.075	10.439.500	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	574.000	429.906	613.004	8.983.162	8.983.162
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	83.406.977	141.824.750	269.659.963	429.721.020	127.345.071
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	23.375.692	816.100	-	2.683.087	2.683.087
2.2	Belanja Langsung	376.997.953	281.330.923	573.675.165	402.371.678	-
2.2.1	Belanja Pegawai	23.422.938	18.965.092	25.991.120	27.756.580	-
2.2.2	Belanja Barang/Jasa	171.772.340	140.620.242	241.611.733	233.784.902	-
2.2.3	Belanja Modal	181.802.673	121.745.589	306.072.310	140.830.195	-
B	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)	1.628.484.800	1.404.787.812	2.077.785.996	2.423.335.408	1.292.510.637
C	Surplus/(Defisit) (A-B)	(63.715.366)		100.017.695	246.371.227	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	79.715.456	-	286.555.911	67.050.151	15.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	23.614.421	-	-

No.	Uraian	Realisasi (Rp.) (dalam ribuan)			Rencana	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Asumsi APBD Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
D	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.715.456	-	312.313.650	67.050.151	15.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000	6.000.000	-	5.000.000	5.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.000.000	2.000.000	4.961.000	3.200.000	7.200.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran Hutang Belanja	-	-	-	-	-
E	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000	11.928.415	4.961.000	8.200.000	12.200.000
F	PEMBIAYAAN NETO (D-E)	63.715.456	(11.928.415)	307.352.650	58.850.151	2.800.000
G	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (F+C)	79.715.456	361.287.912	407.370.346	-	228.606.027

Sumber : DPPKAD Kab. Klaten Tahun 2016

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

4.1. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2017 merupakan masa transisi pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode tahun 2016-2021. RKPd Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI
DAN BERDAYA SAING”**

Makna yang termuat dalam visi pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. **MAJU**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah Peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. **MANDIRI**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.
- c. **BERDAYA SAING**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif. Indikator tercapainya masyarakat Kabupaten Klaten yang berdaya saing antara tingginya rasio kelulusan pendidikan S1/2/3 dan rasio ketergantungan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Peningkatan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

5. Peningkatan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Peningkatan kapasitas pelayanan publik.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka sasaran kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju Wajar Dikdas 12 tahun;
 - b. Peningkatan budaya baca masyarakat;
 - c. Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan;
 - e. Peningkatan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - f. Peningkatan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung terhadap pemerintahan yang baik dan bersih;
 - b. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur;
 - c. Peningkatan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal;
 - d. Peningkatan tata pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - e. Peningkatan kemampuan anggota DPRD yang didukung peningkatan fasilitas kinerja;
 - f. Peningkatan penghargaan berdasarkan beban kerja dan prestasi kinerja;
 - g. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa;
 - i. Peningkatan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - j. Peningkatan dan mengembangkan pendapatan dan aset daerah.
3. Peningkatan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal; dengan penekanan sasaran pada :
 - a. Peningkatan kapasitas dan tata kelola ekonomi daerah berbasis pada agropolitan;
 - b. Peningkatan dan mengembangkan produktivitas modal daerah;
 - c. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan;
 - d. Peningkatan kapasitas pemberdayaan dan perlindungan petani;
 - e. Peningkatan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal;



- f. Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
 - g. Pengembangan pusat promosi dan perdagangan;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat;
 - i. Peningkatan dan pengembangan destinasi dan promosi kepariwisataan; dan
 - j. Peningkatan dan mengembangkan industri kreatif dan kepariwisataan.
4. Peningkatan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat; dengan penekanan sasaran pada :
- a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmik dan rigid/beton) dan jembatan, serta bangunan gedung pemerintah;
 - b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - c. Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan (hotmik dan rigid/beton) dan jembatan, serta bangunan gedung pemerintah;
 - d. Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - e. Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - f. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
 - h. Peningkatan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat;
 - i. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum jalan, makam;
 - j. Peningkatan ketersediaan kebutuhan energi listrik perdesaan;
 - k. Peningkatan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi;
 - l. Pengembangan sumber daya energi terbarukan; dan
 - m. Peningkatan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan dan ruang publik.
5. Peningkatan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah; dengan penekanan sasaran pada :
- a. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai;
 - b. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis *agro forestry*;
 - d. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Peningkatan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana;
 - f. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana;
 - g. Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa;
 - h. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan;



- i. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana; dan
 - j. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian kelaikan kondisi fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis bencana.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian; dengan penekanan sasaran pada :
- a. Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan;
 - c. Peningkatan moralitas, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda;
 - d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
 - e. Peningkatan jaminan sosial dan perlindungan sosial;
 - f. Efektivitas pengawasan internal yang didukung aturan pelaksanaan yang memadai;
 - g. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat;
 - h. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana peribadatan;
 - i. Peningkatan dan mengembangkan norma-norma dan pendidikan sosial keagamaan;
 - j. Peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - k. Peningkatan pelestarian dan mengembangkan budaya daerah; dan
 - l. Peningkatan dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
7. Peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dengan penekanan sasaran pada :
- a. Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender;
 - b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - c. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan perempuan;
 - e. Peningkatan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif;
 - f. Mendorong dan memastikan anak, mendapatkan: 1. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, 2. Perlindungan khusus, 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan, serta 5. Peningkatan dan penguatan kelembagaan anak, dan
 - g. Mendorong dan menguatkan kondisi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
8. Peningkatan kapasitas pelayanan publik, dengan penekanan sasaran pada :
- a. Peningkatan kualitas layanan publik;
 - b. Peningkatan cakupan dan kualitas standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial);
 - c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; dan



- d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan berkualitas.

Pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Klaten dan difokuskan pada "***Peningkatan dan Pemantapan Kapasitas Pembangunan Berbasis Pedesaan dan Tata kelola Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat***". Sasaran yang ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana tujuan kebijakan diperlukan strategi pemecahan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;
2. Peningkatan SDM tenaga kependidikan baik bagi pendidikan formal maupun non formal serta peningkatan etos kerja;
3. Peningkatan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai luhur berdasar pada kearifan lokal;
5. Penataan organisasi pemerintahan yang selaras dengan beban kerja;
6. Penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah, peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan secara umum;
7. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kapasitasnya;
9. Peningkatan ketercukupan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan;
10. Peningkatan kapasitas perekonomian daerah berbasis pada agropolitan dan klaster;
11. Peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal;
12. Peningkatan dan pengembangan industri kreatif dan kepariwisataan;
13. Peningkatan kemandirian dan kedaulatan pangan;
14. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
15. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung;
16. Peningkatan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi (sampah, drainase, MCK) dan permukiman (rumah tidak layak huni);
17. Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau (taman kota, hutan kota, trotoar);
18. Peningkatan kapasitas layanan transportasi ;
19. Peningkatan dan pengkayaan hutan rakyat;
20. Peningkatan pelestarian daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai;
21. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan;
22. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis pengurangan resiko bencana;
23. Peningkatan kapasitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
24. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban;
25. Peningkatan pengawasan Internal serta penataan dan penyempurnaan kebijakan pengawasan dan prosedurnya;



26. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan;
27. Peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama;
28. Peningkatan kualitas kelembagaan keagamaan;
29. Pemenuhan hak anak;
30. Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan;
31. Peningkatan dan penguatan kelembagaan keluarga;
32. Peningkatan tumbuh kembang jaringan usaha perempuan;
33. Peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
34. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat difabel;
35. Peningkatan kualitas layanan perijinan di segala bidang berbasis teknologi informasi;
36. Peningkatan dan pengembangan standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial);
37. Penguatan kapasitas organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah serta peningkatan disiplin dan kualitas pelayanan secara umum

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut di atas tetap mempertimbangkan 5 (lima) Prinsip Pengarusutamaan yang mendasari Pola Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pola Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip Pengarusutamaan dimaksud sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat
Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah harus mengakomodasi partisipasi masyarakat sehingga diperlukan kepekaan dalam mengakomodasi aspirasi positif *stakeholder* yang muncul.
2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggap Kebencanaan
Pelaksanaan pembangunan harus mampu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan potensi kebencanaan wilayah, baik bencana alam, bencana sosial maupun kejadian luar biasa (KLB).
3. Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan adalah setara baik dalam pemerintahan, pembangunan maupun interaksi sosial.
4. Pengarusutamaan Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*)
Penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada asas-asas penyelenggaraan *good governance*.
5. Pengarusutamaan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah
Pelaksanaan pembangunan daerah harus berkomitmen untuk memadu-serasikan pembangunan yang adil dan merata antara sektor perdesaan dan perkotaan mengacu pada kaidah penataan ruang.

Tujuan, strategi, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2017 merupakan upaya guna mencapai target **sasaran pembangunan daerah tahun 2017** yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%;
- b. Laju inflasi sebesar $4,35 \pm 1\%$;
- c. Menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 11,21%;
- d. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi $\pm 5,8\%$; dan
- e. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten merupakan sub sistem pembangunan nasional dan sub sistem pembangunan regional Jawa Tengah. Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 merupakan penjabaran Tahap III RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari.

Disisi lain, pembangunan Jawa Tengah tahun 2017 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015–2019 dan RKP Tahun 2017. Untuk itu pembangunan Jawa Tengah tahun 2017 disusun dengan memperhatikan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam strategi pembangunan yang mengarah pada *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro environment*; kebijakan percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)*, keadilan untuk semua (*justice for all*), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan wilayah guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi implementasi rencana tata ruang.

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang RPJMNas ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu IPTEK yang terus meningkat, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
Dengan penekanan sasaran pada Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya;
Dengan penekanan sasaran pada : Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi; dan Reformasi Birokrasi.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
Dengan penekanan sasaran pada : Daerah Perbatasan; Daerah Tertinggal; Antar Kelompok Pendapatan; Desa dan Kawasan Pedesaan; Perkotaan; dan

Pengembangan Konektivitas Nasional melalui pendekatan dimensi pemerataan dan kewilayahan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
Dengan penekanan sasaran pada Kepastian dan Penegakan Hukum.
5. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
Dengan penekanan sasaran pada : Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Pendidikan; dan Perumahan dan Permukiman melalui pendekatan dimensi pembangunan manusia.
6. Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional;
Dengan penekanan sasaran pada : Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK); Pembangunan Pariwisata; dan Peningkatan Iklim Investasi melalui pendekatan dimensi pembangunan sektor unggulan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Dengan penekanan sasaran pada : Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Kemaritiman dan Kelautan; dan Peningkatan Ekspor Non Migas melalui pendekatan dimensi pembangunan sektor unggulan.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional; dan
Dengan penekanan sasaran pada Revolusi Mental melalui pendekatan pembangunan manusia.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan pendidikan kebhinekaan.

Sehingga dengan tetap mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018, maka ***Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017*** antara lain :

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju Wajar Dikdas 12 Tahun;
 - b. Peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat (pencari kerja trampil, petani, buruh dan pelaku UMKM);
 - c. Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan; dan
 - e. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
2. **Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan**, melalui :
 - a. Penataan organisasi pemerintahan yang selaras dengan beban kerja; dan
 - b. Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kapasitasnya
3. **Program Pengembangan Ekonomi Daerah**, melalui :
 - a. Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian, ikm/umkm dan koperasi berbasis klaster;
 - b. Pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis pada agro bisnis, agro industri, agro teknologi, agro produksi dan agro wisata;



- c. Peningkatan dan pengembangan destinasi dan promosi kepariwisataan;
 - d. Pengembangan pusat promosi dan perdagangan;
 - e. Pengembangan diversifikasi dan keanekaragaman pangan;
 - f. Peningkatan dan pengembangan pola kemitraan berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR);
 - g. Peningkatan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
 - h. Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam sistem agro industrialisasi perdesaan; dan
 - i. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan asli daerah.
- 4. Program Peningkatan Infrastruktur Publik**, melalui :
- a. Peningkatan kualitas jalan (hotmik dan *rigid*/beton) dan jembatan;
 - b. Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendung, waduk, embung dan saluran);
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi;
 - d. Penataan kawasan perkotaan dan ruang publik;
 - e. Peningkatan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat;
 - f. Peningkatan pengelolaan persampahan; dan
 - g. Peningkatan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa mandiri energi.
- 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, melalui :
- a. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai;
 - b. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry;
 - d. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - e. Penataan daerah rawan bencana dan desa tangguh bencana; dan
 - f. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan berkelanjutan.
- 6. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat**, melalui :
- a. Peningkatan wawasan keagamaan;
 - b. Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral;
 - c. Peningkatan kerukunan antar umat beragama;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. Penguatan kelembagaan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 7. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**, melalui :
- a. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - b. Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender;
 - c. Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - d. Peningkatan kesehatan reproduksi perempuan;
 - e. Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak serta inisiasi menyusui dini;
 - f. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Peningkatan dan pemberdayaan kaum difabel;
 - h. Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan perempuan; dan



- Peningkatan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif.

8. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, melalui:

- Penyusunan standar operasional dan prosedur perizinan;
- Penyusunan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Peningkatan dan pengembangan desentralisasi pelayanan terpadu di kecamatan; dan
- Peningkatan dan pengembangan sistem informasi dan manajemen perizinan.

4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) harus memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun sasaran dan program/kegiatan pembangunan daerah yang akan dituangkan ke dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur
- b. Bidang Pemerintahan
- c. Bidang Perekonomian
- d. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Perlu mengoptimalkan pengelolaan bantuan keuangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing serta pembangunan yang berkesinambungan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendukung Peningkatan dan Pemantapan Kapasitas Pembangunan Berbasis Pedesaan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, maka program dan kegiatan prioritas daerah dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Rencana program dan kegiatan yang dijabarkan ke dalam rumusan pada masing-masing SKPD telah menerapkan beberapa pendekatan perencanaan secara komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, bawah atas (*bottom up*) dan atas bawah (*top down*) yang disertai sasaran dan target kinerja yang akan dicapai serta indikasi anggaran indikatif yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2017. Rumusan rencana program dan kegiatan secara detail dijabarkan ke dalam **Lampiran II** pada keputusan peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

Adapun secara umum rumusan program pada masing-masing urusan bidang diuraikan sebagai berikut :

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan difokuskan pada program pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dan manajemen pelayanan pendidikan.

Fokus program tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian misi mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya dengan penekanan prioritas peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajib belajar 12 tahun; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dengan peningkatan prasarana dan sarana perpustakaan di tingkat sekolah. Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mencakup TK Negeri, SMP Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar dan Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan (UPTD).

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program dijabarkan dalam rumusan pada Lampiran II.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Klaten dengan dukungan pencapaian target mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya dengan penekanan prioritas peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui



peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; peningkatan kapasitas bagi tenaga medis dan non medis; optimalisasi peran dokter dan bidan; serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Adapun fokus program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- l. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
- m. Program Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan;
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- p. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; dan
- q. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- c. Pembangunan turap/talud/bronjong;
- d. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan;
- f. Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- g. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- h. Pengendalian Banjir;
- i. Pembangunan infrastruktur pedesaan;
- j. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;



- k. Pengendalian pemanfaatan ruang;
- l. Perencanaan Tata Ruang;

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

4. Urusan Sosial

Urusan bidang Sosial pada tahun 2017 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
- d. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
- e. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- f. Peningkatan keagamaan;
- g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana;
- i. Penanganan darurat bencana;
- j. Peningkatan pengelolaan logistik.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Fokus program pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman diarahkan pada program pengembangan perumahan. Sedangkan indikasi kegiatan program sebagaimana tersebut pada lampiran.

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat difokuskan pada program :

- a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- b. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- c. Pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. Pendidikan politik masyarakat;
- f. Peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik;
- g. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- h. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut dalam lampiran.

5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Fokus program yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peningkatan kesempatan kerja;
- c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.



Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fokus program yang akan dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir dalam lampiran.

3. Urusan Pangan

Fokus program pada urusan pangan adalah peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Indikasi kegiatan pada program ini sebagaimana terlampir.

4. Urusan Pertanahan

Fokus program pada urusan pertanahan adalah dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Indikasi kegiatan yang ada pada program ini sebagaimana terlampir.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan bidang lingkungan hidup difokuskan pada pelaksanaan program :

- a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
- b. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- f. Pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Indikasi kegiatan yang ada pada program diatas terjabarkan pada lampiran sebagaimana terlampir.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fokus program yang dilaksanakan pada urusan ini adalah penataan administrasi kependudukan dengan indikasi kegiatan sebagaimana terlampir.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa difokuskan pada pelaksanaan program :

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;
- b. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; dan
- d. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga



Sebagaimana program dilaksanakan didukung dengan kegiatan-kegiatan sesuai indikasi pada lampiran.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Program keluarga berencana;
- b. Program kesehatan reproduksi remaja;
- c. Program pelayanan kontrasepsi;
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat;
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana terlampir pada lampiran.

9. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Urusan bidang perhubungan pada tahun 2017 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan
- e. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika pada tahun 2017 melaksanakan program pembangunan sebagai berikut :

- a. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- b. Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; dan
- c. Peningkatan kerjasama informasi dengan media massa.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2017 melaksanakan program adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;



- b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; dan
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

12. Urusan Penanaman Modal

Fokus program pada urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; dan
- b. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Sedangkan indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana tersebut di atas terlampir.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Fokus program pada urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 adalah :

- a. Program pembinaan pemuda dan olahraga; dan
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana pada lampiran.

14. Urusan Statistik

Fokus program pada urusan statistik adalah pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan indikasi kegiatan seperti pada lampiran.

15. Urusan Persandian

Untuk sementara dalam rangka melaksanakan urusan persandian, perencanaan pembangunan tahun 2017 masih belum ada fokus pelaksanaan program.

16. Urusan Kebudayaan

Fokus program urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Program pengembangan nilai budaya;
- b. Program pengelolaan kebudayaan; dan
- c. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana pada lampiran.

17. Urusan Perpustakaan

Fokus program pada urusan perpustakaan adalah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan seperti pada lampiran.

18. Urusan Arsip

Fokus program pelaksanaan urusan arsip sebagaimana direncanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Proram perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; dan
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana pada lampiran.



5.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Fokus program pada urusan kelautan dan perikanan pada perencanaan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya perikanan;
- b. Pengembangan perikanan tangkap; dan
- c. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

2. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2017 difokuskan pada program :

- a. Pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Pengembangan destinasi pariwisata; dan
- c. Pengembangan kemitraan di bidang pariwisata.

Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing program sebagaimana terlampir.

3. Urusan Pertanian

Fokus program pada urusan pertanian pada perencanaan pembangunan tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Program peningkatan ketahanan pangan;
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan;
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- g. Program peningkatan produksi hasil peternakan; dan
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

4. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun 2017 akan diarahkan ke program :

- a. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; dan
- b. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing program sebagaimana terlampir.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Fokus program pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
- c. Program pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir.

6. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan program pada urusan perdagangan difokuskan dalam program :



- a. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- b. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan
- c. Pembinaan pedagang kakilima dan asongan.

Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing program sebagaimana terlampir.

7. Urusan Perindustrian

Fokus pelaksanaan program pada urusan perindustrian adalah :

- a. Pengembangan industri kecil dan menengah; dan
- b. Peningkatan kemampuan teknologi industri.

Sedangkan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dimasing-masing program sebagaimana terlampir

8. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi difokuskan pada program pengembangan wilayah transmigrasi dan program transmigrasi lokal dengan indikasi kegiatan sebagaimana terlampir.

5.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Mendasari pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maka didukung pelaksanaan urusan yang tidak terkait dalam urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun pelaksanaan urusan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan umum adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Fokus urusan perencanaan pada tahun 2017 dirumuskan ke program :

- a. Pengembangan data/informasi;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perencanaan pembangunan daerah;
- d. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e. Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- f. Perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- g. Pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan; dan
- h. Pengembangan wilayah perbatasan

Indikasi kegiatan pada masing-masing program sebagaimana dijabarkan dalam lampiran.

2. Keuangan

Pelaksanaan urusan keuangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan indikasi kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam lampiran.

3. Kepegawaian dan Diklat

Rumusan program urusan kepegawaian dan diklat pada tahun 2017 diarahkan pada program :

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur; dan
- b. Pembinaan dan pengembangan aparatur.

Indikasi kegiatan pada masing-masing program dijabarkan dalam lampiran.



4. Penelitian dan Pengembangan

Untuk sementara dalam rangka melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan tahun 2017 masih belum ada fokus pelaksanaan program.

5. Fungsi Lainnya

Fokus kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi lainnya secara garis besar adalah rumusan program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana program :

- a. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- c. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah;
- d. Penataan peraturan perundang-undangan;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa;
- g. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan;
- h. Penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM;
- i. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat;
- k. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
- l. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- m. Peningkatan koordinasi dan pembinaan bidang Tata Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Indikasi kegiatan pada masing-masing fokus program dijabarkan pada lampiran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD, diantara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, jasa pengamanan kantor, asuransi gedung kantor, asuransi kendaraan dinas, penyediaan jasa medis dan paramedis dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran. Diharapkan fokus-fokus kegiatan tersebut dapat mendukung peningkatan kapasitas pelayanan publik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan pada : pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Penataan



lingkungan kantor. Pada dasarnya fokus kegiatan pada program ini adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Diharapkan kegiatan pada program ini dapat tercapai sesuai dengan prioritas pembangunan dalam hal peningkatan kapasitas pemerintahan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan dukungan pencapaian target tahun 2017 yaitu dengan terlaksananya diklat dan bintek aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di setiap SKPD sesuai dengan urusan bidang yang ditangani.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

Fokus kegiatan pada program ini : laporan kinerja SKPD. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan harapan mendukung target capaian pembangunan tahun 2017 yaitu tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan mendasari target-target yang sudah ditetapkan pada program sesuai urusan bidang yang ditangani pada masing-masing SKPD.

Secara ringkas, *estimasirekapitulasi* pagu anggaran indikatif yang digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan pada masing-masing SKPD pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel. 5.1
Pagu Indikatif Tahun 2017

Kode	SKPD	APBD	PROPORSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.0101	DINAS PENDIDIKAN	40.648.693.000	3,09%
1.1.1.0201	TK NEGERI PEMBINA KLATEN	120.000.000	0,01%
1.1.1.0301	SD NEGERI		0,00%
1.1.1.0400	SMP NEGERI SE-KABUPATEN	1.841.600.000	0,14%
1.1.1.0500	SMA NEGERI SE-KABUPATEN	360.000.000	0,03%
1.1.1.0600	SMK NEGERI SE-KABUPATEN	650.000.000	0,05%
1.1.1.0701	SKB CAWAS	406.325.000	0,03%
1.1.1.0800	DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN	4.879.720.000	0,37%
1.1.2.0101	DINAS KESEHATAN	54.097.049.500	4,11%
1.1.2.0201	PUSKESMAS		0,00%
1.1.2.0301	RSUD KLATEN	125.459.981.528	9,53%
1.1.3.0101	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM	575.963.635.000	43,74%
1.1.4.0101	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.135.500.000	0,77%
1.1.6.0101	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.674.932.000	0,28%
1.1.6.0201	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.240.000.000	0,32%
1.2.2.0101	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.258.853.000	0,25%
1.2.3.0101	KANTOR KETAHANAN PANGAN	6.001.000.000	0,46%
1.2.5.0101	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	11.535.200.000	0,88%
1.2.6.0101	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.882.500.000	0,75%

Kode	SKPD	APBD	PROPORSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.7.0101	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	155.962.180.000	11,84%
1.2.9.0101	DINAS PERHUBUNGAN	28.576.000.000	2,17%
1.2.11.0101	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	21.399.731.000	1,63%
1.2.12.0101	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	967.012.334	0,07%
1.2.13.0101	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	49.994.410.000	3,80%
1.2.17.0101	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	133.000.000	0,01%
2.3.0101	DINAS PERTANIAN	59.361.816.000	4,51%
3.1.0101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.573.000.000	0,88%
3.2.0101	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10.912.360.000	0,83%
3.3.0101	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.288.600.000	0,48%
3.5.0300	SEKRETARIAT DAERAH		0,00%
3.5.0301	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	3.073.800.000	0,23%
3.5.0302	BAGIAN PEMBANGUNAN	885.398.750	0,07%
3.5.0303	BAGIAN HUKUM	1.883.250.000	0,14%
3.5.0304	BAGIAN PEREKONOMIAN	11.032.000.000	0,84%
3.5.0305	BAGIAN ORGANISASI	1.588.890.000	0,12%
3.5.0306	BAGIAN KESRA	7.360.001.000	0,56%
3.5.0307	BAGIAN HUMAS	4.400.180.500	0,33%
3.5.0308	BAGIAN UMUM	11.852.238.900	0,90%
3.5.0401	SEKRETARIAT DPRD	29.105.800.000	2,21%
3.5.0701	INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN	4.256.250.000	0,32%
3.5.0901	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.075.000.000	0,54%
3.5.1001	KECAMATAN KLATEN UTARA	3.066.127.000	0,23%
3.5.1101	KECAMATAN KLATEN TENGAH	2.693.400.000	0,20%
3.5.1201	KECAMATAN KLATEN SELATAN	456.773.000	0,03%
3.5.1301	KECAMATAN KALIKOTES	915.777.000	0,07%
3.5.1401	KECAMATAN NGAWEN	977.500.000	0,07%
3.5.1501	KECAMATAN KEBONARUM	782.200.000	0,06%
3.5.1601	KECAMATAN WEDI	492.266.000	0,04%
3.5.1701	KECAMATAN JOGONALAN	668.845.000	0,05%
3.5.1801	KECAMATAN GANTIWARNOW	893.000.000	0,07%
3.5.1901	KECAMATAN PRAMBANAN	634.554.700	0,05%
3.5.2001	KECAMATAN MANISRENGGO	1.348.200.000	0,10%
3.5.2101	KECAMATAN KEMALANG	663.500.000	0,05%
3.5.2201	KECAMATAN KARANGNONGKO	4.822.486.000	0,37%
3.5.2301	KECAMATAN JATINOM	812.600.000	0,06%
3.5.2401	KECAMATAN KARANGANOM	481.900.000	0,04%
3.5.2501	KECAMATAN TULUNG	-	0,00%
3.5.2601	KECAMATAN POLANHARJO	4.783.150.000	0,36%
3.5.2701	KECAMATAN DELANGGU	451.200.000	0,03%
3.5.2801	KECAMATAN JUWIRING	-	0,00%
3.5.2901	KECAMATAN WONOSARI	916.936.870	0,07%
3.5.3001	KECAMATAN CEPER	736.500.000	0,06%
3.5.3101	KECAMATAN PEDAN	1.401.250.000	0,11%
3.5.3201	KECAMATAN KARANGDOWO	696.391.000	0,05%

Kode	SKPD	APBD	PROPORSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.5.3301	KECAMATAN CAWAS	589.900.000	0,04%
3.5.3401	KECAMATAN TRUCUK	-	0,00%
3.5.3501	KECAMATAN BAYAT	784.300.000	0,06%
3.5.4001	KELURAHAN KABUPATEN	1.044.100.000	0,08%
3.5.4101	KELURAHAN KLATEN	502.898.000	0,04%
3.5.4201	KELURAHAN TONGGALAN	-	0,00%
3.5.4301	KELURAHAN MOJAYAN	182.961.000	0,01%
3.5.4401	KELURAHAN BUNTALAN	1.451.528.000	0,11%
3.5.4501	KELURAHAN BARENG	-	0,00%
3.5.4601	KELURAHAN BARENGLOR	-	0,00%
3.5.4701	KELURAHAN GERGUNUNG	-	0,00%
3.5.4801	KELURAHAN GAYAMPRIK	276.750.000	0,02%
3.5.4901	KELURAHAN JATINOM	2.436.700.000	0,19%
	Jumlah Total	1.316.799.601.082	100%

BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan lima tahun ketiga (2015-2020) dan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 masih dalam proses penyusunan. Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan karena dokumen yang konteksnya lebih tinggi bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penyusunan dokumen lain. Dan juga dalam penyusunan dokumen RKPD tetap mengacu pada Rancangan RKP Nasional dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam rangka mensinergikan, mensikronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Agar pelaksanaan RKPD tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2017 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh *Stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha sebagai pemangku kepentingan pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2017.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap



penjabaran dan sinergisitas RKPD Tahun 2017, ke dalam Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2017.

6.2. Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, maka RKPD Tahun 2017 disusun sebagai dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2017.

RKPD ini disusun sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan peraturan pemerintah pusat dan diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah Kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum SKPD Kabupaten maupun forum lain yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, disamping itu juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain diusulkan ke APBD Kabupaten, juga diusulkan ke APBD Propinsi dan APBN (*Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*).

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten selain dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Klaten sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dapat segera terwujud.

BUPATI KLATEN,

SRI HARTINI

